

711
WAH
u

9

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI KABUPATEN KEBUMEN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

HARYONO WAHYUDI
L4D 002 121



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
DI KABUPATEN KEBUMEN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

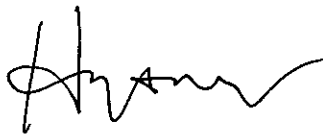
HARYONO WAHYUDI
L4D002121

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 28 Juni 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

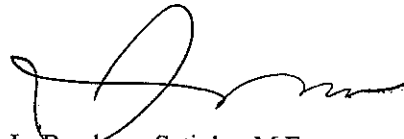
Semarang, Juni 2004

Pembimbing Pendamping



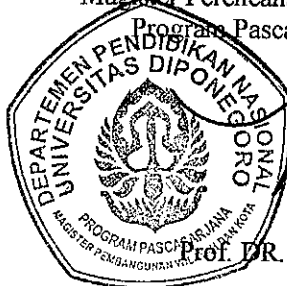
Ir. Hadi Wahyono, MA


Pembimbing Utama



Ir. Bambang Setioko, M.Eng

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



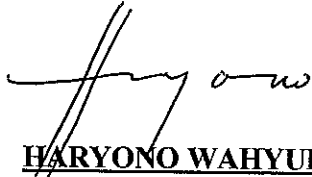

Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3372/T/MPWK/C
Tgl.	28/06/05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Juni 2004



HARYONO WAHYUDI
NIM L4D002121

ALLAH MENINGGIKAN DERAJAT
ORANG –ORANG YANG BERIMAN DI ANTARA KAMU DAN
ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU PENGETAHUAN
BEBERAPA DERAJAT
(AL MUJADALAH : 11)

THESIS INI KUPERSEMBAHKAN BUAT :

*Ayah Ibu,
Istriku tercinta Yani,
Dan dua bidadari mungil yang usil,
Amin & Tyas*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan hanya untuk Allah SWT yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis yang berjudul **“Kota Gombong Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen”** disusun sebagai syarat meraih gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Pemilihan topik ini didasari pada pemikiran tentang peran Kota Gombong, kota kedua di Kabupaten Kebumen, sebagai suatu pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen, penulis mencoba meneliti keadaan ini dari aspek spasial agar mengetahui tingkat peran dan kontribusi suatu kota kedua sebagai suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah yang lebih luas yaitu Kabupaten Kebumen.

Keberhasilan pengerjaan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, dan karenanya penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. Ir. Sugiono Sutomo, DEA selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang sekaligus selaku pembahas.
2. Ir. Bambang Setioko, M. Eng selaku Pembimbing I dan Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Pembimbing II dengan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
3. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh dosen yang mengampu mata kuliah pada Program MPPWK UNDIP.
5. Kepala Pusdiktek Departemen Kimpraswil atas kesempatan dan pendanaan yang telah diberikan kepada penulis dalam studi ini.
6. Bupati Kebumen yang memberi izin untuk mengikuti studi di MPPWK UNDIP.
7. Istri tercinta, dan dua bidadari kecil yang selalu ingin ikut memberi masukan, Ibunda dan Ayahanda terkasih serta keluarga besar Kebumen dan Pekalongan yang selama ini memberi dorongan semangat, penuh kerelaan dan pengertian yang mendalam.
8. Teman-teman kuliah MPPWK II Universitas Diponegoro Semarang dengan kekompakannya serta saling menolong.
9. Rekan-rekan di Bappeda Kebumen dan staf MPPWK yang penuh pengertian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima sebagai masukan berharga dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga penyusunan tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial	7
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	8
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.6 Pendekatan Penelitian.....	11
1.7 Metoda Penelitian.....	11
1.7.1 Jenis dan Kebutuhan Data	13
1.7.2 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data	14
1.7.3. Teknik Sampling.....	15
1.7.4. Teknik Analisis	20
1.8 Sistematika Penulisan	32
BAB II KAJIAN PERAN PUSAT PERTUMBUHAN	34
2.1 Peran dan Sistem Kota	34
2.1.1 Fungsi Kota	34
2.1.2. Teori Tempat Pusat	40
2.1.3 Sistem Perkotaan	47
2.1.4 Model Organisasi Sistem Perkotaan.....	49
2.2 Wilayah dan Pengembangan Wilayah	51
2.2.1 Konsep Wilayah	51
2.2.2 Pengembangan Wilayah	55
2.2.3 Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah	57
2.2.3.1. Teori Basis Ekonomi	57
2.2.3.2. Teori Kutub Pertumbuhan	58
2.2.3.3. Teori Interaksi Pusat Inti Daerah Periperi.....	63
2.3 Peran Kota Dalam Pengembangan Wilayah.....	64
2.3.1 Keterkaitan Kota dengan Wilayah	64

	2.3.2 Peran Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	65
	2.4. Kesimpulan Kajian Teori.....	71
BAB. III	KARAKTERISRIK WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN DAN KOTA GOMBONG	82
	3.1. Kajian Umum Wilayah Kabupaten Kebumen	82
	3.1.1 Kondisi Fisik Kabupaten Kebumen.....	82
	3.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi	85
	3.1.2.1. Kependudukan.....	85
	3.1.2.2. Perekonomian.....	89
	3.1.3 Perwilayahan Perencanaan Kabupaten Kebumen	91
	3.2. Kajian Karakteristik Kota Gombong	95
	3.2.1 Gambaran Umum Kota Gombong.....	95
	3.2.2 Kondisi Fisik Dasar.....	97
	3.2.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	98
	3.2.3.1. Kependudukan.....	98
	3.2.3.2. Perekonomian.....	101
	3.2.4 Perwilayahan Perencanaan Kota Gombong.....	104
	3.2.5 Kondisi Fasilitas Kota Gombong	104
BAB IV.	KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN.....	110
	4.1. Analisis Peran Kota Gombong	110
	4.1.1 Analisis Tipologi Ekonomi Wilayah	111
	4.1.2 Analisis Interaksi Ekonomi.....	127
	4.1.3 Peran Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan	134
	4.1.4 Analisis Faktor-faktor yang mendukung Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen	139
	4.2. Analisis Wilayah Pengaruh	140
	4.2.1 Analisis Wilayah Pengaruh Kota Gombong.....	143
	4.2.2 Analisis Wilayah Pengaruh Kota Kebumen.....	148
	4.3. Analisis Hirarki Kota.....	154
	4.4. Kinerja Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan.....	164
	4.4.1 Analisis Kesesuaian Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan	164
	4.4.2. Analisis Internal Kota Gombong	169
	4.4.2.1. Analisis Struktur Tata Ruang Kota Gombong	169
	4.4.2.2. Analisis Fasilitas	174
	4.4.2.3. Analisis Prasarana dan sarana Transportasi	177
	4.5. Analisis Potensi dan Peluang Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan.....	181
	4.5.1. Potensi Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan	181
	4.5.2. Kekurangan Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan	182

4.5.3. Peluang Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan	182
4.5.4. Tantangan Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan	183
4.6. Analisis Peran Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan dalam sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen	183
BAB V. PENUTUP	189
5.1. Temuan Penelitian.....	189
5.2. Kesimpulan.....	191
5.3. Rekomendasi.....	192
DAFTAR PUSTAKA.....	194
LAMPIRAN.....	198

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL	I.1.	Kebutuhan Data 13
TABEL	I.2.	Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian..... 18
TABEL	II.1.	Kesimpulan Kajian Peran Pusat Pertumbuhan..... 71
TABEL	III.1.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen 86
TABEL	III.2.	Struktur Penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2002..... 87
TABEL	III.3.	Prosentase Penduduk menurut Jenis Pekerjaan per sektor Kabupaten Kebumen 88
TABEL	III.4.	PDRB Kab. Kebumen Berdasarkan harga berlaku..... 90
TABEL	III.5.	PDRB Kab. Kebumen Berdasarkan harga konstan 1993 91
TABEL	III.6.	Pertumbuhan Penduduk Kota Gombong 100
TABEL	III.7.	PDRB Kota Gombong Berdasarkan harga berlaku..... 102
TABEL	III.8.	PDRB Kota Gombong Berdasarkan harga konstan 1993 . 103
TABEL	IV.1.	Perhitungan LQ Kabupaten Kebumen..... 113
TABEL	IV.2.	Perhitungan LQ Kecamatan Gombong..... 115
TABEL	IV.3.	Perbandingan LQ Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Gombong..... 117
TABEL	IV.4.	Sektor basis pada setiap kecamatan..... 118
TABEL	IV.5.	Persebaran sektor basis di Kabupaten Kebumen 122
TABEL	IV.6.	Hasil Perhitungan Gravitasi Kota Gombong 143
TABEL	IV.7.	Hasil Perhitungan Jarak Titik Henti Kota Gombong 146
TABEL	IV.8.	Hasil Perhitungan Gravitasi Kota Kebumen..... 148
TABEL	IV.9.	Hasil Perhitungan Jarak Titik Henti Kota Kebumen. 150
TABEL	IV.10.	Perbandingan Analisis Kota Kebumen dan Kota Gombong..... 151
TABEL	IV.11.	Perhitungan Skalogram 157
TABEL	IV.12.	Pengelompokan Kota dari hasil Analisis Skalogram 158
TABEL	IV.13.	Hasil Perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot 160
TABEL	IV.14.	Tingkat Peran Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan..... 168
TABEL	IV.15.	Perbandingan Kegiatan Stasiun Gombong dan Stasiun Kebumen..... 179

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR	1.1	Peta Jawa Tengah Bagian Selatan 4
GAMBAR	1.2.	Alur Pikir Peran Kota Gombong terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Kebumen 10
GAMBAR	1.3.	Peta lokasi penelitian 19
GAMBAR	1.4.	Alur Pikir Proses Analisis Data 22
GAMBAR	2.1.	Tempat Sentral dan batasnya 43
GAMBAR	2.2.	Hirarki Tempat Sentral yang Kawasan Daya Pengaruhnya Berbeda-beda..... 44
GAMBAR	2.3.	Market Optimizing Principle K=3 45
GAMBAR	2.4.	Traffic Optimizing Principle K= 4 46
GAMBAR	2.5.	Administration Optimizing Principle K= 7 47
GAMBAR	3.1.	Peta Kabupaten Kebumen 83
GAMBAR	3.2.	Pembagian SWP menurut Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2003 92
GAMBAR	3.3.	Peta Desa Perkotaan di Kabupaten Kebumen 94
GAMBAR	3.4.	Peta Kecamatan Gombong 96
GAMBAR	3.5.	Peta Penggunaan Lahan Kec. Gombong Triwulan I 2004. 99
GAMBAR	3.6.	Peta Kota Gombong berdasarkan RUTRK IKK Kota Gombong tahun 1990-2010 105
GAMBAR	3.7.	Peta Fasilitas Kota Gombong 108
GAMBAR	4.1.	Peta Pusat Pemasaran dan Pengolahan Lanjut Hasil Pertanian..... 128
GAMBAR	4.2.	Kota Gombong sebagai Penyedia Lapangan Pekerjaan.... 130
GAMBAR	4.3.	Kota Gombong sebagai Pusat Distribusi..... 132
GAMBAR	4.4.	Kota Gombong sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan..... 135
GAMBAR	4.5.	Kota Gombong sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan..... 137
GAMBAR	4.6.	Peta Wilayah Pengaruh Kota di Kabupaten Kebumen 152
GAMBAR	4.7	Perbandingan jumlah penduduk dan ragam fasilitas..... 159
GAMBAR	4.8.	Hirarki Kota di Kabupaten Kebumen 161
GAMBAR	4.9.	Hasil Perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot..... 163
GAMBAR	4.10.	Peta Analisis Struktur Tata Ruang Kota Gombong 173
GAMBAR	4.11.	Peta Kondisi Transportasi Kota Gombong 180
GAMBAR	4.12.	Peran Kota Gombong dan Kota Kebumen..... 187

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
LAMPIRAN	A	PDRB Kecamatan 198
LAMPIRAN	B	Perhitungan Location Quotient 202
LAMPIRAN	C	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2002 209
LAMPIRAN	D	Jumlah Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2003 210
LAMPIRAN	E	Jumlah Penduduk, Jarak antar Ibukota Kecamatan dan Perhitungan Gravitasi Antar Wilayah Kecamatan 213
LAMPIRAN	F	Perhitungan Analisa Jarak Titik Henti Kecamatan 219
LAMPIRAN	G	Kondisi Eksisting, Sarana dan Prasarana di Kabupaten Kebumen, Hasil Perhitungan Skalogram, Perhitungan Hirarki berdasarkan Indeks Sentralitas Terbobot..... 222
LAMPIRAN	H	Banyaknya Industri Besar, Kecil dan Rumah Tangga Per Kecamatan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2002..... 226

ABSTRAK

Kota Gombong dengan fasilitas perkotaan yang lengkap telah ditetapkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap wilayah pelayanannya sehingga berkembang sesuai dengan hirarki kotanya. Perkembangan Kota Gombong lebih menarik sebagai tempat berusaha dibandingkan kota-kota kecil sekitarnya sehingga berkembang sendiri mengakibatkan pusat-pusat pelayanan wilayah sekitarnya menjadi tidak berkembang. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, hirarki Kota Gombong sama dengan Kota Kebumen sebagai ibukota Kabupaten Kebumen sehingga memerlukan kejelasan peran dan fungsi yang diemban oleh masing-masing kota. Kejelasan peran kota ini berkaitan erat dengan konsep pusat pertumbuhan karena kota-kota pusat pertumbuhan harus terintegrasi dan bersifat komplementer.

Analisis Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan terdiri dari lima analisis yang terdiri dari analisis tipologi ekonomi wilayah, analisis keterkaitan aktivitas perekonomian, analisis wilayah pengaruh, analisis hirarki kota dan analisis peranan Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah terhadap sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena mendominasi perekonomian wilayah barat Kabupaten Kebumen, ditunjukkan dengan wilayah pengaruh dan interaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya yaitu di 8 kecamatan yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring. Dominasi Kota Gombong terhadap wilayah sekitarnya mengakibatkan ketergantungan wilayah sekitarnya terhadap fasilitas perkotaan Kota Gombong dan sistem distribusi barang, baik ke wilayah belakangnya maupun ke kota besar.

Kota Gombong memiliki pengaruh yang kuat karena memiliki fasilitas yang lengkap dan mempunyai peran sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, pusat komersial dan pelayanan jasa, pusat pemasaran dan perdagangan regional, pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, pusat transportasi dan komunikasi regional dan pusat transformasi sosial. Sebagai sebuah pusat pertumbuhan, Kota Gombong berkembang bukan berdasar pada keberadaan industri besar atau adanya kawasan industri tetapi lebih mengarah sebagai kota yang memberikan pelayanan ke wilayah belakangnya yang didominasi sektor pertanian. Dengan fasilitas yang dimiliki dan interaksi ekonomi yang terjadi maka dalam sistem perwilayahan Kabupaten Kebumen, Kota Gombong mengarah sebagai pusat jasa, pusat industri pengolahan dan perdagangan berskala regional dan lokal sedangkan Kota Kebumen adalah pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat permukiman. Kota Gombong berkembang terutama disebabkan peran sebagai pusat pelayanan wilayah, maka pengembangannya perlu ditunjang dengan jaringan transportasi ke wilayah belakangnya. Pengembangan wilayah dapat dipercepat bila di Kota Gombong terdapat industri yang mempunyai keterkaitan dengan wilayah belakangnya.

ABTRACT

Gombong with the complete urban facility have been specified as one of regional growth center expected can give the influence to its hinterland so that expand as according to town hierarchy owned. Growth of Gombong more interesting as bussines place than surrounding small town becoming not expand. According to revision RTRW (Regional Spatial Plan) of Kebumen Regency, hierarchy of Gombong is equal to Kebumen Town as capital of Kebumen regency so that need the clarity of role and function by each town. This town role clarity is interconnected with the concept the growth center because the growth center have to be integrated and have the character of complementary.

Analyse Gombong as one of regional growth center in Kebumen Regency consisted of five analyses typology of regional economic analysis and activity economy relation analysis, regional influence analysis, analysis of hierarchy of town and analysis of role of Gombong as one of regional growth center to region system in Kebumen Regency. Based on the analysis which has been done, it can be concluded that Gombong's role and function as one of growth center in Kebumen Regency is big because Gombong become dominates western region of Kebumen Regency economics, indicated that Gombong's areas of influence and economics interaction in surrounding areas in 8 subdistrict that is Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah and Puring. Gombong dominates over surrrounding areas caused its depend on Gombong's urban facilities and goods distribution system, either come in to its hinterland or go to bigger cities.

Gombong own the strong interaction because owning complete facility and have role as public service center and social, commercial center and service activities, center the marketing and commerce regional, supply center and process of agriculture product, center the transportation and communications regional and center the social transformation. As a growth center, Gombong expand non basing on big industrial existence or existence of industrial area but rather observe as town giving service to its hinterland which is predominated by agriculture. With facility owned and economic interaction that happened hence in system of region of Kebumen Regency, Gombong instruct as service center, industrial estate of processing and commerce of have regional and local scale while Kebumen Town is governance center, the service activities center and settlement center. Development of Gombong especially because of its role as regional services center then its development be needed supported by transportation system for its hinterland. Regional development should be accelerated if Gombong has industry which linkage with its hinterland.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, fungsi dan peran kota dapat ditinjau dari konsep pengembangan wilayah. Secara garis besar terdapat tiga konsep utama pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang, yaitu pusat pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional (*functional integration*), dan pendekatan desentralisasi (Alkadri, et al 1999:8).

Konsep pertumbuhan wilayah menekankan perlunya investasi terpusat pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur cukup baik. Konsep kedua, integrasi fungsional, adalah suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan sengaja di antara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah lain. Perencanaan kota di Indonesia banyak menganut konsep ini, namun integrasi yang dilakukan bukan berdasar pada potensi produksi tetapi lebih pada fungsi pemerintahan. Konsep yang ketiga yaitu pendekatan desentralisasi, dimaksudkan agar dapat mencegah tidak terjadinya aliran keluar (*outflow*) dari sumber dana dan sumber daya manusia (Alkadri, et al 1999:8-9).

Peran kota kecil/sedang mulai mendapat perhatian setelah adanya konsep desentralisasi kota. Sejalan dengan keraguan atau bahkan penolakan terhadap pertumbuhan yang terkonsentrasi di kota besar, muncul gagasan untuk mempromosikan "desentralisasi" yang manifestasinya adalah dengan menyebarkan pembangunan melalui penanaman investasi ke pusat-pusat yang lebih rendah hirarkinya (Randinelli and Ruddle:1978:48 dalam Prabatmodjo:1993)). Menurut Randinelli dalam Prabatmodjo (1993:3), tujuan dasar

gagasan desentralisasi adalah untuk mencapai pemerataan sambil menghindari penyakit kota besar. Dalam versi lebih moderat, perhatian pada seluruh kota dalam suatu hirarki mulai dari kota besar sampai pusat pelayanan juga dikembangkan. Ini dilandasi pemikiran, bahwa integrasi yang baik berbagai pusat dengan karakteristik fungsional yang beragam dapat mendorong perkembangan wilayah lebih merata.

Perkembangan kota dan wilayah di Indonesia dapat dilihat sebagai resultante kegiatan sosial ekonomi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh interaksi kebijaksanaan pemerintah dan reaksi masyarakat. Mengingat kondisi geografi wilayah nasional yang tidak homogen, terdapat intensitas perkembangan kota dan wilayah yang berbeda-beda. (Sumadibyo;1994).

Perkembangan kota yang pesat secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antardaerah. Menurut Tim P4N-UGM dengan Bappeda Jawa Tengah dalam Harijanta (2000:6), daerah yang mengalami pertumbuhan lambat antara lain disebabkan adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja yang terampil.

Kelengkapan fasilitas dapat terjadi sebagai hasil investasi swasta pada suatu kota atau merupakan hasil kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut berupa penetapan kota-kota tertentu menjadi suatu pusat pertumbuhan (*growth centre*). Pusat pertumbuhan merupakan salah satu peran terpenting suatu kota. Beberapa peran kota seperti pusat pengembangan ekonomi dan pusat pelayanan jasa wilayah secara langsung dan tidak langsung terkait dengan peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Kebijakan penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah juga dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen dengan wilayah yang luas yaitu 128,1 km persegi membutuhkan suatu usaha pengembangan wilayah yang terintegrasi agar terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan membuat beberapa pusat pertumbuhan antara lain Kota Gombong yang terletak di jalur lintas selatan Jawa, 21 kilometer sebelah barat Kota Kebumen.

Kota Gombong merupakan kota penting di Kabupaten Kebumen karena merupakan salah satu bentuk konsep desentralisasi untuk meratakan pembangunan di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal ini berupa pelaksanaan penyebaran pembangunan melalui penanaman investasi ke pusat-pusat yang lebih rendah hirarkinya dengan mendudukkan Kota Gombong dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen sebagai pusat pertumbuhan wilayah

Salah satu bentuk desentralisasi tersebut berupa upaya peningkatan status kota, maka pada tahun 1996/1997 Kota Gombong pernah direncanakan menjadi Kota Administratif (Kotatip) Gombong, sehingga sebagian prasarana penunjang telah di bangun seperti Pasar Hewan di Purbowangi dan beberapa kantor pemerintahan seperti kantor calon Kecamatan Gombong Barat.

Terdapat beberapa fasilitas di Kota Gombong yang dianggap lebih besar daripada di Kota Kebumen antara lain toko elektronik dan toko sepeda motor bekas. Kota Gombong juga memiliki tempat wisata berupa Benteng Van Derwijck serta Pasar Wonokriyo.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

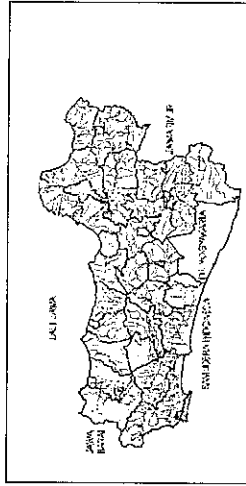
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

P E T A

JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat wilayah Pengembangan
- Ibu Kota Kabupaten

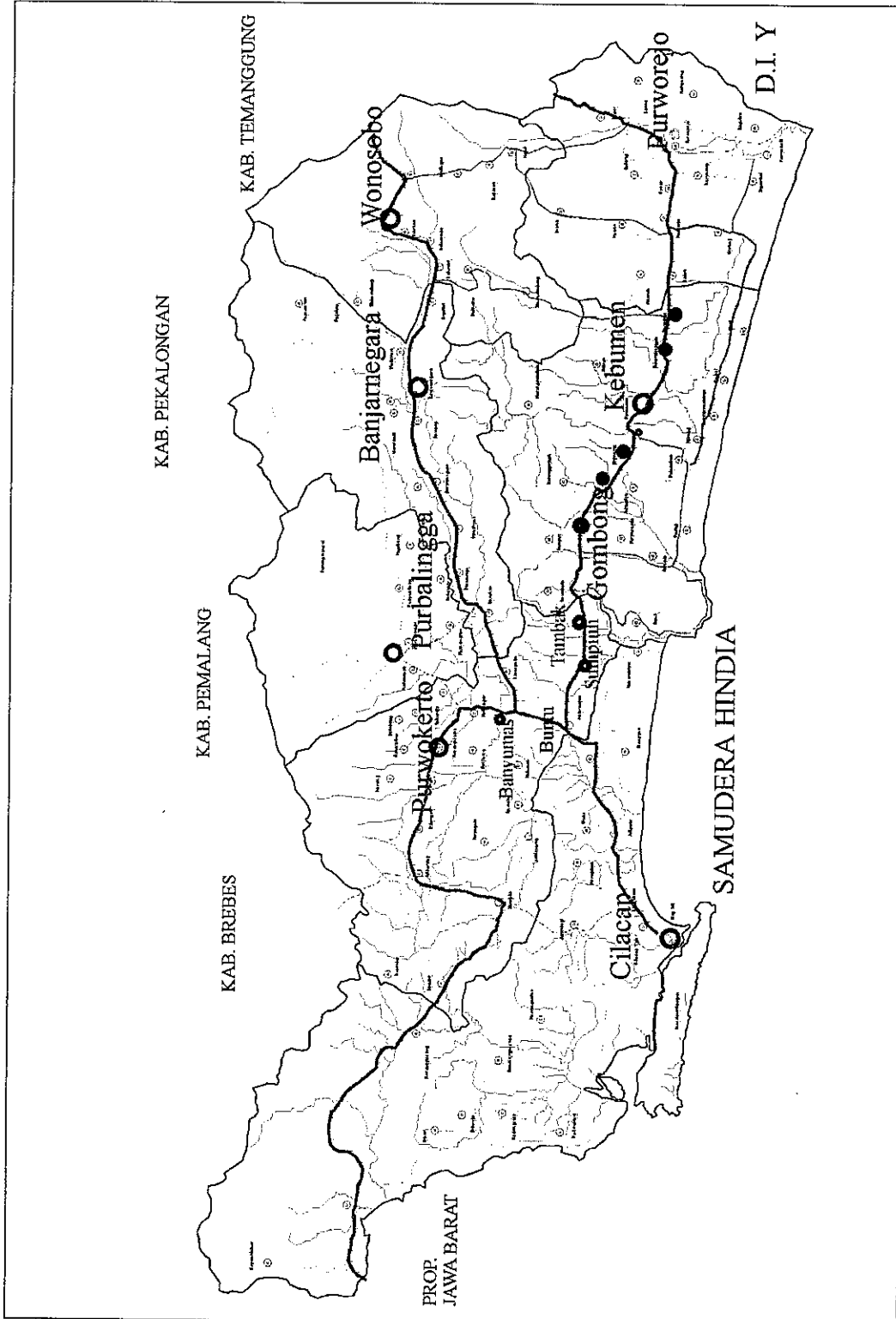


Nomor Gambar : I.1
Halaman : 4

Skala 1 : 150.000



Sumber : PETA JAWA TENGAH



Kota Gombong merupakan salah satu rangkaian kota yang terletak di jalur utama selatan Jawa (Gambar 1.1). Dalam perdagangan terdapat pengaruh dari beberapa kota di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Kota terbesar di sebelah barat Kota Gombong adalah Purwokerto berjarak sekitar 90 km. Sementara di sebelah Timur, kota besar yang terdekat adalah Kota Kebumen. Kota Gombong selain dilintasi jalur selatan Jawa, juga mempunyai jaringan jalan ke Kabupaten Banjarnegara.

Perkembangan Kota Gombong dapat dikatakan melebihi ibukota kabupaten. Berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Kebumen 2003, hirarki Kota Gombong sama dengan Kota Kebumen sebagai ibukota kabupaten, hal tersebut menunjukkan Kota Gombong memiliki fasilitas yang hampir sama dengan ibu kota Kabupaten Kebumen.

Dengan hirarki kota yang sama menimbulkan perlunya kejelasan peran suatu kota karena sangat penting untuk perencanaan pengembangan kota yang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Sebagaimana dinyatakan Sumadibyo (1994) bahwa secara fungsional terdapat hubungan yang erat antara kota dan wilayah, sehingga perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kota dan demikian pula sebaliknya. Dengan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan Kota Gombong dan wilayah sekitarnya dapat dilihat sebagai hasil kegiatan sosial ekonomi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh interaksi kebijaksanaan pemerintah dan reaksi masyarakat. Investasi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendukung perekonomian selama ini belum di pusatkan pada pusat-pusat pengembangan wilayah, masih tersebar ke seluruh wilayah. Dengan ketiadaan perlakuan khusus bagi pusat-pusat pertumbuhan serta tidak ada

penerapan integrasi pusat-pusat pertumbuhan dapat memperlambat upaya pengembangan di Kabupaten Kebumen, karena pusat-pusat pertumbuhan bersifat saling melengkapi/komplementer.

Pusat pertumbuhan yang ditetapkan antara lain Kota Gombang. Perkembangan kota Gombang dari ketersediaan fasilitas lebih menarik dari kota-kota kecil sekitarnya sebagai tempat berusaha, hal ini menimbulkan pemusatan perkembangan kota, sehingga menimbulkan “penarikan sumber daya” yang ada ke Kota Gombang. Penarikan ini menimbulkan kemandegan perkembangan ibukota kecamatan di sekitarnya, karena minat masyarakat lebih senang berusaha atau berinvestasi di Kota Gombang.

Menurut revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2003, hirarki Kota Gombang sama dengan Kota Kebumen, sedangkan menurut Rondinelli (1983), hirarki suatu kota juga mempengaruhi fungsi suatu kota. Dengan ada dua kota yang berhirarki sama di Kabupaten Kebumen, yaitu Kota Kebumen dan Kota Gombang memerlukan kejelasan peran dan fungsi yang diemban oleh masing-masing kota. Kejelasan peran kota ini berkaitan erat dengan konsep pusat pertumbuhan karena kota-kota pusat pertumbuhan harus terintegrasi dan bersifat komplementer (Alkadri, et al:1999)

Sifat komplementer atau saling melengkapi ini membutuhkan kejelasan peran Kota Gombang sebagai salah satu pusat pertumbuhan terhadap Kabupaten Kebumen, maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul adalah ***Bagaimana peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen.***

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kota Gombang dalam peran, wilayah pengaruh dan kedudukan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi peran Kota Gombong dengan melihat tipologi ekonomi dan interaksi Kota Gombong dengan wilayah sekitarnya.
2. Mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Gombong
3. Mengidentifikasi sistem kota di Kabupaten Kebumen dengan mengukur sistem hierarki kota-kota di wilayah Kabupaten Kebumen.
4. Menganalisis kedudukan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan dalam perwilayahan di Kabupaten Kebumen.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial yang membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut :

- Peran Kota Gombong yang dimaksud adalah peran dalam pengertian fungsi-fungsi perkotaan yang dimiliki Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan.
- Pusat pertumbuhan adalah kota dengan perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya dan akan menentukan serta mendominasi daerah lain yang lebih lambat perkembangannya (Sukirno:1976).
- Wilayah pengaruh adalah wilayah-wilayah yang mempunyai interaksi keruangan besar terhadap suatu kota yang diindikasikan dengan nilai analisis gravitasi dan titik henti (Warpani,1984; Daldjoeni 1997)
- Hirarki kota adalah tingkatan kota yang menunjukkan tingkat pelayanan kota, mengindikasikan sentralitas pelayanan berdasarkan perhitungan skalogram dan indeks sentralitas terbobot (Rondinelli :1985)

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial adalah batasan wilayah penelitian , yaitu sebagai berikut :

- ◆ Sebagai unit analisis bagi materi peran Kota Gombong adalah kelurahan/desa di Kecamatan Gombong. Unit analisisnya menggunakan kelurahan/desa di Kecamatan Gombong.
- ◆ Sebagai unit analisis untuk melihat peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Untuk hal ini unit analisisnya adalah 16 desa di kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Gombong yaitu Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Kuwarasan.
- ◆ Sebagai unit analisis untuk melihat kedudukan Kota Gombong dengan kota-kota lain di Kabupaten Kebumen. Unit analisis yang digunakan adalah kota pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen yaitu Kota Kebumen.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian didasarkan bahwa Kabupaten Kebumen dalam pengembangan wilayahnya membutuhkan pemacu diantaranya berupa pusat-pusat pertumbuhan yang dapat bertindak sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pusat pertumbuhan tersebut ditentukan antara lain berdasarkan penyediaan fasilitas pelayanan kota.

Perkembangan Kota Gombong yang ditandai dengan beragamnya jumlah fasilitas yang dimiliki. Dengan salah satu kriteria fasilitas perkotaan yang lengkap maka Kota Gombong ditetapkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah oleh Pemda Kabupaten Kebumen melalui Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.

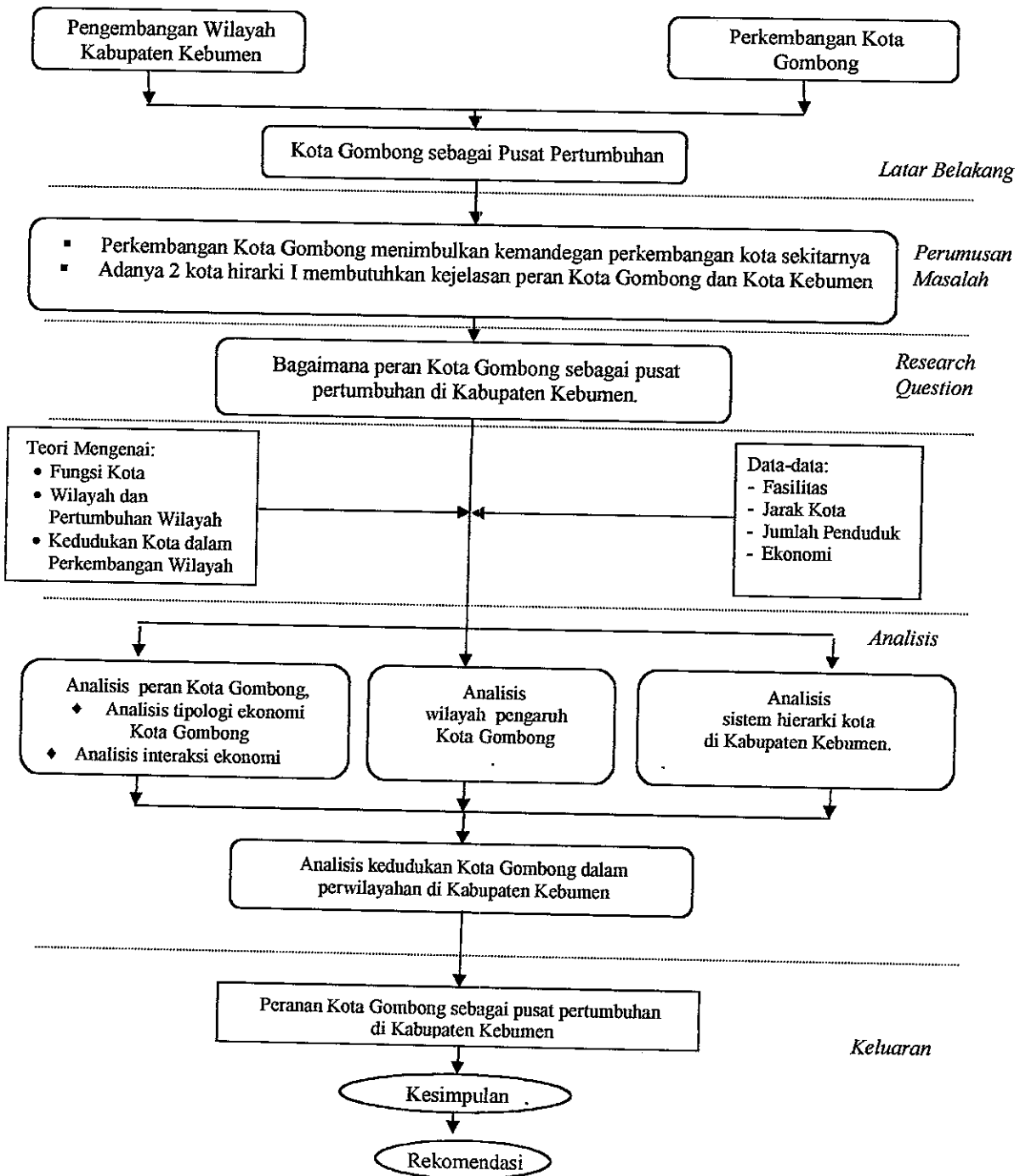
Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Gombong dapat memberikan pengaruh terhadap wilayah pelayanannya sehingga dapat turut berkembang sesuai dengan hirarki

kota yang dimilikinya. Perkembangan Kota Gombong lebih menarik sebagai tempat berusaha dibandingkan kota-kota kecil sekitarnya, hal ini menyebabkan Kota Gombong seolah-olah berkembang sendiri. Perkembangan ini membuat peran Kota Gombong tidak berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah yang dapat turut mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah sekitarnya khususnya di Kabupaten Kebumen bagian barat.

Menurut revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2003, hirarki Kota Gombong sama dengan Kota Kebumen, sebagai ibukota Kabupaten Kebumen, sehingga memerlukan kejelasan peran dan fungsi yang diemban oleh masing-masing kota. Kejelasan peran kota ini berkaitan erat dengan konsep pusat pertumbuhan karena kota-kota pusat pertumbuhan harus terintegrasi dan bersifat komplementer (Alkadri, et al:1999)

Dengan kondisi tersebut maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui peran Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen. Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan penelitian ini adalah : (1). mengidentifikasi peran Kota Gombong berdasarkan tipologi ekonomi dan interaksi dengan wilayah belakangnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (2). mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Gombong, hal ini untuk mengetahui jangkauan wilayah pengaruh dan pelayanan Kota Gombong, (3). mengidentifikasi sistem kota-kota pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen, hal ini untuk mengetahui hirarki Kota Gombong, (4). mengkaji kedudukan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas maka analisis untuk mengetahui peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan adalah analisis peran Kota Gombong, analisis wilayah pengaruh Kota Gombong, analisis hirarki kota dan analisis peran Kota Gombong dalam perwilayahan Kabupaten Kebumen. Dari keempat analisis maka akan dapat



GAMBAR 1.2
ALUR PIKIR PERAN KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

diketahui peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen. Setelah tahapan analisis, akan diberikan temuan penelitian, kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang menjadi batas administrasi Kabupaten Kebumen. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kasus peran kota terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan wilayah. Pendekatan ekonomi dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa kemajuan ekonomi dapat menjadi indikator pengembangan wilayah (Alkadri et.al). Sedangkan pendekatan spatial merupakan kajian penunjuk dari kegiatan ekonomi, sehingga lebih merupakan jawaban dari pertanyaan aktivitas di dalam wilayah berlangsung, ke arah mana aktivitas itu berkembang, dan sebaiknya aktivitas tersebut optimal dikembangkan.

Pendekatan ekonomi dan keruangan yang dilakukan dapat dilihat dalam lingkup mikro, pada tiap-tiap wilayah, maupun pada lingkup makro yang mempertimbangkan interaksi antara dua wilayah yang membentuk suatu sistem wilayah yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal maupun pengaruh eksternal.

1.7. Metoda Penelitian

Metoda penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Nazir (1988), metoda penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik

yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

Penelitian dilaksanakan dengan metode survei, menurut Tika (1997:9) survei adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu pada saat bersamaa. Data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat digeneralisasikan terhadap apa yang diteliti.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka metoda penelitian yang dipakai untuk membahas dan memaparkan adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walau kadang-kadang diberi interpretasi atau analisis (Tika, 1997:6).

Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995:9). Dengan demikian metoda analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut juga merupakan gabungan atau perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk mengukur data berupa angka atau bentuk kualitatif yang di-angka-kan berkenaan dengan karakteristik sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Gombong dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan pendekatan kualitatif dipergunakan untuk memberikan penjelasan verbal terhadap informasi, gambar, skema dan lain-lain berkenaan dengan analisis sektor ekonomi dan keruangan secara keseluruhan.

1.7.1. Jenis dan Kebutuhan Data

Untuk menunjang kesempurnaan analisis penelitian ini serta menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan, seperti buku laporan, peraturan-peraturan, dokumen dan sebagainya, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara mendalam. Kedua jenis data ini diambil sesuai dengan kebutuhan analisis, yaitu data-data pada wilayah yang diteliti sebagai unit analisisnya baik lingkup kabupaten dan per kecamatan.

TABEL 1.1
KEBUTUHAN DATA

No	Jenis Data	Unit Data	Jenis Data	Sumber Data	Tahun	Analisis	Manfaat
1	Data kependudukan	Kabupaten	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda KPM	2002	Model gravitasi	Menentukan wilayah pengaruh
						Model titik henti	Menentukan batas wilayah pengaruh
2	Data fasilitas kota	Kecamatan	Sekunder dan primer, angka, peta dan foto	BPS Bappeda KPM	2002	Skalogram Guttman	menentukan hirarki menurut kelengkapan fasilitas pelayanan kota
						Indeks sentralitas terbobot	menentukan hirarki kota menurut tingkat keterpusatan fasilitas
3	Data PDRB Kabupaten Kebumen	Kabupaten	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda	2002	Location Quotient	Menentukan tipologi ekonomi
4	Data PDRB Kecamatan se Kab. Kebumen	Kecamatan	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda	2002	Location Quotient	Menentukan tipologi ekonomi

Lanjutan

No	Jenis Data	Unit Data	Jenis Data	Sumber Data	Tahun	Analisis	Manfaat
5	Kondisi Kota Gombong	Kecamatan	Primer, wawancara	Camat Gombong dan Bappeda	2004	Aktivitas kota	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aktivitas perekonomian ◆ Kedudukan Gombong dalam perkembangan Kab. Kebumen
6.	Aktivitas penduduk	Kecamatan	Primer, wawancara	Penduduk di Kec.	2004	Aktivitas penduduk	Pengaruh Kota Gombong

Sumber: Data Diolah, 2004

1.7.2. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei, yaitu suatu teknik yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Survei adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu pada saat bersamaa. Data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat digeneralisasikan terhadap apa yang diteliti.

Survei dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden yang dalam hal ini adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen, Camat Gombong dan penduduk di wilayah penelitian yang dilakukan dengan wawancara. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel atas populasi yang mewakili seluruh populasi, mengingat waktu yang sangat terbatas dan materi yang sangat luas, sehingga perlu dibatasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan seluruh propinsi. Survei tersebut dilakukan melalui :

- a) Teknik wawancara untuk data primer adalah dengan menggunakan wawancara berstruktur mempergunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Hal yang membedakan dengan wawancara biasa adalah, dapat berfungsi deskriptif untuk memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang permasalahan yang

diselidiki (Nasution 2002:114). Teknik wawancara berstruktur mempunyai sejumlah keuntungan (Nasution 2002:119) yaitu : (1) tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat pada hal-hal yang telah ditentukan, (2). jawaban-jawaban mudah dicatat dan diberi kode, (3) data lebih mudah diolah dan saling dibandingkan.

- b) Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada, buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisis permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Data yang telah didapatkan, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabel-tabel hasil dari kompilasi data sekunder dan data teknis di lapangan, sehingga dapat dihasilkan suatu kumpulan data yang siap dianalisis. Dalam metoda pengumpulan data perlu disusun indeks sebagai ukuran gabungan yang disusun untuk mengukur suatu variabel tertentu dari hasil penelitian di lapangan.

1.7.3. Teknik Sampling

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh itemnya. Sebagian item yang dipilih disebut dengan sampel-sampel (*samples*), sedangkan seluruh item yang ada disebut dengan *universe* atau populasi (*population*). Dengan meneliti sebagian dari populasi yang ada, diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang dapat menggambarkan seluruh populasi yang bersangkutan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode yaitu *Probability Sampling* dan *Non Probability Sampling*. Metode *Probability Sampling* yakni setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih (Tika, 1997:39), dengan menggunakan teknik sampel daerah (*area sampling*) dilengkapi dengan *proportional sample* untuk mensurvei aktivitas penduduk, teknik sampel daerah (*area sampling*) adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.

Proportional sample dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan sample wilayah. Ada kalanya banyaknya subyek yang terdapat pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama, oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing wilayah. (Arikunto,1998:126-127). *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil dan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dalam penelitian ini, digunakan untuk wawancara dengan pejabat/pihak yang berkompeten.

Penentuan responden dilakukan dengan membagi batas alam karena wilayah yang diteliti luas (Singarimbun, 1995:154). Data primer berupa data aktivitas penduduk diperoleh dengan teknik wawancara terhadap responden di 16 desa pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar. Alasan pengambilan sample di 3 (tiga) kecamatan tersebut adalah keterbatasan waktu penelitian sehingga penelitian dilakukan hanya pada tiga kecamatan yang terletak berbatasan langsung dengan Kecamatan Gombong dengan asumsi bahwa dari ketiga kecamatan tersebut karena kedekatan geografis dapat diketahui peran Kota Gombong terhadap wilayah sekitarnya, sedangkan 16 desa tersebut merupakan desa yang berbatasan dengan Kecamatan Gombong dan desa yang merupakan ibukota 3 (tiga) kecamatan tersebut.

Jumlah penduduk yang akan dijadikan sampel terdapat beberapa pedoman. Untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla,1993:163) pada penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi. Selanjutnya Sugiarto et al (2001 : 10), bilamana sampel sebesar 10 persen dari populasi masih dianggap besar, maka alternatif yang bisa digunakan adalah mengambil sampel sebanyak 30, dengan pertimbangan ukuran sampel tersebut telah dapat memberikan ragam yang telah stabil sebagai pendugaan ragam populasi.

Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dipakai formulasi dari Slovin (dalam Sevilla,1993:161) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \dots\dots (1)$$

Dimana,

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e² : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dalam hal ini batas ketelitian yang dipakai dalam menentukan jumlah sampel adalah 10%. Berdasarkan formulasi tersebut maka bila jumlah penduduk di 16 desa berdasarkan data tahun 2002 adalah 50.513 jiwa maka ukuran sampelnya adalah :

$$n = \frac{50.513}{1 + 50.513.(0,1)^2} \dots\dots (2)$$

$$n = 99,8 \approx 100$$

Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Untuk jumlah sampel pada masing-masing desa dapat dihitung berdasarkan teknik *proportional sampel* yang didasarkan pada prosentase jumlah penduduk di tiap-tiap desa. Sehingga jumlah masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I.2
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Sample	
			Umum	Pedagang
I	KARANGANYAR			
1	Karanganyar	4,705	6	2
2	Sidomulyo	1,525	3	1
3	Grenggeng	5,589	6	3
4	Pohkumbang	4,324	5	3
II	KUWARASAN			
5	Kuwarasan	1,981	4	1
6	Serut	1,650	3	1
7	Jatimulyo	1,701	3	1
8	Sawangan	2,373	3	2
9	Bendungan	2,151	3	2
10	Gunungmujil	3,728	5	2
11	Wonoyoso.	2,611	4	2
III	SEMPOR			
12	Kedungjati	2,682	4	2
13	Bejruyung	3,268	4	2
14	Pekuncen	2,527	4	2
15	Selokerto	5,166	7	2
16	Jatinegara	4,532	6	2
	Jumlah	50,513	70	30
	Jumlah Total		100	

Sumber : Data Sekunder diolah,2004

Dari ke enambelas desa tersebut, 2 (dua) desa tidak berbatasan dengan Kecamatan Gombang tetapi merupakan ibukota Kecamatan yaitu Desa Kuwarasan sebagai Ibukota Kecamatan (IKK) Kuwarasan dan Kelurahan Karanganyar sebagai IKK Karanganyar, sedangkan IKK Sempor terletak di Desa Jatinegara yang berbatasan dengan Kecamatan Gombang.

Berdasarkan jumlah sampel maka untuk teknis pelaksanaan dipakai sampling acak berstrata setiap desa minimal 4 orang yang terbagi atas pemilik warung/pedagang dan masyarakat umum.



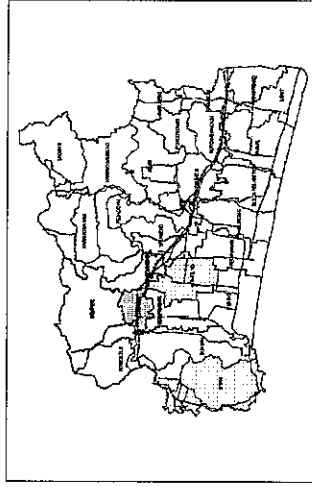
PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
 WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA
LOKASI PENELITIAN

KETERANGAN :

- Batas kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Desa

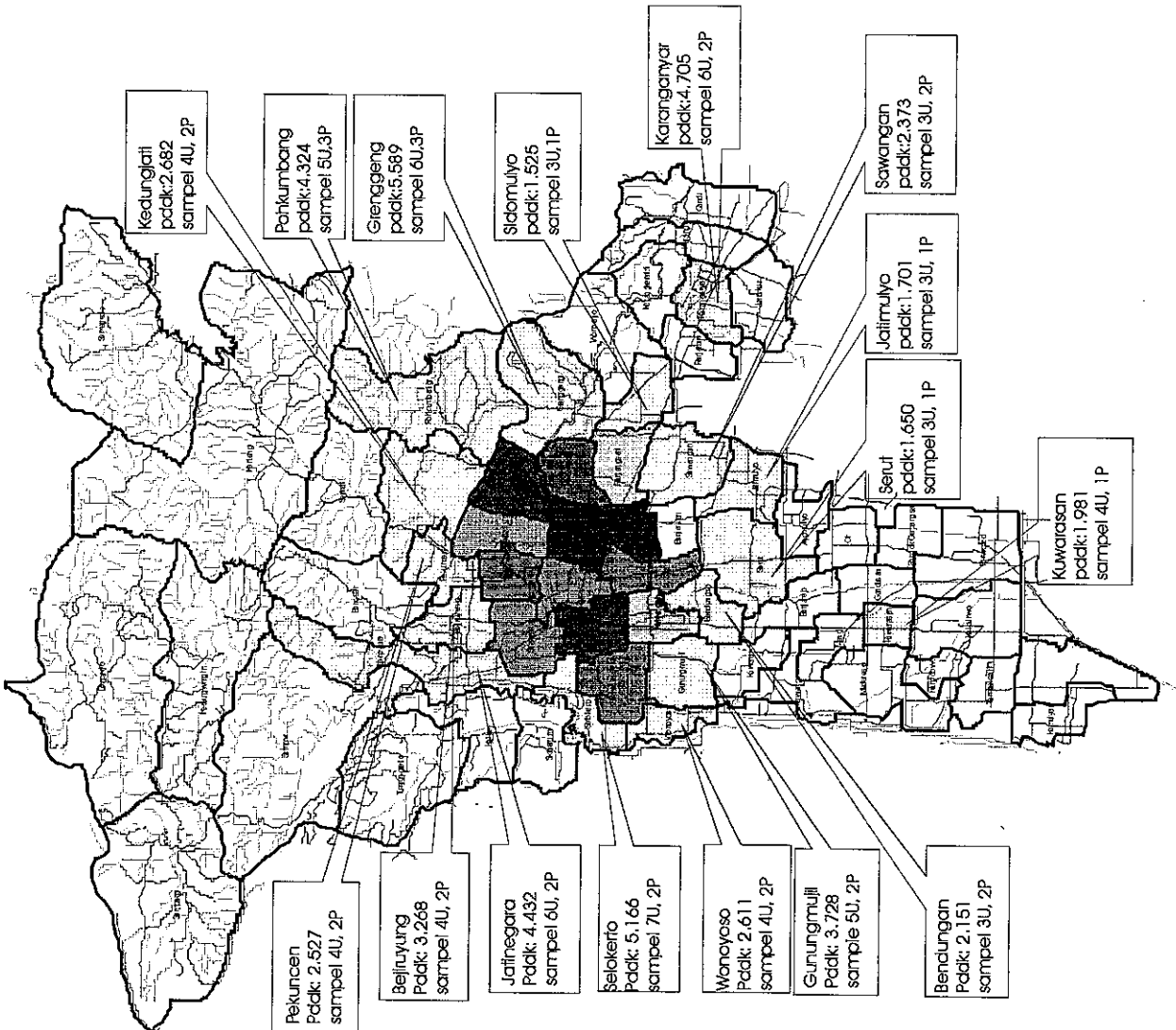


Nomor Gambar : 1.3
 Halaman : 19



SKALA 1 : 10.000

Sumber : Hasil Perhitungan Sampling



Besar jumlah responden dari kalangan pejabat pemerintah diambil secara *purposive sampling* Data primer berupa kebijakan umum Kabupaten Kebumen mengenai kondisi Kota Gombong , pelayanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pertumbuhan Kota Gombong diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah Kabupaten Kebumen yang dianggap dapat memberikan jawaban karena pengalaman, kesenioritasan dan pengetahuan mereka. Para aparat yang diwawancarai berasal dari pejabat di Bappeda Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Gombong.

1.7.4. Teknik Analisis

Kerangka analisis berdasarkan tujuan dari penelitian ini dan kerangka pemikiran pada I.5, merupakan urutan analisis serta kaitannya. Penelitian ini mengkaji peran Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen, adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan penelitian ini adalah :

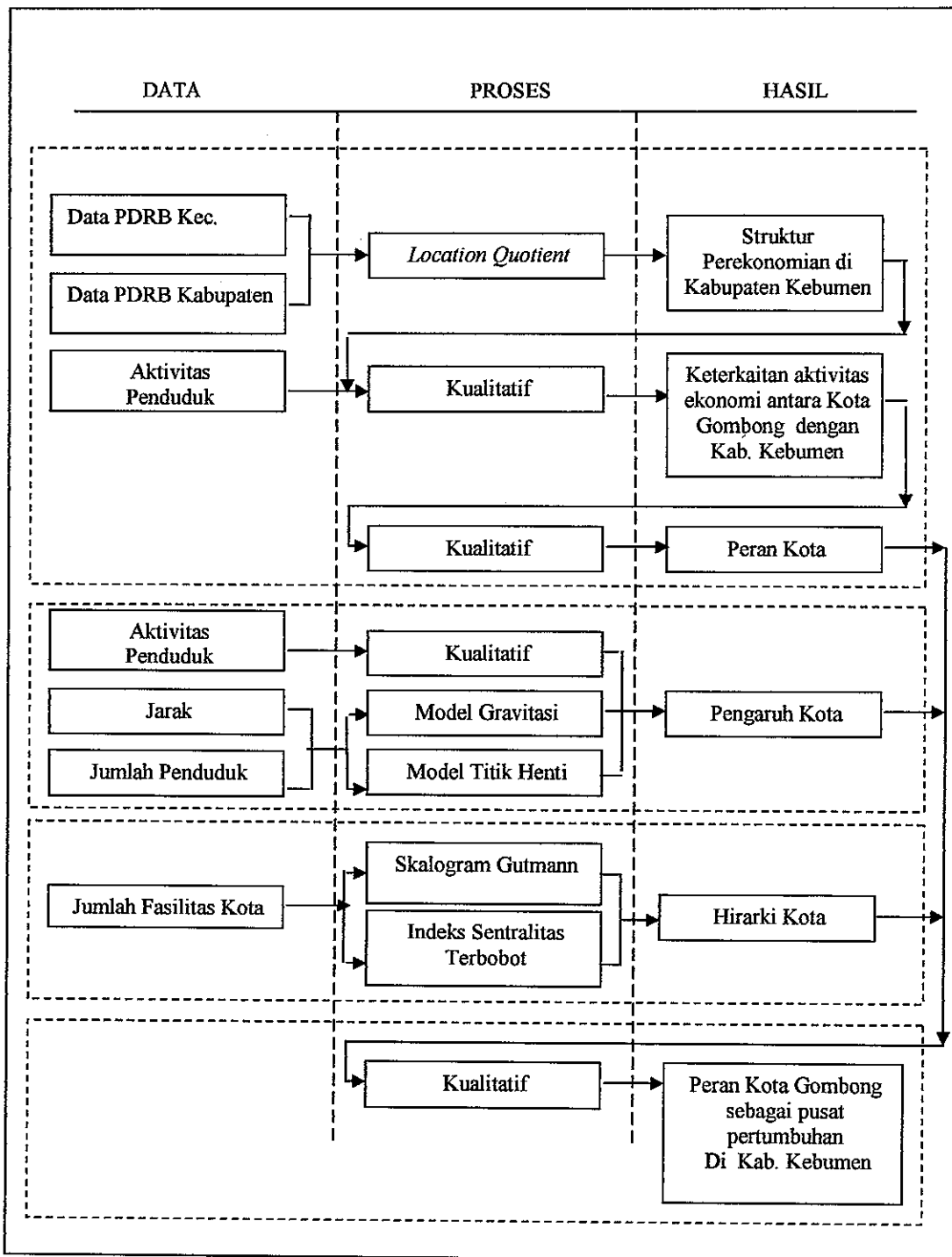
1. Mengidentifikasi peran Kota Gombong berdasarkan tipologi dan interaksi ekonomi
2. Mengidentifikasi besaran wilayah pengaruh Kota Gombong di Kabupaten Kebumen.
3. Mengidentifikasi hirarki kota di Kabupaten Kebumen
4. Menganalisis kedudukan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen.

Data yang dikumpulkan diproses sesuai dengan kerangka tersebut dan dikeluarkan hasil berupa output. Untuk melihat lebih jelas dari tujuan, sasaran penelitian akan dijabarkan lagi dan prosesnya urutannya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi peran Kota Gombong, identifikasi ini berdasarkan:

- a. analisis tipologi ekonomi wilayah dari perhitungan sektor basis antar kecamatan di Kabupaten Kebumen didapat aktivitas perekonomian di tiap kecamatan
 - b. analisis keterkaitan antar aktivitas ekonomi antara Kota Gombang dan Kabupaten Kebumen dengan membandingkan hasil perbandingan sektor basis di tiap kecamatan dan hasil survei primer
2. Mengidentifikasi besaran wilayah pengaruh Kota Gombang di Kabupaten Kebumen, menggunakan metode titik henti dan gravitasi
 3. Identifikasi sistem hirarki kota-kota di wilayah Kabupaten Kebumen, dengan melihat kelengkapan fasilitas kota di Kabupaten Kebumen sehingga didapat kota-kota sebagai pusat pelayanan dengan orde hirarki I, II, III dan IV.
 4. Peranan dan kedudukan Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen, didapat dari kajian hasil keterkaitan identifikasi peran kota, wilayah pengaruh dan hirarki kota. Analisis ini juga akan memperhitungkan preferensi masyarakat di wilayah penelitian dan pejabat di wilayah Kabupaten Kebumen.

Untuk memperjelas urutan analisis tersebut dapat dilihat kerangka alur pikir proses analisis data pada Gambar 1.4.



GAMBAR 1.4
ALUR PIKIR PROSES ANALISIS DATA

Berdasarkan pendekatan analisis, teknik analisis yang sesuai dipakai penelitian ini, yaitu dengan gabungan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk data sekunder, dilakukan teknik kuantitatif dengan alat analisis (1) LQ, (2) gravitasi, (3) titik henti, (4) Skalogram Guttman dan (5) Indeks Sentralitas Terbobot dan data primer dengan metoda kualitatif, alat analisis ini dipergunakan untuk:

1. Analisis tipologi ekonomi wilayah

Tipologi ekonomi wilayah didekati dengan menggunakan sektor basis suatu wilayah yaitu dengan analisis *Location Quotient (LQ)*. Teknik Analisis *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan di suatu daerah pada sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau sektor *leading*. *Location Quotient (LQ)* banyak digunakan sebagai alat yang sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu.

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung koefisien LQ dapat berupa satuan jumlah buruh, hasil produksi, atau satuan lainnya. Formula untuk perhitungan *Location Quotient (LQ)* tersebut adalah sebagai berikut (Warpani, 1984: 68):

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N} \quad \dots\dots(3)$$

Dimana :

S_i = Jumlah buruh sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki

N_i = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Untuk penelitian ini, formula tersebut menggunakan sektor-sektor dalam PDRB sehingga data yang dapat digunakan untuk menghitung *Location Quotient (LQ)* tersebut adalah data sektor-sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jenis data yang digunakan adalah data PDRB wilayah penelitian serta data PDRB wilayah acuan tempat dimana daerah yang dihitung tersebut berada. Sehingga formula tersebut adalah :

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_i / N} \dots\dots(4)$$

Dimana :

S_i = PDRB sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kota Gombong

S = Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kota Gombong

N_i = Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya, dimana dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

N = Jumlah PDRB di daerah acuan yang lebih luas, dimana dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

Dari hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) tersebut ada tiga kemungkinan hasil yang di dapat, yaitu ;

- $LQ > 1$, disebut sektor basis, menyatakan Kota Gombong memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dari tingkat Kabupaten Kebumen.
- $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, menyatakan Kota Gombong tidak memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut (kecenderungan impor) dan tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat Kabupaten Kebumen.
- $LQ = 1$, menyatakan Kota Gombong mencukupi dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan Kabupaten Kebumen

Keunggulan dari analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. *Location Quotien* (LQ) dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan analisis lainnya. Sedangkan kelemahan dari analisis ini adalah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan mengakibatkan hasil perhitungan menjadi bias. Hal ini disebabkan karena adanya disagregasi PDRB Sektor i daerah hitung, pemilihan total PDRB baik wilayah acuan maupun daerah hitung, pemilihan entity yang diperbandingkan serta pemilihan tahun dan kualitas data.

2. Analisis Wilayah Pengaruh

Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengukur luasan pengaruh wilayah. Besarnya daya tarik suatu kota dapat menggambarkan besarnya potensi dan pengaruh kota tersebut, semakin besar daya tarik kotanya maka kota tersebut mempunyai kedudukan dan peranan yang semakin tinggi terhadap kota-kota

lainnya. Untuk menentukan interaksi antar kota, analisis yang dipergunakan adalah model gravitasi dan model titik henti.

Model *gravitasi* bertujuan untuk mengetahui hubungan kedekatan antara wilayah satu dengan wilayah ke dua, dalam hal ini daerah dianggap sebagai suatu massa yang mempunyai daya tarik menarik, sehingga akan muncul hubungan saling mempengaruhi antara kedua daerah. Dari model ini akan diketahui hubungan interpendensi antar pusat dengan daerah sekitarnya.

Formulasi rumus (Bintarto, 1982, 80) :

$$I_{1.2} = a \frac{P_1 \cdot P_2}{J_{1.2}^b} \dots\dots(5)$$

$I_{1.2}$ = Interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2

P_1 = Jumlah penduduk wilayah 1

P_2 = Jumlah penduduk wilayah 2

$J_{1.2}^b$ = Jarak antara wilayah 1 dan 2

a = Konstante empirik yang besarnya 1

b = Konstante empirik yang besarnya 2

Kelemahan utama model gravitasi ialah mengabaikan heterogenitas penduduk masing-masing kota yang diteliti. Pada kenyataannya, karakteristik penduduk suatu kota selalu berbeda dalam berbagai hal, seperti struktur umur penduduk, struktur mata pencaharian, dan kebiasaan penduduknya. Penggunaan rumus ini mengasumsikan bahwa:

1. seluruh daerah merupakan dataran yang isotop, artinya homogen dalam hal topografi, iklim dan perkembangan ekonominya,

2. kedua kota tersebut sama –sama mudah dicapai oleh penduduk masing-masing kota, atau dengan kata lain kedua kota memiliki tingkat kemudahan pencapaian yang sama,
3. faktor jarak merupakan faktor penentu besarnya biaya untuk berpindahnya orang, barang dan informasi, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain seperti waktu perjalanan dan jenis sarana transportasi yang digunakan.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut maka model gravitasi tidak dapat menggambarkan besarnya interaksi yang nyata tetapi hanya mengindikasikan besarnya interaksi tersebut (Warpani,1984 :114, Daldjoeni 1997:204)

Penerapan model titik henti bertujuan untuk mencari batas wilayah pengaruh masing-masing kota. Pada prinsipnya jumlah suatu kota dibelah menjadi dua untuk mencari jangkauan pelayanan yang maksimal. antara dua kota, misalnya kota j dan kota i, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Isard, 1976):

$$d_{ij} = \frac{d_{ij}}{1 + \sqrt{(P_j / P_i)}} \dots(6)$$

Keterangan :

dkj = jangkauan wilayah pengaruh dari Kota Gombong

dij = jarak antara Kota Kebumen dan Kota Gombong

Pi = jumlah penduduk Kota Gombong

Pj = jumlah penduduk Kota Kebumen

Kelemahan-kelemahan model ini serupa dengan model gravitasi yaitu mengabaikan heterogenitas karakteristik penduduk dan hanya mempergunakan

faktor jarak sebagai penentu batas wilayah pengaruh kotanya. Padahal batas-batas tersebut dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti morfologi permukaan bumi, lokasi dan rute transportasi serta perbatasan secara politis (Bintarto,1989:89-91;Daldjoeni 1997:208-210). Dengan demikian hasil yang diperoleh dari penerapan rumus ini masih bersifat indikatif belaka.

3. Menentukan Hirarki kota

Teknik analisis yang dipakai untuk menentukan hirarki kota ada 2 (dua) yaitu Skalogram Guttman, dan Indeks Sentralitas Terbobot. Penggunaan kedua teknik ini dengan pertimbangan bahwa terdapat pendekatan yang berbeda, sehingga hasil akhirnya dapat diperbandingkan. Persamaannya adalah menghasilkan hirarki kota serta sebaran fasilitas pelayanan kotanya. Skalogram Guttman menggunakan pendekatan terhadap kelengkapan jenis fasilitas pelayanan kota. Hasil akhir yang diperoleh berupa peringkat kota-kota menurut kelengkapan fasilitasnya. Skalogram merupakan pendekatan yang didasarkan atas kelengkapan jenis fasilitas pelayanan kota. Metoda ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas.

Fasilitas yang akan dipergunakan sebagai variabel, dipilih dari beberapa jenis fasilitas dengan kriteria (Rondinelli,1985) :

- a. Mencirikan fasilitas perkotaan (*urban*)
- b. Berskala luas (dalam arti bisa dipergunakan oleh wilayah yang lebih luas daripada kotanya sendiri)
- c. Berfungsi secara sosial maupun ekonomi
- d. Obyeknya tunggal dan terukur
- e. Memiliki karakteristik yang berjenjang atau hirarkis

Berdasarkan kriteria umum tersebut dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Kebumen, maka untuk analisis Skalogam ini digunakan 38 jenis fungsi pelayanan, yaitu :

1. Fasilitas Pemerintahan

- Kompleks Kantor Pemerintah Daerah

2. Fasilitas Lembaga Keuangan

- Bank Umum
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Kredit Kecamatan (BKK)

3. Fasilitas Ekonomi

- Pasar Permanen
- Pasar Non permanen
- Pasar Hewan
- Rumah Potong Hewan (RPH)
- Supermarket
- Koperasi Unit Desa
- Industri
- Hotel

4. Fasilitas Pendidikan

- Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iah (MI)
- SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- SMU
- Madrasah Aliyah
- SMK Ekonomi
- SMK Teknik

- Perguruan Tinggi

5. Fasilitas Kesehatan

- Rumah Sakit (RS)
- Rumah Bersalin
- Balai Pengobatan/Balai Kesehatan
- Puskesmas Rawat Inap
- Puskesmas
- Puskesmas Pembantu
- Praktek Dokter
- Praktek Bidan/Perawat
- Apotik
- Toko Obat
- Posyandu

6. Fasilitas Transportasi Komunikasi

- Terminal
- Stasiun KA
- Kantor Pos
- Angkutan Umum Penumpang
- Truk

7. Fasilitas Ibadat

- Mesjid
- Musholla/langgar
- Gereja
- Wihara

Metode Skalogram Guttman dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut (Rondinelli, 1985:115):

1. membuat urutan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel kerja.
2. membuat urutan fasilitas berdasarkan pada frekuensi.
3. menggambarkan baris dan kolom sehingga membentuk matriks berdasarkan fasilitas dan kota.
4. memberikan tanda (1) pada keberadaan suatu fasilitas dan (0) untuk ketidakberadaan suatu fasilitas.
5. menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas suatu kota dan jumlah fasilitas yang ada pada setiap kota.
6. menyusun hierarki kota berdasarkan peringkat kelengkapan fasilitas.

Setelah langkah-langkah tersebut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kelayakan penggunaan analisis skalogram ini, yaitu dengan menghitung nilai Kr (*Koefisien Reprodusibilitas*) yang menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukur dengan rumus (Rondinelli, 1985) :

$$Kr = 1 - \frac{\sum e}{N.K} \quad \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan :

Kr = Koefisien Reprodusibilitas

e = Jumlah kesalahan (*error*)

N = Jumlah observasi

K = Jumlah kesalahan yang diharapkan

Nilai Kr yang layak adalah > dari 0,9.

Analisis kedua ialah Indeks Sentralitas Terbobot (Rondinelli 1985:125). Metode ini memanfaatkan Skalogram Guttman dan mempergunakan pendekatan terhadap bobot masing-masing jenis fasilitas. Penggunaan Skalogram Guttman sedikit dimodifikasi yaitu dengan mencantumkan besarnya jumlah fasilitas pada setiap jenis fasilitas. Hasil akhirnya berupa peringkat kota yang berurutan dari kota dengan indeks sentralitas total terbesar hingga terkecil.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan thesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

- ◆ **Bab I. Pendahuluan**, berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, pendekatan dan metodologi penelitian dan sistematika penulisan
- ◆ **Bab II. Kajian Pusat Pertumbuhan** , menjelaskan landasan teori-teori yang terkait dengan konsep pembahasan dalam mengkaji materi, meliputi peran dan sistem kota, wilayah dan pengembangan wilayah, peran kota dalam pengembangan wilayah, serta kesimpulan kajian teori.
- ◆ **Bab III. Karakteristik Wilayah Kabupaten Kebumen dan Kota Gombong**, berisikan gambaran wilayah di Kabupaten Kebumen dan Kota Gombong. Dalam bab ini diperlihatkan data-data sebagai pendukung analisis yang diambil dari hasil survei lapangan berupa data penduduk, perekonomian, sarana dan prasarana (fasilitas), dan data lainnya yang diperlukan.
- ◆ **Bab IV. Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Kebumen**, berisikan berisikan analisis hasil pengolahan data. Pengolahan data yang dipakai adalah hasil analisis peran Kota Gombong, wilayah pengaruh Kota Gombong,

analisis sistem kota dan analisis Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Kebumen.

- ◆ **Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi**, berisikan kesimpulan hasil analisis dan saran-saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil analisis berupa masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PERAN PUSAT PERTUMBUHAN

2.1. Peran dan Sistem Kota

2.1.1. Fungsi kota

Fungsi kota merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kajian teori peran kota dalam pengembangan wilayah. Hal tersebut berkait bahwa keberadaan suatu kota tergantung dari peran dan fungsi yang disandang. Menurut Prabatmodjo (PWK Okt 1993:20), nilai kepentingan kota tersebut terutama terletak pada fungsi yang dimiliki, bukan pada jumlah penduduk

Fungsi utama kota dapat pula digunakan untuk membuat klasifikasi suatu kota seperti menurut Bintarto (1989:38), kota mempunyai fungsi sebagai:

- a. Kota pusat produksi, biasanya terletak dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil bumi atau hasil tambang, sehingga dapat terjadi dua macam kota, yaitu kota-kota sebagai penghasil bahan mentah dan kota-kota yang mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang-barang jadi. Di daerah ini dapat timbul daerah dengan kota-kota industri, dimana pusat-pusat kota tersebut dihubungkan dengan jalur transportasi antara kota dengan kota dan antara kota dengan daerah belakangnya.
- b. Kota pusat perdagangan, sebenarnya merupakan sifat umum kota tapi tidak semua kota didominasi oleh kegiatan perdagangan. Ada yang hanya merupakan penyalur kebutuhan sehari-hari warga kota, ada yang merupakan perantara bagi perdagangan nasional ataupun internasional yang sering disebut *entreport*.
- c. Kota pusat pemerintahan, banyak ditemukan sebelum revolusi industri.

- d. Kota pusat budaya, selain dikenal sebagai kota yang memiliki seni dan budaya, beberapa kota di Indonesia menjadi tempat rekreasi dan pusat pariwisata dan ada kota pendidikan yang memiliki banyak perguruan tinggi seperti Yogyakarta.

Fungsi suatu kota di Amerika Serikat oleh Harris digunakan untuk mengelompokkan kota sebagai berikut : (a) kota industri M', dimana 74 % penduduknya bernaikah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (b) kota industri M, dimana 60 % penduduk bernaikah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (c) kota pusat pengeceran, dimana 50 % penduduk bernaikah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (d) kota perdagangan besar, dimana sejumlah besar penduduk menjadi pedagang besar; (e) kota perangkutan, dimana lebih dari 11% penduduk bernaikah di bidang perangkutan; (f) kota campuran (diversifikasi), dimana tidak menampakkan suatu fungsi dengan jelas; (g) kota pertambangan, lebih dari 15% penduduk bernaikah di bidang pertambangan; (h) kota universitas, dimana sebagian besar penduduk berkecimpung dalam bidang perguruan tinggi; (i) kota peristirahatan dimana sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang jasa tertentu. Seperti rekreasi, perhotelan dsb; (j) kota politik, dimana sebagian besar penduduk bekerja di bidang pemerintahan (Jayadinata, 1999:128-129).

Menurut Branch (1995:37-43), unsur terpenting yang mempengaruhi perkembangan kota adalah situasi dan kondisi setempat, antara lain adalah fungsi suatu kota, merupakan unsur dasar utama yang mempengaruhi setiap aspek dari berfungsi dan berkembangnya kota. Menurut Branch fungsi kota adalah sebagai pusat kegiatan intelektual, kebudayaan dan perdagangan (Branch,1995;7).

Hirarki suatu kota menurut Rondinelli (1983) juga mempengaruhi fungsi suatu kota. Kota-kota menengah dan kecil yang termasuk kota kedua (orde 2) mempunyai fungsi yang dapat digolongkan menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu :

1. Pusat Pelayanan Umum dan Sosial

Sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, kota kedua memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Fasilitas atau sarana perkotaan tersebut meliputi fasilitas-fasilitas yang memenuhi syarat minimum penduduk ambang yang dipunyai kota kedua, yaitu sekitar 100.000 jiwa atau setingkat kecamatan. Menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, hal tersebut merupakan potensi daerah yang merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari:

- Lembaga keuangan;
- Sarana ekonomi;
- Sarana pendidikan;
- Sarana kesehatan;
- Sarana transportasi dan komunikasi;
- Sarana pariwisata;
- Ketenagakerjaan.

2. Pusat komersial dan pelayanan jasa

Sektor komersial dan jasa merupakan sumber yang penting bagi pendapatan daerah setempat dan lapangan pekerjaan penduduk daerah perkotaan. Sektor komersial

dan jasa biasa disebut sektor tersier, dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu sektor formal dan informal.

3. Pusat pemasaran dan perdagangan regional

Peran kota kedua yang sangat kuat dalam penyediaan jasa dan mendukung kegiatan-kegiatan komersial memberikan dampak terhadap daerah sekitarnya.

Kota-kota kedua kemudian bertindak sebagai pusat pemasaran dan perdagangan bagi daerah sekitarnya. Kota kedua di satu sisi menjadi saluran untuk penjualan, distribusi dan perdagangan bagi produk-produk perdesaan dan disisi lain juga bertindak sebagai saluran distribusi bagi barang-barang produk perkotaan menuju daerah perdesaan. Kota kedua merupakan pusat regional yang mempertemukan antara produsen dan konsumen dari daerah perkotaan dan perdesaan, merupakan tempat penjualan produk-produk pertanian dan sumber-sumber lainnya, seperti kerajinan rakyat untuk daerah perkotaan baik untuk diolah maupun dikonsumsi langsung penduduknya.

Sementara itu bagi daerah perkotaan, kota kedua merupakan tempat pasar yang paling tepat untuk menjual produk industri dan jasa kepada kota-kota dan daerah-daerah dibelakangnya atau biasa disebut sebagai perdagangan ke dalam wilayah. Jadi kota kedua memegang peranan sangat penting dalam mempertemukan kepentingan ekonomi antara kota dan desa .

4. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian

Walaupun penduduk kota kedua yang bekerja dibidang pertanian secara langsung jumlahnya relatif sedikit namun proporsi penduduk yang berkecimpung di bidang pengolahan, distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian mempunyai persentase paling besar dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Perekonomian

kota kedua sangat bergantung pada daerah belakangnya karena produk-produk daerah tersebut merupakan bahan dasar untuk keperluan industrinya. Produk-produk tersebut tidak hanya berupa produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan. Produk-produk daerah belakang semacam ini sangat mendukung terciptanya industri kecil di kota-kota kedua. Struktur perekonomian kota kedua sangat tergantung pada hidup matinya industri kecil ini, sehingga kota kedua dapat juga berfungsi sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis (Rondinelli, 1983).

5. Pusat Industri kecil

Perekonomian kota kedua sangat bergantung pada industri kecil atau dengan kata lain industri kecil sangat dominan terhadap pendapatan daerah setempat. Meskipun tenaga kerja di sektor industri kecil ini sangat banyak namun sumbangannya terhadap total industri nasional masih sangat kecil (Rondinelli, 1983). Namun demikian, dengan terkonsentrasinya industri kecil pada kota kedua, memberikan keuntungan bagi pemasaran regional secara efektif dan efisien karena keberadaan industri tersebut dapat mendukung berkembangnya industri menengah dan besar, yang banyak terdapat di kota-kota besar atau metropolitan. Sementara itu di sisi lain industrialisasi di kota kedua juga berdampak pada perluasan kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian semakin berkurang.

6. Pusat Transportasi dan Komunikasi Regional

Sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor yang sangat penting bagi pembangunan kota kedua untuk mendukung peranannya sebagai pusat pemasaran dan perdagangan regional. Sektor ini membentuk struktur internal perkotaan yang memungkinkan terjadinya mobilitas pergerakan arus manusia, barang dan jasa. Berbagai kegiatan penduduk sangat bergantung pada ada tidaknya sektor

transportasi dan komunikasi. Terlebih lagi dengan kedudukan kota kedua sebagai jembatan penghubung antara kota-kota terbesar atau metropolitan dengan daerah belakangnya, maka peranan sektor ini sangat penting bagi terpeliharanya fungsi kota kedua dalam wilayah (Rondinelli, 1983)

7. Pusat penarik migrasi dari perdesaan dan sumber-sumber pendapatan bagi daerah perdesaan.

Kebanyakan arus migrasi penduduk dari daerah perdesaan berlangsung menuju kota-kota besar. Kelengkapan fasilitas dan upah yang lebih tinggi dari desa merupakan daya tarik kota. Keberadaan kota kedua yang berada di tengah-tengah kota-kota besar dan desa-desa, diharapkan dapat berfungsi dalam menyerap arus migrasi tersebut. Ketersediaan berbagai fasilitas umum dan sosial serta kesempatan kerja di bidang agroindustri dan agrobisnis, menawarkan peluang yang lebih baik kepada para migran yang kurang terampil dan kurang pendidikan serta memiliki kultur pertanian yang sangat kuat. Kota kedua diharapkan dapat berfungsi sebagai filter bagi masuknya pendatang yang belum siap terserap dalam lapangan pekerjaan di kota-kota besar. Setelah kehadiran kaum migrasi yang tidak dapat langsung terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia, hanya akan menambah jumlah pengangguran di perkotaan dan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kota kecil dan menengah juga merupakan sumber bagi pembangunan daerah perdesaan. Kaum migran yang bekerja baik sebagai pendatang musiman atau penglajo (*commuter*), mempunyai kebiasaan selalu kembali ke daerah asalnya pada setiap akhir pekan atau pada saat-saat libur. Pada umumnya mereka membawa serta penghasilan selama sekian lama bekerja di kota sebagai bukti keberhasilan mereka

mendapat pekerjaan yang layak. Sementara itu penduduk yang lain yang tidak sempat pulang ke desanya seringkali mengirimkan uang atau barang untuk sanak keluarganya di desa. Kebiasaan-kebiasaan semacam inilah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah belakangnya. (Rondinelli, 1983)

8. Pusat Transformasi Sosial

Sebagai dampak dari fungsi perdagangan dan transportasi regional, kota-kota kedua berfungsi sebagai pusat transformasi sosial. Kota kedua merupakan tempat transisi antara kehidupan perdesaan dan perkotaan. Di dalam kota kedua terdapat heterogenitas sosial yang mencakup perbedaan suku, agama dan adat kebiasaan. Percampuran antara masyarakat desa dan kota mengakibatkan terbentuknya masyarakat perkotaan yang tetap mewarisi nilai-nilai tradisional. Perubahan gaya hidup terlihat jelas pada masyarakat kota kedua sebab mereka sedang dalam masa pergesean dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Namun karena latar belakang masyarakatnya mewarisi tradisi pertanian yang kuat, maka ciri-ciri perdesaan masih melekat pada kultur masyarakat kedua (Rondinelli, 1983)

2.1.2. Teori Tempat Pusat

Menurut Richardson (2001:83), teori tempat pusat menyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya, menyuplai dengan barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintah kota.

Ketersediaan jasa tersebut membentuk suatu susunan yang menaik tergantung ambang permintaan dan lingkup permintaan, kedua faktor tersebut menentukan besar dan banyaknya tempat sentral mensuplai jasa sehingga menimbulkan suatu hirarki.

Teori tempat pusat (Daljoeni 1997: 101-132, Daldjoeni 1998:153-159, Djojodipuro 1992:134:140, Sumaatmadja 1988: 121-129, King:1984) merupakan suatu teori yang secara lengkap membahas susunan *urban centre*. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain adalah Christaller dan August Losch. Masing-masing ahli mempunyai pendapat mengenai tempat pusat ini yang secara umum didasari oleh adanya pandangan rasional yang dimiliki oleh manusia. Rasionalisasi ini berupa keinginan manusia untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain dari itu teori tempat pusat juga memperhatikan tentang penyebaran pemukiman, desa dan kota yang mempunyai perbedaan dalam ukuran. Dengan dasar demikian terbentuk pusat-pusat wilayah yang berfungsi sebagai suatu pusat pelayanan bagi daerah-daerah disekitarnya, yang disebut sebagai daerah komplementer, dengan membentuk suatu hirarki (Daldjoeni, 1992).

Teori ini mengemukakan model yang jelas untuk menjelaskan pertumbuhan hirarki kota, dan juga sebagai suatu hasil sampingan yang menekankan interdependensi antara pusat-pusat kota dan daerah-daerah sekitarnya. (Richardson,2001 :85)

Pusat-pusat ini terbentuk karena sentralitas tempat yang bersangkutan, bukan karena lokasinya yang berada di pusat. Sentralisasi tempat pusat ditentukan oleh pekerjaan sentral, barang-barang sentral dan pelayanan-pelayanan sentral. Dalam pengertian ini tempat sentral merupakan tempat yang bukan saja sentral secara lokasi namun juga memberikan kemungkinan timbulnya bentuk partisipasi penduduk secara maksimal, sebagai pelaku pelayanan maupun sebagai konsumen dari pelayanan-pelayanan yang

tersedia. Tempat-tempat yang disebut sebagai pusat ini diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik heksagonal, yang masing-masing simpul tersebut mempunyai daerah pengaruh sehingga membentuk hirarki jaringan.

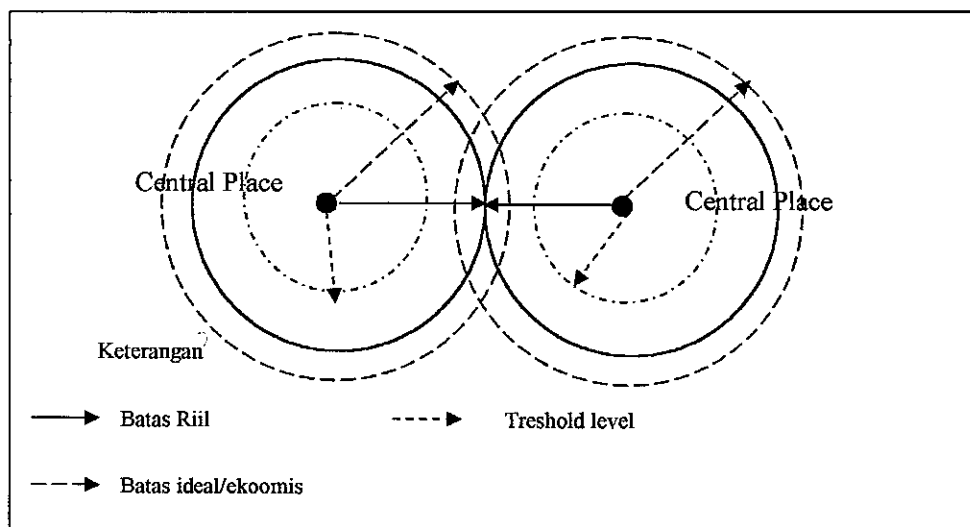
Christaller membayangkan suatu wilayah (*region*) sebagai suatu dataran yang homogen secara geografis dengan penduduk yang merata persebarannya yang mempunyai berbagai kebutuhan. Semua kebutuhan memiliki dua hal yaitu *range* dan *threshold*. *Range* adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya dan *threshold* adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang.

Menurut Dieleman dalam Daljoeni (1997), terdapat lima asumsi yang diajukan Christaller yaitu :

- (a). Karena para konsumen yang menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, sangat penting.
- (b). Karena konsumen yang menanggung ongkos angkutan, maka jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
- (c). Semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ke tempat pusat yang paling dekat letaknya.
- (d). Kota-kota berfungsi sebagai *central place* bagi wilayah sekitarnya. Artinya ada hubungan antara besarnya tempat pusat dan luasnya wilayah pasaran, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.
- (e). Wilayah tersebut digagas sebagai dataran di mana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama (penghasilan sama).

Menurut Christaller, suatu tempat yang sentral memiliki batas-batas pengaruh yang merupakan lingkaran yang komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Menurut Hagget dalam Sumaatmadja (1988), daerah atau wilayah yang komplementer ini (*complementary regions*) adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral.

Kariel dan Kariel dalam Sumaatmadja (1988), lingkaran batas yang ada ada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu dapat dibedakan menjadi batas ambang atau batas bawah (*threshold level, lower limit*), batas riil (*real limits*) dan batas ideal (*ideal limits*). Jarak maksimum yang ada dibawah pengaruh tempat sentral disebut batas ideal atau batas ekonomi. Batas riil adalah jarak secara aktual atau secara nyata dijalani orang atau penduduk untuk mendapatkan barang kebutuhan. Sedangkan batas ambang atau batas bawah adalah jari-jari lingkaran yang mengurung populasi ambang. Sedangkan yang dimaksud dengan populasi ambang adalah jumlah minimum orang yang diperlukan untuk menunjang suatu individu atau kemampuan individu atau kemantapan penawaran suatu jenis barang tertentu.

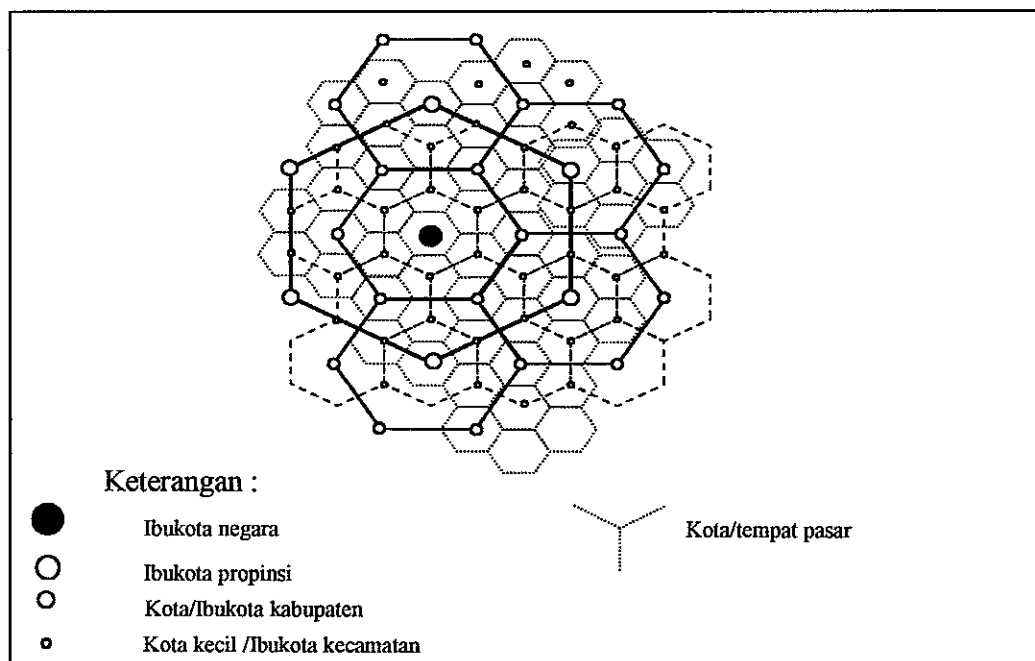


GAMBAR 2.1.
TEMPAT SENTRAL DAN BATASNYA

Sumber : Sumaatmadja:1988

Tempat-tempat sentral yang bertetangga terdekat (*nearest neighbour*), akan memiliki kawasan yang bertampalan, dengan demikian batas-batas pengaruh tiap tempat sentral itu akan berbentuk heksagonal.

Sesuai dengan asumsi Christaller yang menyatakan bahwa orang akan mencari barang kebutuhannya ke tempat yang terdekat dari tempat tinggalnya, maka orang yang bertempat tinggal di tampalan (*overlapping*), akan pergi ke tempat sentral terdekat. Dengan demikian, bentuk hierarki tempat-tempat sentral yang berbeda-beda pengaruhnya terdapat tetangga terdekat (*nearest neighbour*), dapat diabstraksikan



GAMBAR 2.2.
HIRARKI TEMPAT SENTRAL YANG KAWASAN DAYA PENGARUHNYA
BERBEDA-BEDA

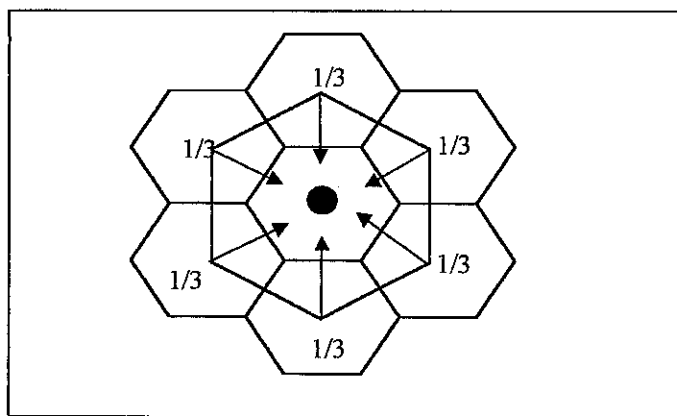
Sumber : Sumaatmadja:1988

Teori Tempat Sentral selain dapat digunakan untuk menganalisa pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi yang sudah ada terhadap daerah sekitarnya, dapat pula digunakan untuk suatu lokasi kegiatan (Sumaatmadja 1988:126). Pada dasarnya, hirarki

tempat sentral dengan wilayah komplementernya, dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

(a). *Market Optimising Principle*

Diasumsikan bahwa struktur dari permukiman-permukiman kota akan mempengaruhi para konsumen dalam arti, mereka ingin sedekat mungkin dengan setiap level dari hirarki (Daljoeni 1998:155). Tempat sentral ini berhirarki $K=3$, mempunyai pengaruh $1/3$ bagian dari tetangga terdekat. Karena secara heksagonal tempat sentral tersebut bersinggungan dengan enam tetangga terdekat, hirarkinya menjadi $6 \times 1/3$ ditambah 1 (kawasannya sendiri), maka $K=2+1=3$. Hirarki $K = 3$ merupakan kesatuan antara tempat sentral yang bersangkutan dengan region komplementernya, merupakan prinsip pasar yang optimum (*market optimising principle*) yang merupakan kawasan penyebaran dan penyediaan barang-barang dari tempat sentral ke tempat penyaluran barang (Sumaatmadja 1988:128). Tetapi pola yang tercipta tidak efisien bagi jaringan transportasi, karena rute-rute yang menghubungkan dengan pusat-pusat tingkat atas tidak melewati pusat-pusat tingkat bawah.

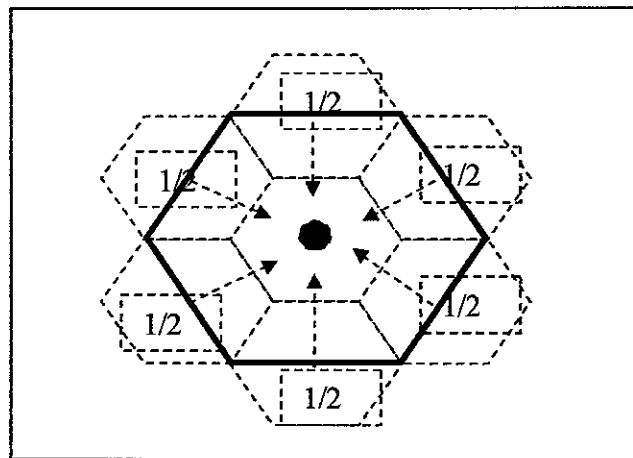


GAMBAR 2.3.
MARKET OPTIMISING PRINCIPLE $K=3$

Sumber : Sumaatmadja:1988

(b). *Traffic Optimising Principle*

Tempat sentral ini berhirarki $K = 4$, mempunyai pengaruh $\frac{1}{2}$ bagian dari tetangga terdekat. Hirarkinya dapat dihitung sebagai $6 \times \frac{1}{2}$ ditambah 1 (kawasannya sendiri), dengan demikian $K=3+1=4$, Pada hirarki ini, tempat yang sentral dengan kawasan komplemeternya memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang efisien, sehingga merupakan lalu lintas yang optimum (*traffic optimum principle*) (Sumaatmadja 1988:128). Pada hirarki ini, jaringannya lebih efisien, karena rute-rute yang menghubungkan dengan pusat-pusat tingkat atas, melalui tempat-tempat tingkat bawah (Daldjoeni 1998:155)



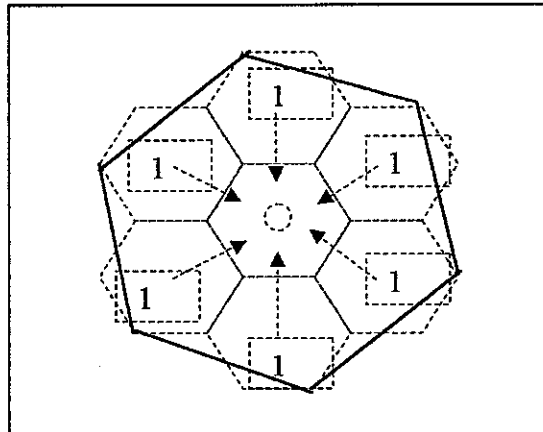
GAMBAR 2.4.
TRAFFIC OPTIMISING PRINCIPLE

Sumber : Sumaatmadja:1988

(c). *Administration Optimizing Principle*

Pada prinsip ini berhirarki $K=7$, merupakan perpaduan antara enam kawasan komplementer dengan tempat sentral yang bersangkutan. Jadi hirarkinya merupakan penjumlahan $6 \times 1 + 1 = 7$, hirarki ini merupakan prinsip administrasi yang optimum, pola permukiman tersusun sedemikian rupa sehingga setiap tempat bertingkat bawah terdapat di dalam batas-batas wilayah dari tempat pusat dari tingkat atas. Tempat-tempat pusat tingkat

bawah tidaklah mungkin diluar batas tempat pusat tingkat atas, karena menyulitkan tata kerja pemerintahan di daerah (Daldjoeni 1998:158).



GAMBAR 2.5.
ADMINISTRATION OPTIMIZING PRINCIPLE

Sumber : Sumaatmadja:1988

Tempat sentral besar seringkali merupakan tempat titik pertumbuhan inti di daerahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah (Richardson:85).

2.1.3. Sistem Perkotaan

Fungsi dan peran suatu kota tidak dapat berdiri sendiri, antar kota terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dengan perbedaan fungsi dan peran serta ukuran suatu kota akan membentuk suatu jaringan kota. Akibat pertumbuhan dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya urbanisasi yang berakibat akan membentuk hubungan hirarki yang biasanya diejawantahkan dalam bentuk sebaran kota-kota (*city size distribution*) (Carol A Smith: 1990 dalam PWK Okt 1993:9).

Sistem perkotaan dalam arti sempit adalah himpunan kota-kota dalam suatu wilayah regional maupun nasional yang saling bergantung satu sama lain. Sistem tersebut secara sederhana berupa agregat kota-kota. Dalam arti luas sistem perkotaan adalah

simpul-simpul perkotaan yang merupakan konsentrasi keruangan penduduk dan kegiatan-kegiatan dalam wilayah regional maupun nasional, dan diantara simpul-simpul tersebut terdapat hubungan baik antara simpul dengan simpul maupun antara simpul dengan daerah sekitarnya.

Konsep sistem perkotaan mencakup totalitas kegiatan secara nasional dengan memperhatikan tingkat hubungan antar wilayah dan berbagai pertumbuhan dan perubahan keruangan dalam sistem. Konsep sistem perkotaan berkaitan erat dengan perumusan kebijakan urbanisasi sosial dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang seimbang, kesamarataan wilayah dan distribusi penduduk secara terarah, yang memerlukan strategi pertumbuhan perkotaan secara nasional (Simmons,1978:8-10,6)

Simmon menjelaskan bahwa dalam mengamati keruangan sistem perkotaan terdapat tiga komponen utama, yaitu :

- a. Himpunan atribut atau matriks atribut, yang menjelaskan karakteristik struktural (ukuran, struktur ekonomi, ruang sosial) setiap daerah perkotaan yang merupakan bagian dari agregat nasional.
- b. Matriks perilaku, yang mengindikasikan pada interaksi antar daerah perkotaan dalam hubungan pergerakan penduduk, dara, bangunan dan uang.
- c. Matriks interdependensi, yang mengindikasikan bagaimana suatu kota atau lokasi dalam sistem terpengaruh oleh perubahan pada sebagian atau seluruh kota-kotanya.

Hubungan yang tidak terpisahkan antara lokasi dengan sektor dengan lokasi , dimana faktor lokasi memasukan biaya transportasi. Hal ini menjelaskan pengertian ekonomi ruang yang berkaitan saling ketergantungan antar sektor atau antara sektor dengan lokasi (Simmon 1978:61).

2.1.4. Model-model organisasi sistem perkotaan

Berdasarkan pada penelitian terhadap kota-kota di Amerika Utara diperoleh hasil bahwa terdapat empat model organisasi sistem perkotaan

1. Model Daerah Perbatasan Daerah Perdagangan (*Frontier Mercantile*)

Model ini memiliki ciri bahwa pertumbuhan harus ditandai dengan keputusan investasi eksternal oleh subsistem perkotaan yang telah berkembang sebelumnya. Subsistem tersebut menyediakan pelayanan tingkat tinggi kepada daerah perbatasan yang baru dengan membentuk kota-kota baru, dan secara khusus pada peningkatan dan perumusan geografis di dalam peringkat kota-kotanya. Gelombang pertumbuhan kota mengikuti permukiman perbatasan dan keterkaitan antara setiap sub sistem perkotaan yang baru dengan sistem nasional yang berdampak pada kota-kota yang lama. Selama periode waktu yang panjang, perluasan daerah perkotaan membentuk impuls yang kontinyu antara kota-kota lama, kota-kota di atasnya, dan subsistem yang lebih baru. Usaha untuk menjaga kontrol ekonomi dan menambah pendapatan dengan menyediakan pelayanan merupakan upaya terakhir ketergantungan ekonomi, politik dan sosial. Kekuatan ini disebut *core periphery relationship* (Fiedmann, 1966) atau *Heartland Hinterland pattern* (Ray, 1972). Pertumbuhan kota dalam model ini ditentukan oleh aksesibilitas ke sumber-sumber barang dagangan, informasi, teknologi baru dan khususnya oleh keputusan investasi dan perbaikan transparansi.

2. Model Ekspor Bahan Baku (*Staple Export Model*)

Pertumbuhan kota dalam model ini tergantung pada pertumbuhan kegiatan-kegiatan utama pada daerah-daerah yang dilayaninya. Perbedaan dengan model *frontier*, model ekonomi bahan baku digerakan oleh pasar eksternal sedangkan model perbatasan tergantung pada keputusan pengembangan yang dilakukan dalam wilayah sumber bahan

baku. Model ekspor bahan baku menjelaskan pola organisasi dan pertumbuhan regional dalam daerah periferi tertentu. Perluasan daerahnya ditentukan oleh permintaan eksternal terhadap produk/bahan baku utama. Model ini mirip dengan model daerah perbatasan namun perbedaan utamanya terletak pada proses dinamika yang ditimbulkan. Model daerah perbatasan perbatasan membutuhkan perluasan daerah inti dan prosesnya diatur oleh perkiraan dan keputusan investasi.

Watkins (1963) menjelaskan bahwa model bahan baku merupakan sektor ekonomi yang dominan yang menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi. Dari distribusi sumber daya secara spasial dan fungsi produksi akan menentukan distribusi pendapatan yang dihasilkannya dan berakibat pada faktor produknya.

3. Model Spesialisasi Industri (*Industrial Specialisation*)

Pertumbuhan kota tergantung pada pertumbuhan nasional dan kekuatan sektor ekonomi kota tertentu. Spesialisasi industri banyak berpengaruh terhadap urbanisasi dan evaluasi sistem perkotaan. Proses urbanisasi sering disamakan dengan proses industrialisasi dan mengaitkan antara pertumbuhan perkotaan dan pertumbuhan industri. Model industri ini menekankan pada ukuran, struktur internal industri dan kecenderungan pertumbuhan yang ada daripada keterkaitan regional, tingkat hirarki dan lokasi relatif dalam sistem spasial. Namun model ini ditentukan oleh keterkaitan-keterkaitan antar kota yang kompleks tanpa membedakan hirarki dan bertujuan pada skala dan bukan pada jarak antar kotanya.

4. Model perubahan sosial (*The Social Change*)

Pertumbuhan kota pada model ini tergantung pada kecepatan perubahan sosial dan teknologi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan sistem perkotaan merupakan refleksi dari masyarakat yang kompleks di dalam kota, yang sangat berperan

secara simultan dan bekerja dibawah kekuatan-kekuatan yang sangat bervariasi dan terjalin satu sama lain. Berkembangnya ekonomi menggerakkan karakteristik berkembangnya masyarakat dengan meningkatnya pendapatan dan tingkat pendidikan, preferensi terhadap lokasi kehidupan yang layak dan gaya hidup baru. Ekonomi nasional dan variabel-variabel budaya ini bekerja pada dan melalui sistem perkotaannya, dan sering melalui saluran-saluran teknologi, komunikasi, proses transportasi dan produksi, dan lembaga infrastruktur seperti sistem politik dan legislatif, prosedur pendidikan dan penelitian, dan sistem pelayanan.

2.2. Wilayah dan Pengembangan Wilayah

2.2.1 Konsep Wilayah

Dalam melakukan penelitian mengenai bidang perencanaan wilayah, hal yang perlu dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah (*region*). Wilayah (*region*) dalam pengertian geografi menurut Jayadinata (2000:13), merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dibedakan dari wilayah lain. Wilayah geografi dapat mengandung wilayah geologi (*geological region*), wilayah tubuh tanah (*soil region*), wilayah ekonomi (*economic region*) dan sebagainya. Batas wilayah geografi ini tidak berimpit, sehingga batasnya dapat dibuat dengan tepat. Wilayah geografi ini sering disebut sebagai wilayah formal (*formal region*).

John Glasson (1977) mengemukakan konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistem industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan "wilayah formal" yaitu berkenaan dengan keseragaman dan

didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena adanya kenyataan bahwa faktor-faktor fisik lebih stabil dari pada faktor ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-waktu berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai Wilayah nodal atau *polarised region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang cocok untuk perencanaan dan

pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan persoalan-persoalan wilayah.

Klasifikasi tentang wilayah diatas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Richardson (1979) yang membagi wilayah atas tiga tipe yaitu :

- Wilayah Homogen

Wilayah dilihat dari segi kesamaan karakteristik serta dimana perbedaan internal dan interaksi intraregional dianggap bukan sesuatu yang penting. Wilayah homogen menunjukkan bahwa beberapa daerah berkumpul membentuk sebuah wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kesamaan secara ekonomi, keadaan geografi, atau sosial politik. Dalam konsep wilayah homogen, hubungan regional yang didasari oleh ekonomi lebih penting dari pada perbedaan intraregional.

- Wilayah Nodal (Polarized)

Pada wilayah ini keseragaman hanya sedikit diperhatikan. Keterpaduan merupakan hasil dari aliran-aliran internal, hubungan dan saling ketergantungan biasanya terpolarisasi menuju ke sebuah pusat (node) yang dominan. Dalam konsep ini dipahami bahwa ruang ekonomi sangatlah heterogen. Penduduk dan industri tidak tersebar di seluruh lokasi tetapi berkumpul pada lokasi-lokasi yang spesifik. Pada tingkat regional, wilayah disusun oleh titik-titik yang heterogen dengan ukuran berbeda-beda (kota besar, kota kecil, desa) yang berkaitan secara fungsional.

- Wilayah Perencanaan

Dalam konsep ini kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau administrative. Wilayah perencanaan lebih mudah dipahami sebagai sebuah daerah dimana kebijaksanaan ekonomi diterapkan, dan hal ini merupakan satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Ukuran wilayah perencanaan yang optimal dibedakan dengan panjang waktu perencanaan.

Daerah yang lebih besar dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang, sebaliknya wilayah perencanaan yang lebih kecil menawarkan berbagai keuntungan sistem desentralisasi, antara lain : kesempatan partisipasi masyarakat, biaya informasi rendah, penghematan waktu manajerial, dan kualitas keputusan yang lebih tinggi. Selain itu keuntungan utama dari pendekatan wilayah perencanaan adalah bahwa data dikumpulkan pada unit administrasi yang menjadikan dampak kebijakan lebih mudah untuk dievaluasi, dan struktur administrasi wilayah memudahkan implementasi kebijakan. Kerugiannya adalah kemungkinan tidak konsistennya antara batas administrasi wilayah dengan batas wilayah ekonomi.

Klassen dalam Glasson, (1990: 21) mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Boudeville, yaitu bahwa wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri ; (a) cukup besar untuk mengambil keputusan investasi yang berskala ekonomi; (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (*growth point*); (e) menggunakan cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalannya.

Di Indonesia pengertian suatu wilayah adalah secara administratif melingkupi suatu negara, propinsi atau kabupaten. Dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992, ditegaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dapat dikatakan wilayah di Indonesia berarti memiliki kesatuan yang di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan lainnya yang menjadi sumber daya bagi kelangsungan

pengembangannya. Pemanfaatan berbagai sumber daya kewilayahan diperlukan suatu perencanaan yang menjadi acuan dalam strategi pengembangan wilayah.

2.2.2. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomi dan sisi ekologis. Pengembangan Wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah (Prod'homme, 1985).

Menurut Nelson, dalam pengembangan wilayah terdapat beberapa pengertian tetapi secara umum mengacu kepada adanya perubahan dalam produktivitas wilayah. Tolok ukur produktivitas wilayah, antara lain : populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan nilai tambah industri manufaktur. Juga bisa mengacu kepada pengembangan sosial seperti : kualitas kesehatan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan, kualitas lingkungan, kreativitas, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah mengarah kepada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi kurang berkembang menjadi berkembang.

Pengembangan wilayah merupakan kondisi dinamis yang terjadi akibat adanya pemanfaatan potensi sumber daya yang berbeda yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dalam perkembangannya, perbedaan potensi antar wilayah membawa konsekuensi terhadap perkembangan aktifitas ekonomi didalamnya sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pada awalnya, dengan sumber daya yang beragam wilayah lebih potensial untuk berkembang, sebaliknya wilayah yang kurang memiliki sumber daya cenderung kurang

berkembang dan mengalami pertumbuhan yang lambat. Dalam tahap selanjutnya, kondisi dan potensi fisik ini mulai bergeser peranannya digantikan oleh faktor sosial dan ekonomi.

Perkembangan wilayah erat kaitannya dengan usaha-usaha pertumbuhan wilayah. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan wilayah digambarkan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, sedangkan untuk melihat pendapatan wilayah, digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam pengembangan wilayah terdapat dua pendekatan, yaitu : pembangunan dari atas (*development from above*) sedang yang kedua adalah pembangunan dari bawah (*development from below*). Meskipun berbeda jalur dari mana datangnya perkembangan kedua pendekatan tersebut mempunyai beberapa pemikiran yang sama, yaitu penerapan teori basis ekonomi (*economic basis*) dan tahapan pertumbuhan (*stage of growth*).

Di Indonesia, secara garis besar terdapat tiga konsep utama pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang, yaitu pusat pertumbuhan (*growth pole*), integrasi fungsional (*functional integration*), dan pendekatan desentralisasi (Alkadri, et al 1999:8).

Konsep pertumbuhan wilayah menekankan perlunya investasi terpusat pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur cukup baik. Konsep kedua, integrasi fungsional, adalah suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan sengaja di antara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau

wilayah lain. Perencanaan kota di Indonesia banyak menganut konsep ini, namun integrasi yang dilakukan bukan berdasar pada potensi produksi tetapi lebih pada fungsi pemerintahan. Konsep yang ketiga dimaksudkan agar dapat mencegah tidak terjadinya aliran keluar (*outflow*) dari sumber dana dan sumber daya manusia (Alkadri, et al 1999:8-9).

2.2.3. Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah

2.2.3.1. Teori Basis Ekonomi

Pada dasarnya teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan investasi industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, dan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Teori basis ekonomi (*economic base theory*), dalam aplikasinya sering dinamakan sebagai analisis basis (*base analisis*) dan dalam model ini analisis perekonomian daerah/regional mengklasifikasikan menjadi dua sektor kegiatan yaitu:

1. kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang datang dari luar wilayah perekonomian bersangkutan;
2. kegiatan-kegiatan yang bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat daerah

yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang dan jasa, produksi dan pemasaran terbatas pada wilayah daerah yang bersangkutan.

Inti dari teori ini adalah sektor unggulan menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor unggulan tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non unggulan. Berdasarkan teori ini sektor unggulan yang harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999: 141, Glasson 1990; 64). Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama di mana setiap perubahan mempunyai multiplier terhadap perekonomian regional.

Kegiatan kegiatan basis-non basis melalui pendekatan secara tidak langsung dapat dijadikan gambaran kemampuan suatu daerah. Satuan untuk mengukur sektor dapat menggunakan jumlah buruh atau hasil produksi (Warpani 1980:68).

2.2.3.2 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara terutama bagi negara-negara sedang berkembang, konsep dari pusat pertumbuhan diadaptasi dari berbagai teori yang dikemukakan oleh :

1. Perroux (1970), tentang pusat pertumbuhan dalam ruang ekonomi, menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama,

namun hanya terjadi pada pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Arsyad, 1999:147);

2. Boudeville (1978), tentang pusat pertumbuhan dalam ruang geografis, menyatakan bahwa kutub pertumbuhan regional sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke daerah sekitarnya yang berada dalam cakupannya (Gore, 1984:92);
3. Gunnar Myrdal (1957), tentang *spread effect* dan *backwash effect* pertumbuhan ekonomi dalam tata ruang, menyatakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain (Arsyad, 1999:129);
4. Hirschman (1958), tentang *trickling down effect* dan *polarization effect* suatu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan pendapat Myrdal bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain (Arsyad, 1999:129).

Menurut Kadariah (1985:24) kutub pertumbuhan dapat diartikan dalam:

1. Fungsional, *growth pole* mempunyai arti yang digambarkan sebagai suatu kelompok perusahaan cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang merangsang kehidupan ekonomi;
2. Geografis, diartikan sebagai suatu *pole attraction* yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat tanpa adanya hubungan antara usaha-usaha tersebut. Namun tidak berarti bahwa *growth pole* yang fungsional tidak mempunyai pengaruh.

Growth pole merupakan potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomi yang ada dan dapat menarik unsur-unsur ekonomi yang tidak ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan suatu proses perkembangan. Berdasarkan alasan tersebut *growth pole* sering dijadikan peralatan kebijakan ekonomi terutama pada negara-negara yang sedang berkembang.

Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan merupakan strategi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang/merata. Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan strategi ini paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah.

Ada beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan ini (Parr, 1999), yaitu:

(a) Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*),

Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, kesejahteraan penduduk di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada. Strategi ini dilakukan untuk menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuannya adalah mencegah modal ke luar wilayah, serta mencegah tingginya populasi di daerah tersebut. Hasil yang kemudian diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonominya.

(b) Mendorong dekonsentrasi wilayah,

Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah, serta bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan, untuk menekan perannya yang sudah terlalu besar. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah perlunya mempertimbangkan faktor lokasi pengembangan, bahwa tidak semua lokasi layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

(c) Memodifikasi sistem kota-kota,

Tujuan strategi ini adalah untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan yang memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

(d) Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah,

Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Kemudian ada 3 (tiga) dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan :

(1) Konsentrasi prasarana kota pada pusat pertumbuhan,

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial. Dalam konteks belanja publik ada sebuah justifikasi terhadap hal tersebut, yaitu tipe prasarana yang dibatasi pada fasilitas yang memiliki skala pelayanan yang luas.

Untuk prasarana transportasi termasuk di dalamnya pembangunan baru dan peningkatan jalan dengan fokus pada pusat pertumbuhan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya. Prasarana yang berskala luas ini akan menimbulkan eksternalitas, sehingga akan membuat daerah menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan. Untuk melengkapi prasarana tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya.

(2) Konsentrasi aktivitas perekonomian (*aglomerasi*)

Konsentrasi / aglomerasi aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). Hal ini akan dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke dalam pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi. Konsentrasi aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada kelengkapan prasarana kota.

(3) Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya,

Hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan pusat pertumbuhan dengan melihat aspek keunggulan komperatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Bagaimanapun juga rasionalitas dari strategi pusat pertumbuhan memunculkan dua pola yang berbeda, pertama adalah struktur ruang wilayah mengalami perubahan yang radikal dengan pertumbuhan pada kutub yang direncanakan yang disertai oleh redistribusi utama dari populasi dan pekerja dengan gaji murah (*low-cost labor*) ke dalam pusat dan dengan menimbulkan efek ke sektor

lainnya, yaitu perdagangan dan jasa. Semua itu akan mendorong masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja ekonomi wilayahnya.

2.2.3.3. Teori Interaksi Pusat Inti Daerah Periperi

Teori interaksi pusat inti daerah periperi dikembangkan oleh Hirschmann, Myrdal dan Friedmann. Dasar teori ini sebenarnya merupakan teori tempat pusat dan teori kutub pertumbuhan. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan suatu daerah dapat terjadi lebih pesat dari daerah lainnya karena memiliki keuntungan-keuntungan alamiah dan/atau buatan manusia. Perkembangan tersebut terjadi sebagian akibat dari interaksi antara pusat wilayah dengan daerah belakangnya.

Friedmann (1972) mengatakan bahwa pembangunan bermula dalam sejumlah pusat pertumbuhan yang relatif kecil, yang berlokasi pada titik dengan interaksi komunikasi paling tinggi. Kemudian inovasi disebarkan dari titik ini menuju ke daerah yang memiliki potensi interaksi yang lebih rendah. Pusat wilayah merupakan pusat perubahan inovasi yang utama, sedangkan daerah lainnya merupakan daerah pelengkap (periperi) yang tergantung pada pusat wilayah dan sebagian besar pembangunannya ditentukan pada pusat wilayah tersebut (Glasson 1990:100).

Lebih jauh Myrdal (1958) menambahkan bahwa penyebaran pembangunan dari proses wilayah ke periperinya berlangsung sebagai proses kausasi kumulatif berdasarkan kekuatan-kekuatan perluasan pembangunan (*spread effects*) dan pembalikan pembangunan (*backwash effect*). Konsep yang dipergunakan oleh Myrdal ini serupa dengan konsep perembesan pembangunan dan polarisasi pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Hirschmann. Hukum kausasi kumulatif tersebut menjelaskan bahwa setiap perluasan pusat pertumbuhan utama akan selalu diikuti oleh perluasan ekonomi internal dan eksternal

secara kumulatif, yang akan memepertahankan pertumbuhannya dengan cara perluasan ke daerah-daerah lainnya.

Kekuatan pembalikan pembangunan ditimbulkan oleh daya tarik pusat-pusat wilayah terhadap daerah belakangnya. Migrasi tenaga kerja, modal dan sumber daya lainnya berlangsung secara selektif sesuai dengan kepentingan industrialisasi di daerah perkotaan. Keluarnya faktor-faktor dari daerah miskin dapat mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, melalui relokasi intern dari sektor upah rendah ke sektor upah tinggi (produktivitas tinggi) sehingga menimbulkan pertumbuhan. Adapun kekuatan perluasan pembangunan mengasumsikan bahwa dengan semakin tumbuhnya daerah kaya (daerah perkotaan) maka akan semakin bertambah pula permintaan terhadap produk-produk dari daerah miskin (daerah perdesaan) sehingga akan mendorong pertumbuhan daerah miskin tersebut. yang pada umumnya berupa hasil pertanian dan bahan mentah.

2.3. Peran Kota dalam Pengembangan Wilayah

2.3.1. Keterkaitan Kota dengan Wilayah

Kota dalam suatu wilayah merupakan nodal, dapat dikatakan kota menjadi salah satu elemen wilayah dimana terjadi hubungan antara kota dan wilayah disekelilingnya, menurut Daldjoeni dahulu kota-kota di zaman Yunani kuno tak mengenal batas yang tegas secara ekonomis maupun politis antara darinya dan pedesaan agraris diluarnya. Memang nampak tembok kota itu memisahkan penduduk kota dari penduduk yang bertani di luarnya, tetapi sebenarnya antara kota dan wilayah sekelilingnya itu terdapat relasi yang simbiotis, yakni saling kebergantungan secara ekonomis antara kota dengan pedesaan (Daldjoeni, 1998:76).

Sesuai dengan fungsi yang diemban suatu kota, menurut Sumadibyo (1994) maka secara fungsional terdapat hubungan yang erat antara kota dan wilayah, sehingga perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kota dan demikian pula sebaliknya.

Hubungan antara kota dengan wilayah sekitarnya terjadi akibat kota yang membentuk wilayah pengaruh. Hal tersebut dinyatakan Richardson bawa, disekitar pusat-pusat (*node*) terdapat lingkungan pengaruh (*zone of influence*) atau lingkungan tata ruang (*spatial field*) (Richardson 2001:60). Kekuatan pengaruh tersebut tergantung pada jarak, sampai radius tertentu berkurang.

Di Eropa interaksi kota-wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya *Umland* (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); di Inggris *hinterland*. Adapun berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman tadi lalu muncul sebutan *catchment area*, *space of influence* dan *urban field* serta *city region* (Daldjoeni, 1998:77).

Negara-negara dengan keragaman yang bervariasi, antara lain keragaman ekonomi, sosial, budaya, ideologi ataupun lainnya, peranan kota dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilihat dari besaran (jumlah) penduduk atau ukuran kota tersebut. Peran kota ditentukan karakteristik fungsi kota yang diembannya, yaitu aksesibilitas yang dipunyai terhadap wilayah pinggirannya (Rondinelli, 1978).

2.3.2. Peran Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah

Peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah didekati dengan teori pusat pertumbuhan dan teori interaksi pusat inti daerah periferi, dimana teori interaksi pusat inti

daerah periferi sendiri merupakan hasil perpaduan teori pusat pertumbuhan dan teori tempat pusat.

Pusat pertumbuhan tidak hanya terletak pada kota-kota besar tetapi juga pada kota-kota kecil. Menurut Jong dan Steenbergen (1987:6-10), kota kecil mempunyai beberapa fungsi dalam pengembangan wilayah yaitu (a). Kota kecil sebagai pembangkit pusat pertumbuhan, karena menurut Lo dan Salih (1978) terjadi kegagalan perekonomian kota karena bekerja melampaui batas kota, walau pada akhirnya kota tetap akan berkembang. Mereka mengemukakan perlunya kebijakan untuk mengarahkan pertumbuhan kota metropolitan ke kota-kota menengah dan menstimulan kota orde bawah agar dapat tumbuh pada ukuran yang efisien. (b). Kota kecil sebagai penyangga pusat pertumbuhan, hal ini berkaitan dengan arus urbanisasi. Kota kecil dapat menyerap arus urbanisasi ke kota besar.

Fungsi kota tergantung pada fasilitas kelengkapan kota sehingga pendekatan tempat pusat. Dapat digambarkan bahwa dalam pengembangan ekonomi wilayah akan menimbulkan hirarki perkotaan akibat dari suatu rangkaian produksi. Pada saat produksi, hirarkinya bergerak dari kota pertanian, kota pemrosesan produk pertanian dan industri kecil kemudian ke kota-kota besar/industri besar. Dari kota-kota besar/industri dipasarkan hasil-hasil industri ke kota-kota kedua yang berperan sebagai kota perdagangan/jasa kemudian didistribusikan ke wilayah sekitarnya.

Menurut pendapat beberapa ahli, peran kota sebagai pertumbuhan wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

◆ Katalisator pertumbuhan wilayah

Menurut Tjahjati (PWK Okt 1993:13), kota berperan mendorong pertumbuhan kawasan sekitarnya, dengan kata lain kota berperan sebagai katalisator dalam peningkatan pertumbuhan wilayah. Kota-kota juga dianggap terkait satu sama lain dalam suatu hubungan fungsional produksi dan distribusi barang/jasa/informasi. Selanjutnya dianggap pula bahwa perkembangan kawasan sangat dipengaruhi tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi kota

Friedmann (1972) mengatakan bahwa pembangunan bermula dalam sejumlah pusat pertumbuhan yang relatif kecil, yang berlokasi pada titik dengan interaksi komunikasi paling tinggi kemudian menyebar ke daerah berpotensi interaksi yang lebih rendah. Pusat wilayah merupakan pusat perubahan inovasi yang utama, sedangkan daerah lainnya merupakan daerah pelengkap (periperi) yang tergantung pada pusat wilayah dan sebagian besar pembangunannya ditentukan pada pusat wilayah tersebut (Glasson 1990:100).

Teori interaksi pusat inti daerah periperi dikembangkan oleh Hirschmann, Myrdal dan Friedmann, menjelaskan bahwa perkembangan suatu daerah dapat terjadi lebih pesat dari daerah lainnya karena memiliki keuntungan-keuntungan alamiah dan/atau buatan manusia. Perkembangan tersebut terjadi sebagian akibat dari interaksi antara pusat wilayah dengan daerah belakangnya

◆ Pusat pengembangan ekonomi

Pusat pertumbuhan pada dasarnya adalah pengembangan ekonomi wilayah dengan bertumpu pada titik – titik pertumbuhan. Peran kota dalam pengembangan ekonomi wilayah dapat didekati dengan teori ekonomi basis dan teori tempat sentral.

Pusat wilayah yang dimaksud adalah wilayah kota, karena menurut Glasson, kota merupakan elemen wilayah yang berbentuk nodal atau titik. Berdasarkan teori ini maka kota merupakan suatu titik yang menentukan perkembangan suatu wilayah. Pengaruh kota diharapkan dapat merembes ke wilayah sebagaimana dikemukakan oleh Myrdal maupun Hirschmann. Hukum kausasi kumulatif tersebut menjelaskan bahwa setiap perluasan pusat pertumbuhan utama akan selalu diikuti oleh perluasan ekonomi internal dan eksternal secara kumulatif, yang akan mempertahankan pertumbuhannya dengan cara perluasan ke daerah-daerah lainnya. Pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan didasarkan pada perkembangan wilayah yang berbeda, untuk mengembangkan daerah perlu adanya pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat menyebabkan efek yang menyebar ke wilayah pengaruhnya.

Kota dengan perlengkapan fasilitas yang dimiliki serta perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya (Friedman:1979) merupakan suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah. Dengan ditetapkannya suatu kota menjadi pusat pertumbuhan diharapkan kota memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah pengaruhnya.

Sebagai pusat pertumbuhan regional, menurut Boudeville (1978) dipengaruhi adanya keberadaan suatu kelompok industri hal tersebut ditegaskan bahwa peran kota sebagai lokasi industri merupakan suatu kutub pertumbuhan regional. Sehingga suatu perkotaan membutuhkan suatu kawasan industri yang merupakan kelompok industri yang mengalami ekspansi yang akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke daerah sekitarnya yang berada dalam cakupannya (Gore, 1984:92).

◆ Pusat pelayanan wilayah

Menurut Richardson (2001:83), teori tempat pusat menyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya,

menyuplai dengan barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintah kota.

Peran kota sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh tingkat pelayanan suatu kota dan jangkauan pelayanan/pengaruh suatu kota. Tingkat pelayanan suatu kota ditinjau dari ketersediaan fasilitas suatu kota. Sebagai pusat pertumbuhan, fasilitas utama kota yang harus ada adalah fasilitas untuk aktivitas ekonomi dan penunjangnya. Fasilitas untuk ekonomi antara lain tersedianya kawasan industri dan pasar. Sementara fasilitas penunjangnya adalah pelayanan pemerintahan untuk administrasi dan fasilitas sosial.

Konsep pusat pertumbuhan mengakibatkan terjadi pemusatan pembangunan fasilitas. Hal ini berkaitan dengan pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pelayanan (Friedman :1979). Menurut Parr (1999), Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial.

Menurut Christaller dalam teori tempat pusat, kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah sekitarnya. Artinya ada hubungan yang erat antara kota dengan wilayah sekelilingnya, berkaitan antara besarnya tempat pusat dan luasnya wilayah pasaran, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.

Menurut Rondinelli (1983), kota kedua memiliki beberapa fungsi sebagai pusat pelayanan wilayah yaitu pusat pelayanan umum dan sosial, pusat transportasi dan komunikasi regional. Variabel-variabel yang muncul dalam kota sebagai tempat pelayanan berkaitan dengan pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan yang dapat disimpulkan sebagai berikut (Daljoeni,1998: 101-104):

- Hirarki, sebagai tingkat pelayanan dimulai dari pelayanan paling rendah di kota-kota kecil, sampai pelayanan paling besar di kota-kota besar. Adanya hierarki ini akan menunjukkan bermacam kelengkapan fasilitas, dari yang paling kecil ketersediaannya dan yang paling besar jumlahnya.
- Penduduk Ambang, yaitu jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung kegiatan pelayanan. Dengan tingkat penyediaan kelengkapan fasilitas tertentu membutuhkan penduduk ambang yang berbeda.
- Lingkup Pasar, yaitu jarak pasar maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan, jika diluar jarak tersebut maka penduduk akan mencari pusat pelayanan lain. Lingkup pasar ini akan menjadi batas pengaruh suatu pusat pelayanan dengan wilayah pelayanannya.

Dalam pengembangan ekonomi akan terjadi peningkatan peran suatu kota. Menurut Bryan Berry (dalam Rondinelli, 1985:5-6), dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan membentuk sistem jaringan penduduk yang besar dan lokasi yang tepat, sehingga pusat-pusat itu tersebut dapat dikembangkan sebagai suatu tempat berkumpul dan penyebaran bagi wilayah lainnya.

Berdasarkan pengertian Berry, maka perkembangan ekonomi menyebabkan kota-kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan akan saling berintegrasi dalam suatu jaringan sistem perkotaan dalam suatu wilayah, hal ini menimbulkan suatu hirarki perkotaan dalam melayani suatu wilayah dan juga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kota sebagai pusat pertumbuhan tidak saja merupakan tempat pemusatan fasilitas namun lebih dari itu kota merupakan permukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah-wilayah belakangnya (Glasson, 1990:

133). Penyediaan fasilitas ini berkaitan dengan sebagai pusat pelayanan dengan konsep tempat pusat dari Christaller dengan wilayah pengaruh berdasarkan teori hexagonal.

2.4 Kesimpulan Kajian Teori

Dari pembahasan teori-teori yang berkaitan mengenai Peran Kota Gombang terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen dapat diambil kesimpulan bahwa kota mempunyai pengaruh terhadap perkembangan wilayah, dan uraiannya sebagai berikut:

TABEL II. 1
KESIMPULAN KAJIAN PERAN PUSAT PERTUMBUHAN

No.	Pendapat	Pernyataan	Variabel
KOTA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
1.	Simmon (1978)	Sistem perkotaan dalam arti sempit adalah himpunan kota Dalam wilayah regional yang saling bergantung, secara sederhana berupa agregat kota. Dalam arti luas adalah simpul-simpul perkotaan berupa konsentrasi keruangan penduduk dan kegiatan dalam wilayah regional maupun nasional, dan diantara simpul-simpul tersebut terdapat hubungan baik antara simpul dengan simpul dan simpul dengan daerah sekitarnya	1. Aksesibilitas 2. Penduduk 3. Kegiatan ekonomi
2.	Arthur C. Nelson	Pengembangan wilayah mengarah pada perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi kurang berkembang menjadi berkembang.	1. Populasi penduduk 2. Kesempatan kerja 3. Tingkat pendapatan 4. Pengembangan sosial seperti : kualitas kesehatan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan, kualitas lingkungan, kreativitas,

lanjutan

No.	Pendapat	Pernyataan	Variabel
3.	Alkadri, et al (1999:8)	tiga konsep utama pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang, yaitu pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>), integrasi fungsional (<i>functional integration</i>), dan pendekatan desentralisasi	1. Pusat pertumbuhan/Pemusatan Fasilitas 2. Integrasi fungsional/hirarki pusat pelayanan 3. Desentralisasi/ekonomi lokal
4.	Daljoeni (1998)	Hubungan kota dengan wilayah sekitarnya merupakan hubungan simbiotis, saling ketergantungan ekonomis antara kota dan pedesaan	Kegiatan Ekonomi
5.	Gunnar Myrdal (1957) dan Hirschman (1958)	Wilayah tertinggal terbatas perkembangannya karena besarnya tarikan daerah maju (<i>backwash effect</i>) Perkembangan suatu daerah mempengaruhi daerah lain	1. Kegiatan Ekonomi 2. Akseibilitas
6.	Richardson (2001:60)	Hubungan antara kota dengan wilayah sekitarnya terjadi akibat kota yang membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.	1. Jarak
7.	Rondinelli (1978 dan 1983)	Peran kota ditentukan oleh karakteristik fungsi kota, serta aksesibilitas yang dimiliki terhadap wilayah dan Hirarki suatu kota	1. Fungsi kota 2. Akseibilitas 3. Hirarki kota
PERAN KOTA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH			
1.	Budhy Tjahjati (1997)	Kota berperan menjadi katalisator/pendorong dalam peningkatan pertumbuhan wilayah dan ada keterkaitan antar kota dalam hubungan fungsional dan distribusi barang/jasa/informasi. perkembangan kawasan sangat dipengaruhi tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi kota	1. Fungsi kota 2. Fasilitas pelayanan 3. Akseibilitas 4. Kegiatan sosial ekonomi
2.	Friedmann (1972)	Pembangunan menyebar dari pusat pertumbuhan yang interaksi komunikasi paling tinggi, terdapat ketergantungan periferi terhadap pusat	1. Interaksi komunikasi

lanjutan

No.	Pendapat	Pernyataan	Variabel
3.	Friedman (1979)	Kota dengan perlengkapan fasilitas yang dimiliki serta perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya merupakan suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah.	1. Fasilitas kota
4.	Jong dan Steenberg (1987:6-10)	Kota kecil mempunyai peran terhadap wilayah sebagai 1. Pembangkit pusat pertumbuhan wilayah 2. Penyangga pusat pertumbuhan	1. Fasilitas pelayanan 2. Aksesibilitas
5.	Parr (1999)	Kinerja pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh 1. Konsentrasi prasarana kota pada pusat pertumbuhan, 2. Konsentrasi aktivitas perekonomian (<i>aglomerasi</i>) 3. Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya.	1. Pemusatan fasilitas 2. Fasilitas kota 3. Kegiatan ekonomi komperatif daerah 4. Aspek keunggulan komperatif daerah 5. Kependudukan
6.	Lincoln Arsyad (1999)	Menurut teori basis ekonomi, faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah adalah permintaan barang dan jasa dari luar daerah.	1. Permintaan produksi 2. Aksesibilitas
7.	Boudeville (1978)	Kutub pertumbuhan regional akan mendorong perkembangan ekonomi daerah melalui ekspansi kelompok industri perkotaan	1. Kelompok industri
8.	Rondinelli (1983)	Kota menengah dan kecil mempunyai fungsi antara lain sebagai : 1. Pusat komersial dan jasa 2. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian 3. Pusat industri kecil 4. Pusat penarik imigrasi dari desa dan sumber pendapatan desa 5. Pusat pemasaran dan perdagangan regional 6. Pusat transportasi dan komunikasi regional	1. Kegiatan ekonomi 2. Transportasi 3. Komunikasi
9.	Richardson (2001:83)	Fungsi pokok suatu kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakang	1. Fasilitas kota

lanjutan

No.	Pendapat	Pernyataan	Variabel
10	Glasson (1990:133)	Kota merupakan pusat permukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat sekitarnya	1. Fasilitas kota
11	Christaller (1933)	Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah sekitarnya. Artinya ada hubungan yang erat antara kota dengan wilayah sekelilingnya, berkaitan antara besarnya tempat pusat dan luasnya wilayah pasaran, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan. Semua pemenuhan kebutuhan memiliki dua hal yaitu <i>range</i> dan <i>threshold</i> .	1. Besar kota 2. Pendapatan 3. Jarak 4. Jumlah minimal penduduk
12	Rondinelli (1983)	Kota menengah dan kecil mempunyai fungsi antara lain sebagai : 1. Pusat pelayanan umum dan sosial 2. Pusat transportasi dan komunikasi regional	1. Kegiatan ekonomi 2. Transportasi 3. Komunikasi
13	Jong dan Steenberg (1987:6-10)	Kota kecil mempunyai peran terhadap wilayah sebagai pusat pelayanan	1. Fasilitas pelayanan 2. Aksesibilitas
14	Daljoeni (1998: 101-104)	Kaitan antara tingkat pelayanan dengan pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan, oleh dapat disimpulkan sebagai berikut: - Hierarki, sebagai tingkat pelayanan dimulai dari pelayanan paling rendah di kota-kota kecil, sampai pelayanan paling besar di kota-kota besar. - Penduduk Ambang, yaitu jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung kegiatan pelayanan. - Lingkup Pasar, yaitu jarak pasar maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan,	1. Hirarki kota/fasilitas kota 2. Penduduk 3. Jarak

Sumber : Hasil Rangkuman Kajian Peran Pusat Pertumbuhan : 2004

Berdasarkan kajian peran pusat pertumbuhan, sesuai dengan kondisi Kota Gombong yang termasuk kota kecil, peran kota yang utama pada kota menengah dan kecil adalah sebagai pusat pertumbuhan atau penyangga pertumbuhan

Kota sebagai pusat pertumbuhan memiliki fungsi:

1. Katalisator pertumbuhan wilayah
2. Pusat pengembangan ekonomi
3. Pusat pelayanan wilayah

Dari ke tiga fungsi pusat pertumbuhan tersebut terdapat beberapa variabel yang akan digunakan dalam melakukan kajian mengenai Peranan Kota Gombong Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Kebumen. Beberapa Variabel tersebut adalah :

1. Katalisator pertumbuhan wilayah

Variabel – variabel fungsi pusat pertumbuhan sebagai katalisator pertumbuhan wilayah adalah :

- a. Hubungan fungsional dan distribusi barang/jasa/informasi.

Hubungan ini dapat ditinjau dari wilayah pengaruh yaitu dengan pendekatan jarak pasar. Variabel jarak pengaruh kota merupakan jarak yang menunjukkan jangkauan pengaruh suatu kota terhadap suatu wilayah. Hal ini dinyatakan Richardson (2001:60) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Pendekatan yang dilakukan memperhitungkan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Jarak pengaruh kota dapat pula ditinjau dari jarak pasar. Jarak pasar merupakan jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak pasar ini yang diwakili

jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Selain dari jarak pasar dapat pula di dekati dari intensitas kegiatan dengan model gravitasi.

Semakin tinggi intensitas/hasil perhitungan gravitasi semakin tinggi hubungan fungsional dan distribusi barang/jasa/informasi anatar kota.

b. Tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi kota

Tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi ini didekati dengan ketersediaan fasilitas. Fasilitas kota sebagai variabel dengan pengaruh terbesar, antara lain dinyatakan oleh Rondinelli (1983), Friedman (1972,1979), Parr (1999) dan Daldjoeni (1998: 101-104) bahwa peran kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh perlengkapan fasilitas yang dimiliki. Fasilitas kota yang mendukung pusat pertumbuhan adalah fasilitas publik dengan skala pelayanan luas (Parr, 1999). Menurut Parr (1999), salah satu faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan adalah adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang tergantung pada kelengkapan prasarana kota.

Semakin lengkap fasilitas semakin baik fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan.

2. Pusat pengembangan ekonomi

Variabel – variabel fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pengembangan ekonomi adalah :

a. Fasilitas kota

Fasilitas kota sebagai variabel dengan pengaruh terbesar, antara lain dinyatakan oleh Rondinelli (1983), Friedman (1972,1979), Parr (1999) dan Daldjoeni (1998: 101-104) Peran kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh perlengkapan fasilitas yang dimiliki. Fasilitas kota yang mendukung pusat

pertumbuhan adalah fasilitas publik dengan skala pelayanan luas (Parr, 1999). Menurut Parr (1999), salah satu faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan adalah adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang tergantung pada kelengkapan prasarana kota.

b. Jarak pengaruh kota

Dengan fungsi kota sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah dan diharapkan terjadi rembesan efek yang menyebar ke wilayah pengaruhnya, maka variabel jarak pengaruh kota merupakan jarak yang menunjukkan jangkauan pengaruh suatu kota terhadap suatu wilayah. Hal ini dinyatakan Richardson (2001:60) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Pendekatan yang dilakukan memperhitungkan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Jarak pengaruh kota dapat pula ditinjau dari jarak pasar. Jarak pasar merupakan jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak pasar ini yang diwakili jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas.

c. Kondisi Perekonomian Wilayah

Pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh keunggulan komperatifnya (Parr,1999). Pendekatan untuk keunggulan komperatif dengan menentukan sektor unggulan suatu wilayah. Kemampuan suatu daerah terhadap sektor tertentu dapat digambarkan melalui sektor basis suatu daerah dengan menggunakan pendapatan atau tenaga kerja (Warpani,1980:68). Variabel ini

terutama digunakan untuk mencari sektor basis dari tiap-tiap wilayah serta tipologi perekonomian wilayah. Sehingga nantinya tipologi pertumbuhan wilayah dapat dilihat, karena kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah (Alkadri et al., 1999: 17). Tingkat keunggulan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh klasifikasi sektor basis dan non basis, yang ditentukan dari perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di wilayah terhadap wilayah acuan.

Untuk penelitian ini, digunakan sektor-sektor dalam PDRB sehingga data yang dapat digunakan untuk menghitung *Location Quotient* (LQ) tersebut adalah data sektor-sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jenis data yang digunakan adalah data PDRB wilayah penelitian serta data PDRB wilayah acuan tempat dimana daerah yang dihitung tersebut berada. Sehingga formula tersebut adalah:

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N} \dots\dots(8)$$

Dimana :

Si = PDRB sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kota Gombong

S = Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kota Gombong

Ni = Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya, dimana dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

N = Jumlah PDRB di daerah acuan yang lebih luas, dimana dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

Dari hasil perhitungan Location Quotient (LQ) tersebut ada tiga kemungkinan hasil yang di dapat , yaitu ;

- $LQ > 1$, disebut sektor basis, menyatakan Kota Gombang memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dari tingkat Kabupaten Kebumen
- $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, menyatakan Kota Gombang tidak memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut (kecenderungan impor) dan tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat Kabupaten Kebumen.
- $LQ = 1$, menyatakan Kota Gombang mencukupi dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan Kabupaten Kebumen

d. Pertumbuhan dan Perkembangan Aktivitas

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas terutama ditujukan pada aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan, industri serta perdagangan dan jasa, kondisi ini akan dilihat dari kondisi perekonomian wilayah yang dapat dilihat dengan interaksi antar aktivitas perekonomian.

3. Pusat pelayanan wilayah

Variabel – variabel fungsi kota pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan adalah :

a. Fasilitas kota

Fasilitas kota sebagai variabel dengan pengaruh terbesar, antara lain dinyatakan oleh Rondinelli (1983), Friedman (1972,1979), Parr (1999) dan

Daldjoeni (1998: 101-104) bahwa peran kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh perlengkapan fasilitas yang dimiliki. Fasilitas kota yang mendukung pusat pertumbuhan adalah fasilitas publik dengan skala pelayanan luas (Parr, 1999). Menurut Parr (1999), salah satu faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan adalah adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang tergantung pada kelengkapan prasarana kota.

Variabel keberadaan fasilitas terutama akan sangat bermanfaat digunakan dalam menentukan hirarki perkotaan di wilayah studi. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas dari fasilitas yang ada akan semakin menjadikan suatu wilayah memiliki orde yang tinggi. Dari kelengkapan fasilitas pada tiap-tiap kota ini nantinya akan menunjukkan tingkat kekotaan masing-masing wilayah yang pada akhirnya akan menggambarkan sistem perkotaan yang ada.

Fasilitas yang akan dipergunakan sebagai variabel, dipilih dari beberapa jenis fasilitas dengan kriteria (Rondinelli, 1985) :

- Mencirikan fasilitas perkotaan (*urban*)
- Berskala luas (dalam arti bisa dipergunakan oleh wilayah yang lebih luas daripada kotanya sendiri)
- Berfungsi secara sosial maupun ekonomi
- Obyeknya tunggal dan terukur
- Memiliki karakteristik yang berjenjang atau hirarkis

b. Jarak pengaruh kota

Variabel jarak pengaruh kota merupakan jarak yang menunjukkan jangkauan pengaruh suatu kota terhadap suatu wilayah. Hal ini dinyatakan

Richardson (2001:60) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Pendekatan yang dilakukan memperhitungkan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Jarak pengaruh kota dapat pula ditinjau dari jarak pasar. Jarak pasar merupakan jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak pasar ini yang diwakili jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas.

BAB III

KARAKTERISTIK WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN DAN KOTA GOMBONG

3.1 Kajian Umum Wilayah Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten bagian selatan Propinsi Jawa Tengah (Gambar 3.1) yang terletak pada posisi $7^{\circ}27'$ - $7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}33'$ - $109^{\circ}50'$ Bujur Timur dan memiliki batas dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Luas wilayah 128.111,5 Ha terdiri dari 28,92 % tanah sawah dan 71,08% tanah kering dan terdiri dari dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan.

3.1.1. Kondisi Fisik Kabupaten Kebumen

Secara topografi Kabupaten Kebumen, disebelah utara merupakan daerah pegunungan, bagian tengah dan selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Oleh karena itu, secara topografi Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu :

- ◆ 0 – 2 %, meliputi 52,26 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 2-5 %, meliputi 4,64 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 15-40%, meliputi 17,11 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ lebih dari 40 %, meliputi 25,99 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

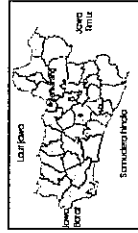
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA

KABUPATEN KEBUMEN

KETERANGAN :

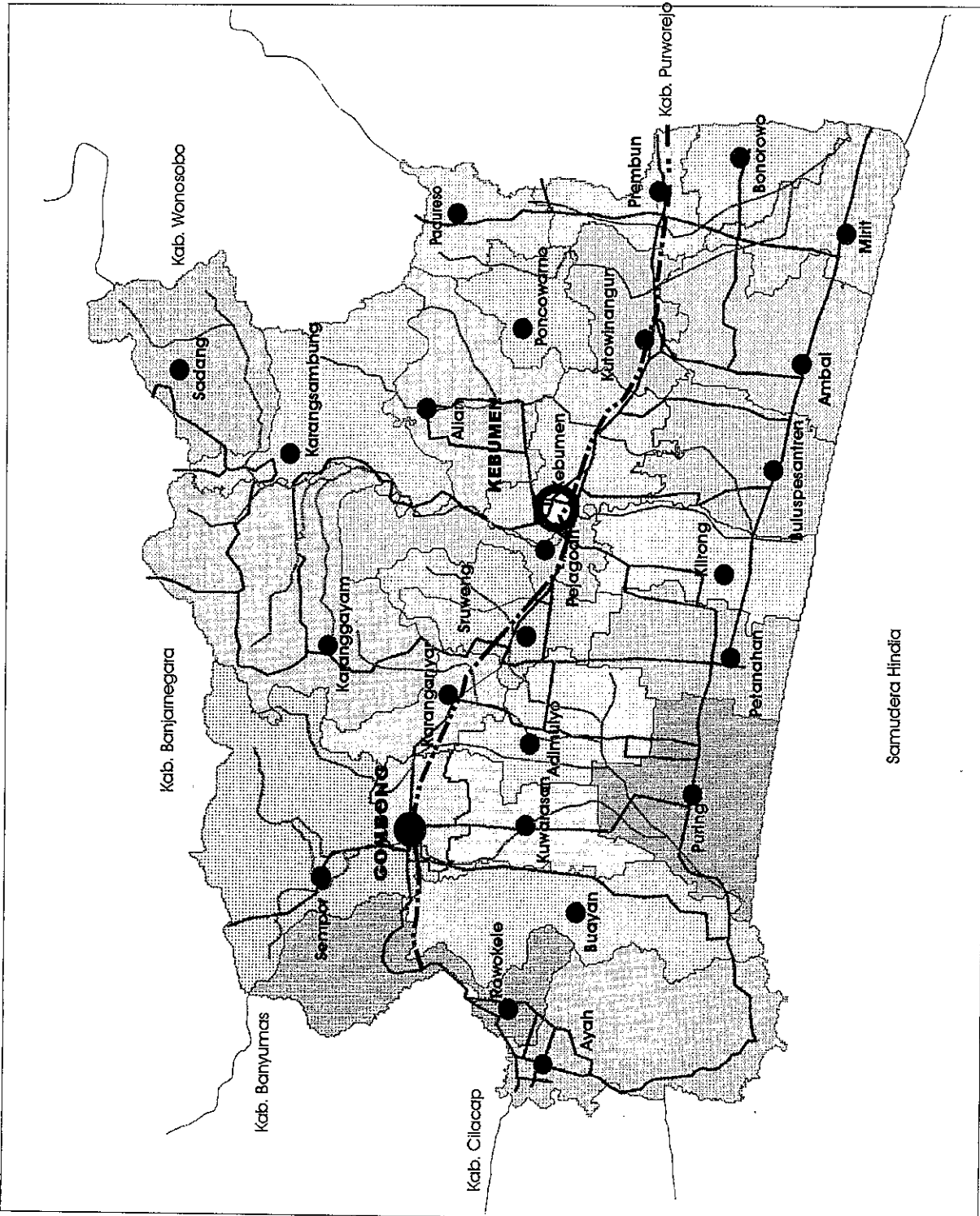
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten



Nomor Gambar : 31
Halaman : 83

Skala 1 : 50.000

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kebumen



Samudera Hindia

Sedangkan berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 6 kelas yaitu :

- ◆ 0 – 7 m, meliputi 20,59 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 7 – 18 m, meliputi 17,30 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 18 – 25 m, meliputi 11,99 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 25 – 100 m, meliputi 19,20 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 100 – 500 m, meliputi 31,31 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen
- ◆ 500-997,5 m, meliputi 20,59 % dari luas wilayah Kabupaten Kebumen

Kondisi Geologi dibedakan menurut jenis tanah. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kebumen adalah alluvial seluas 16.103,62 Ha (12,57%), regosol seluas 12.465,25 Ha (9,73 %), asosiasi Glei Humus dan Aluvial kelabu seluas 39.778,62 Ha (31,05 %), asosiasi litosol dan mediteran coklat terdapat 4.752,94 Ha (3,71 %), kompleks latosol merah kekuningan seluas 20.100,69 Ha (15,69 %), kompleks podsolik merah kekuningan seluas 34.910,38 Ha (27,25 %). Dari jenis tanah tersebut menunjukkan Kabupaten Kebumen sebagian wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian. Akan tetapi beberapa wilayah kurang subur, seperti di sebagian wilayah Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang dan Alian.

Keanekaragaman struktur geologi di Kabupaten Kebumen menimbulkan beberapa potensi yang perlu dikembangkan, diantaranya adalah Formasi Karangsambung yang dijadikan sebagai Laboratorium Geologi LIPI, eksploitasi beberapa pertambangan golongan C yang direncanakan di wilayah selatan Gombang.

Menurut klimatologi, Kabupaten Kebumen beriklim tropis yang mempunyai dua musim, biasanya pada musim peralihan sering terjadi angin kencang yang bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut dan bersifat kering. Berdasarkan Schmidt dan Ferguson, iklim

di Kabupaten Kebumen termasuk tipe iklim C (agak basah). Dilihat dari keadaan temperaturnya, mempunyai dua bagian temperatur yaitu bagian selatan rata-rata 27 ° C – 32 ° C dan bagian utara rata-rata 20 ° C – 25 ° C. Curah Hujan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2002 sebesar 1.829 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 85 hari. Adapun suhu udara maksimum sebesar 37 ° C dan minimum 16 ° C, dengan kelembaban udara relatif rata-rata sebesar 84 %, dan kecepatan angin sebesar 1,85 m/detik.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Kebumen, dipengaruhi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Terdapat beberapa sungai besar dan kecil di Kabupaten Kebumen yaitu: Sungai Ijo, Sungai Karanganyar, Sungai Jatinegara, Sungai Luk Ulo, Sungai Cingcinguling, Sungai Kedungbener, dan Sungai Wawar. Hulu sungai-sungai tersebut terletak di tengah maupun utara wilayah Kabupaten Kebumen yang semuanya bermuara di Samudera Hindia. Waduk dan Bendung yang terdapat di Kabupaten Kebumen adalah Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang, Bendung Pesucen, Bendung Sindut, dan Bendung Bojo. Selain air hujan dan air permukaan, maka air tanah yang berpotensi dijumpai dalam bentuk sumur dangkal maupun dalam.

3.1.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

3.1.2.1. Kependudukan

A. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2002 (tabel III.1.) sebanyak 1.183.756 orang terdiri dari 593.208 laki-laki dan 590.548 perempuan dengan pertumbuhan rata-rata 0,8 %. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kecamatan Sadang 6,45 % sedangkan laju pertumbuhan terkecil di Kecamatan Gombang – 1,47 %.

TABEL III.1
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN KEBUMEN

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk		r (%)	Persebaran penduduk 2002
			2001	2002		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ayah	76,370	51.935	52.655	1.37	4.45
2.	Buayan	68,420	53.940	54.207	0.49	4.58
3.	Puring	61,970	51.882	51.689	-0.37	4.37
4.	Petanahan	44,840	50.869	51.012	0.28	4.31
5.	Klirong	43,250	53.617	53.635	0.03	4.53
6.	Buluspesantren	48,770	51.350	51.212	-0.27	4.33
7.	Ambal	62,410	55.504	55.221	-0.51	4.66
8.	Mirit	51,360	46.372	45.857	-1.12	3.87
9.	Bonorowo	21,900	20.009	19.725	-1.44	1.67
10.	Prembun	22,960	27.463	27.276	-0.69	2.30
11.	Padureso	28,950	13.882	13.845	-0.27	1.17
12.	Kutowinnangun	33,730	42.965	43.765	1.83	3.70
13.	Alian	57,750	55.529	55.966	0.78	4.73
14.	Poncowarno	27,370	14.943	15.223	1.84	1.29
15.	Kebumen	42,040	116.087	117.523	1.22	9.93
16.	Pejagoan	34,580	45.441	46.217	1.68	3.90
17.	Sruweng	43,680	53.170	55.142	3.58	4.66
18.	Adimulyo	43,430	33.927	33.782	-0.43	2.85
19.	Kuwarasan	33,840	42.389	42.101	-0.68	3.56
20.	Rowokele	53,795	42.632	42.601	-0.07	3.60
21.	Sempor	100,150	60.426	61.887	2.36	5.23
22.	Gombang	19,480	48.001	47.294	-1.49	4.00
23.	Karanganyar	31,400	33.761	34.178	1.22	2.89
24.	Karanggayam	109,290	49.881	50.715	1.64	4.28
25.	Sadang	54,107	17.315	18.432	6.06	1.56
26.	Karangsambung	65,273	41.016	42.596	3.71	3.60

Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2002

B. Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2002, terbesar di Kecamatan Kebumen sebanyak 117.523 jiwa atau 9,93% dan terkecil di Kecamatan Padureso sebanyak 13.666 jiwa atau 1,16 % (tabel III.1)

TABEL III.2
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2002

No	Kecamatan	Tidak /belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D3	Tamat S1	Jumlah
1	Ayah	16349	23550	5629	1987	238	110	47863
2	Buayan	18862	23305	4500	1910	156	73	48806
3	Puring	17707	19401	66231	2567	252	117	46667
4	Petanahan	15636	19517	6610	4025	380	251	46419
5	Kliron.	15698	20637	6580	4702	540	308	48465
6	Bulus.esantren	15779	21222	5439	3416	320	183	46359
7	Ambal	22199	18368	5502	3241	294	191	49795
8	Mirit	19137	15010	4724	2400	246	177	41694
9	Bonorowo	8233	6456	2032	1032	106	76	17935
10	Prembun	7938	10796	3378	2234	287	172	24805
11	Padureso	4029	5480	1715	1134	146	87	12591
12	Kutowinangun	12242	16776	5519	4493	376	366	39772
13	Allan	20884	21292	4315	2719	344	202	49756
14	Poncowarno	5680	5792	1174	740	94	55	13535
15	Kebumen	30861	40746	16348	14954	1681	1777	106367
16	Pejagoan	13966	17020	5792	4144	340	241	41503
17	Sruweng	15057	21819	7534	4856	370	281	49917
18	Adimulyo	8192	12739	5768	4004	238	137	31078
19	Kuwarasan	11394	17789	5328	3063	300	146	38020
20	Rowokele	16302	16615	3455	1667	177	96	38312
21	Sempor	22890	23127	5720	3711	298	173	55919
22	Gombang	10841	14302	8252	8458	854	749	43456
23	Karanganyar	8880	12695	5067	3945	500	241	31328
24	Karanggayam	24634	17054	2491	1028	86	26	45319
25	Sadang	7431	7677	882	349	58	20	16417
26	Karang Sambung	17173	17743	2039	805	134	47	37941
JUMLAH		387994	446928	132416	87584	8815	6302	1.070.039

Sumber : Kabupaten Kebumen Da/am Angka Tabun 2002

C. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Penduduk Kabupaten Kebumen apabila ditinjau dari komposisi pendidikan yang ditempuh adalah penduduk yang tidak/belum tamat SD sejumlah 387.994 jiwa, tamat SD sejumlah 446.928 jiwa, tamat SLTP sejumlah 132.416 jiwa, tamat SLTA sejumlah 87.587

jiwa, tamat akademi/diplomat sejumlah 8.816 jiwa dan Sarjana sejumlah 6.302 (tabel III.2). Dari data tersebut maka komposisi penduduk Kabupaten Kebumen menurut pendidikan terbesar adalah tamat SD kebawah sebanyak 78 %.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kebumen bekerja di sektor pertanian, baik sebagai buruh tani maupun sebagai petani sendiri. Pada tahun 2002, penduduk dengan mata pencaharian di sektor pertanian tanaman pangan, dengan usaha tani dan buruhnya berjumlah 50,39 %. Sektor mata pencaharian kedua terbesar adalah industri sejumlah 15,93% berikutnya adalah sektor perdagangan sejumlah 14 % (lampiran D).

TABEL III.3
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN PER SEKTOR
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 (%)

Sektor	Tenaga Kerja		Kontribusi Terhadap PDRB (%)	
	2001	2003	2001	2003
1. Pertanian	40,76	50,39	46,27	43,93
2. Industri	22,35	15,93	8,81	9,22
3. Perdagangan	20,61	14,00	14,96	156,07
4. Jasa	8,82	8,18	14,67	14,83
5. Lainnya	7,46	11,49	15,29	16,95
Jumlah	100	100	100	100

Sumber : IPM Kecamatan Kabupaten Kebumen tahun 2003

E. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2002, usia produktifnya (15-64 tahun) sejumlah 728.671 jiwa atau 61,54 % sedangkan usia tidak produktifnya 456.085 jiwa atau 38,46%. Dengan kondisi tersebut maka angka ketergantungan di Kabupaten Kebumen mencapai 62,45 %.

3.1.2.2. Perekonomian

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Kebumen dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah mengalami peningkatan dari sebesar 1,78 % pada tahun 2001 menjadi 2,86 % pada tahun 2002. Peningkatan terjadi pada seluruh sektor ekonomi kecuali sektor-sektor jasa yang mengalami penurunan.

Dilihat dari perkembangan peranan persektor menurut harga konstan 1993 antara tahun 1999-2002 maka sektor pertanian tetap mendominasi urutan pertama yakni sebesar 39,44 %, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 17,46 % sektor-sektor jasa sebesar 16,84 %, dan sektor industri pengolahan sebesar 9,01 % (tabel III.5)..

B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen ini dicerminkan oleh adanya peningkatan besarnya Produk Domestik Regional Bruto menurut harga berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp. 2.120.738.381.910 (Dua trilyun seratus duapuluh milyar tujuh ratus tigapuluh delapan juta tigaratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 2.677.329.327.690. (Dua trilyun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar tigaratus duapuluh sembilan juta tigaratus duapuluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan menurut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2000 sebesar Rp. 899.383.015.640 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar tigaratus delapan puluh tiga juta limabelas ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah menjadi Rp. 941.581.497.320 (Sembilan ratus empat puluh satu milyar limaratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus duapuluh rupiah) pada tahun 2002.

TABEL III.4.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN HARGA BERLAKU (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	870.701.755,75	981.171.827,50	1.067.631.360,55	1.176.039.725,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	91.507.428,60	90.955.612,81	109.000.794,28	121.655.198,88
3.	Industri Pengolahan	175.540.045,95	186.810.567,68	214.738.353,08	246.731.353,73
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	10.991.387,09	16.029.860,14	20.325.066,58	34.530.368,03
5.	Bangunan dan Konstruksi	32.723.059,58	29.979.439,00	34.599.223,37	43.446.656,67
6.	Perdagangan	343.602.530,43	317.236.274,98	361.630.235,96	403.357.183,14
7.	Angkutan dan Komunikasi	68.778.782,84	83.278.813,36	103.297.549,15	122.126.063,28
8.	Lemb.Keu, sewa dan Jasa perushan	89.530.977,94	104.238.608,57	116.892.777,11	132.294.143,73
9.	Jasa-jasa	284.549.466,22	311.037.377,88	361.389.742,16	397.148.634,63
	Total PDRB	1.967.925.434,40	2.120.738.381,91	2.389.505.102,24	2.677.329.327,69
	Jml Penduduk tengah tahun	1.221.025,00	1.164.940,00	1.171.329,00	1.176.822,00
	PDRB per kapita (Rp)	1.611.699,54	1.820.470,05	2.039.944,83	2.275.050,37

Sumber: PDRB Kabupaten Kebumen 1999, 2002

C. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat didekati dengan menggunakan angka PDRB per kapita yaitu hasil bagi antara total PDRB dengan penduduk pertengahan tahun yang sama. Pada tahun 2002 terlihat PDRB menurut harga berlaku per kapita Rp. 2.275.050,37 (Dua juta duaratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) atau meningkat 11,52 % dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 2.039.944,83 (dua juta tigapuluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Selain itu pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita di Kabupaten Kebumen selama empat tahun terakhir atas dasar harga berlaku sebesar 12,30 % dan atas harga konstan 1993 mencapai 4,07 %.

TABEL III.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN HARGA KONSTAN 1993 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	335.280.773,29	367.828.908,24	364.705.048,12	378.476.527,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	47.454.032,24	43.631.841,96	46.021.023,00	47.846.330,87
3.	Industri Pengolahan	85.293.422,10	83.875.808,41	85.530.561,84	88.050.858,44
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	9.651.311,84	7.116.564,33	7.449.217,71	8.256.307,43
5.	Bangunan dan Konstruksi	20.377.635,89	17.366.951,20	17.709.601,07	19.781.501,78
6.	Perdagangan	162.258.819,88	134.841.074,10	137.895.781,96	142.024.269,37
7.	Angkutan dan Komunikasi	36.997.217,86	39.195.622,83	41.256.633,96	42.876.989,12
8.	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	44.709.179,31	48.775.295,76	50.085.761,91	51.256.204,29
9.	Jasa-jasa	155.024.247,39	156.750.948,81	164.717.063,57	163.012.508,86
	Total PDRB	897.046.639,80	899.383.015,64	915.370.693,14	941.581.497,32
	Jml Penduduk tengah tahun	1.221.025,00	1.164.940,00	1.171.329,00	1.176.822,00
	PDRB per kapita (Rp)	734.666,89	772.042,36	781.480,43	800.105,28

Sumber: PDRB Kabupaten Kebumen 1999, 2002

3.1.3. Perwilayahan Perencanaan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Pengembangan Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah dalam RTRW Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Pembagian SWP dalam Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut (gambar 3.2.) :



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

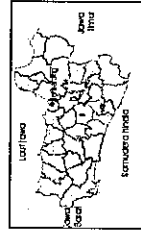
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

P E T A
PEMBAGIAN SWP MENURUT REVISI RTRW TAHUN 2003

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten

- SWP I pusat di Kota Kebumen
- SWP II pusat di Kota Gombong
- SWP III pusat di Kota Prembun

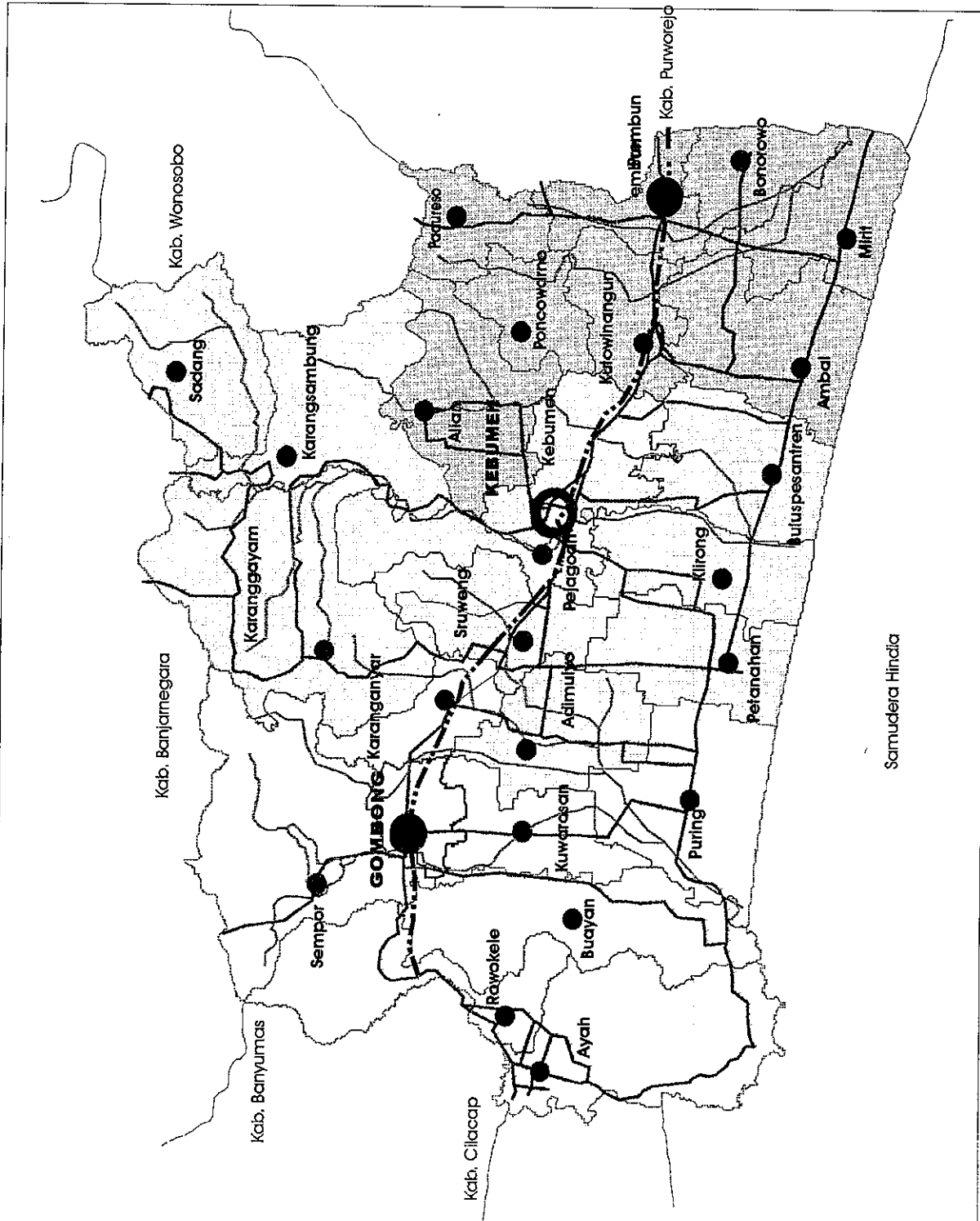


Norma Gambar : 3:2
Halaman : 92

Skala 1 : 50.000



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Th. 2003



Samudera Hindia

1. SWP I dengan pusat di Kota Kebumen,

SWP I ini terdiri dari wilayah-wilayah Kecamatan Kebumen, Kecamatan Sadang, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Buluspesantren. Pusat SWP I ini memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal, pusat pemerintahan kota, pusat perkantoran, pusat pelayanan sarana dan prasarana kota serta permukiman.

2. SWP II dengan pusat di Kota Gombong

SWP II ini mencakup, wilayah-wilayah Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan. Pusat SWP II ini memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa berskala lokal, pusat pemerintahan kecamatan dan permukiman.

3. SWP III dengan pusat di Kota Prembun

SWP III ini mencakup, wilayah-wilayah Kecamatan Prembun, Kecamatan Alian, Kecamatan Ambal, Kecamatan Mirit, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Bonorowo. Kecamatan Padureksa dan Kecamatan Kutowinangun. Pusat SWP III ini memiliki fungsi : kawasan perdagangan skala lokal, pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, pertanian dan perdagangan hasil bumi.

Berdasarkan survey BPS pada tahun 2002, maka terdapat daerah perkotaan yaitu desa-desa dengan memiliki sifat perkotaan. Dari hasil tersebut maka perkembangan daerah perkotaan di Kabupaten Kebumen terletak sepanjang jalur utama antara Kota Gombong sampai Prembun , kemudian di jalur selatan-selatan serta ibukota kecamatan Alian.

Daerah perkotaan di Kabupaten Kebumen terutama terletak di Kecamatan Gombang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun yang semua terletak di jalur utama selatan Jawa (Gambar 3.3)

Apabila daerah perkotaan ditinjau sepanjang jalur selatan Jawa Tengah, maka dari arah timur adalah Purworejo, Kutoarjo (di Kabupaten Purworejo) kemudian Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombang (di Kabupaten Kebumen), Tambak, Sumpiuh, Kemranjen (Buntu) di Kabupaten Banyumas, di Buntu terdapat persimpangan yang menuju Cilacap melalui Kroya, menuju Cilacap melalui Maos dan menuju Purwokerto (Gambar 1.1)

3.2 Kajian Karakteristik Kota Gombang

3.2.1 Gambaran Umum Kota Gombang

Kota Gombang terletak sebelah barat Kabupaten Kebumen dan berjarak 21 km dari Ibukota Kabupaten Kebumen, cukup strategis yaitu pada jalur utama selatan Jakarta Yogyakarta (gambar 1.1.). Wilayahnya dibatasi sebelah utara Kecamatan Sempor, sebelah timur Kecamatan Karanganyar, sebelah barat Kecamatan Rowokele dan sebelah selatan Kecamatan Kuwarasan

Pada tahun 1996/1997 pernah diusulkan menjadi kota administratif dengan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Gombang Barat, Kecamatan Gombang Tengah dan Kecamatan Gombang Timur serta 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA
Kecamatan Gombong

KETERANGAN :

- Batas kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Desa

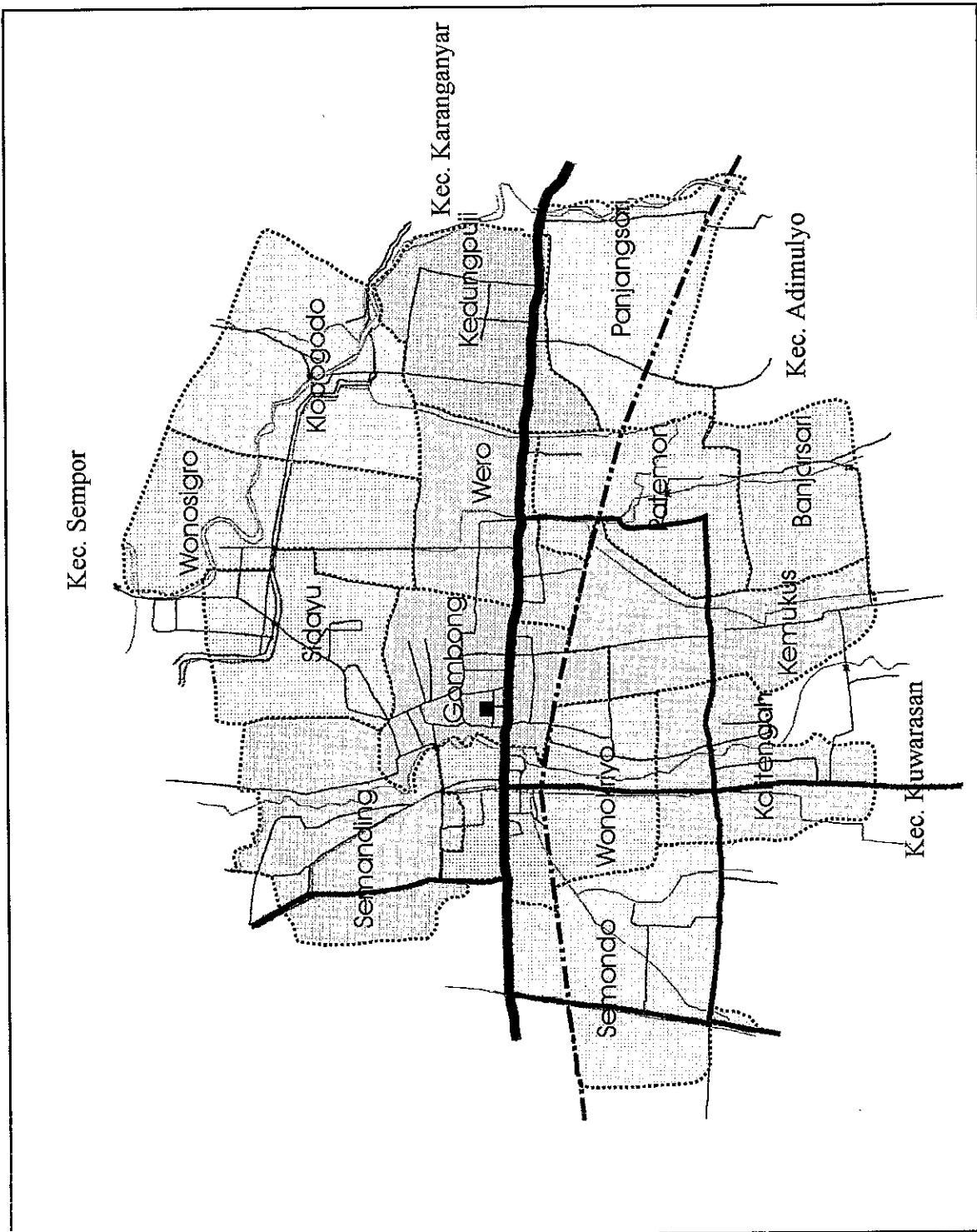


Nomor Gambar : 3.4
Halaman : 96



SKALA 1 : 10.000

Sumber : Bappeda Kab. Kebumen



Menurut Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Gombang 1990-2010, Ibu Kota Kecamatan Gombang terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) desa, yaitu :

1. Kelurahan Gombang
2. Kelurahan Wonokriyo
3. Desa Wero
4. Desa Kalitengah
5. Desa Semanding
6. Desa Sidayu
7. Desa Semondo
8. Desa Kemukus
9. Desa Patemon

Kecamatan Gombang sendiri terdiri dari 14 desa/kelurahan, yaitu : Kelurahan Gombang, Kelurahan Wonokriyo, Desa Wero, Desa Kalitengah, Desa Semanding, Desa Sidayu, Desa Semondo, Desa Kemukus, Desa Patemon, Desa Wonosigro, Desa Klopogodo, Desa Panjangsari, Desa Kedungpuji, dan Desa Banjarsari

Menurut BPS Kabupaten Kebumen, berdasarkan Potensi Desa/Kelurahan Sensus Pertanian 2003, pada saat sekarang Kota Gombang telah meluas hampir ke seluruh wilayah administratif Kecamatan Gombang sehingga dari ke empatbelas desa/kelurahan hanya 1 (satu) yang bukan desa dengan sifat perkotaan, yaitu Desa Panjangsari..

3.2.2 Kondisi Fisik Dasar

Kota Gombang secara topografi memiliki permukaan relatif datar antara 2 %- 10 % dengan ketinggian 13 m diatas permukaan laut. Wilayah Kota Gombang mempunyai temperatur rata-rata 24,4 ° C dan kelembaban rata 86,2 %. Curah hujan rata-rata tahunan

berkisar antara 2.475,2 mm per tahun. Musim hujan jatuh dari bulan Oktober sampai April. Curah hujan minimal jatuh pada bulan Agustus sedangkan maksimal pada bulan Desember.

Ditinjau dari hidrologi, di wilayah Kota Gombong terletak Daerah Aliran Sungai Telomoyo dengan anak sungai, Kali Kruwed dan Kali Cingcingguling yang pada akhirnya bermuara di Samudera Hindia. Kedalaman air tanah rata-rata berkisar antara 2 – 10 m. Ditinjau dari luas tanah menurut penggunaannya maka dari 1.949 Ha, yang berupa sawah 1.060,080 Ha , tegalan 71,820 Ha, pekarangan 711,850 Ha dan lainnya luasnya 105,320 Ha.

3.2.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

3.2.3.1. Kependudukan

A. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kota Gombong pada tahun 2002 (tabel III.4.) sebanyak 50.997 orang dengan pertumbuhan rata-rata 7,6 %. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Desa Wonosigro mencapai 106,5 % sedangkan laju pertumbuhan terkecil di Desa Wonokriyo 15,8 %.

B. Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk di Kota Gombong pada tahun 2002, terbesar di Kelurahan Wonokriyo sebanyak 6796 jiwa atau 13,33 % dan terkecil di Desa Banjarsari sebanyak 1779 jiwa atau 3,49 % (tabel III.6)



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA

Penggunaan Lahan Kecamatan Gombang Triwulan I 2004

KETERANGAN:

- Batas kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Desa
- Kawasan Terbangun
- Sawah
- Kebun Campur (Albasia, Kelapa, Pisang)
- Kuburan
- Kawasan Militer



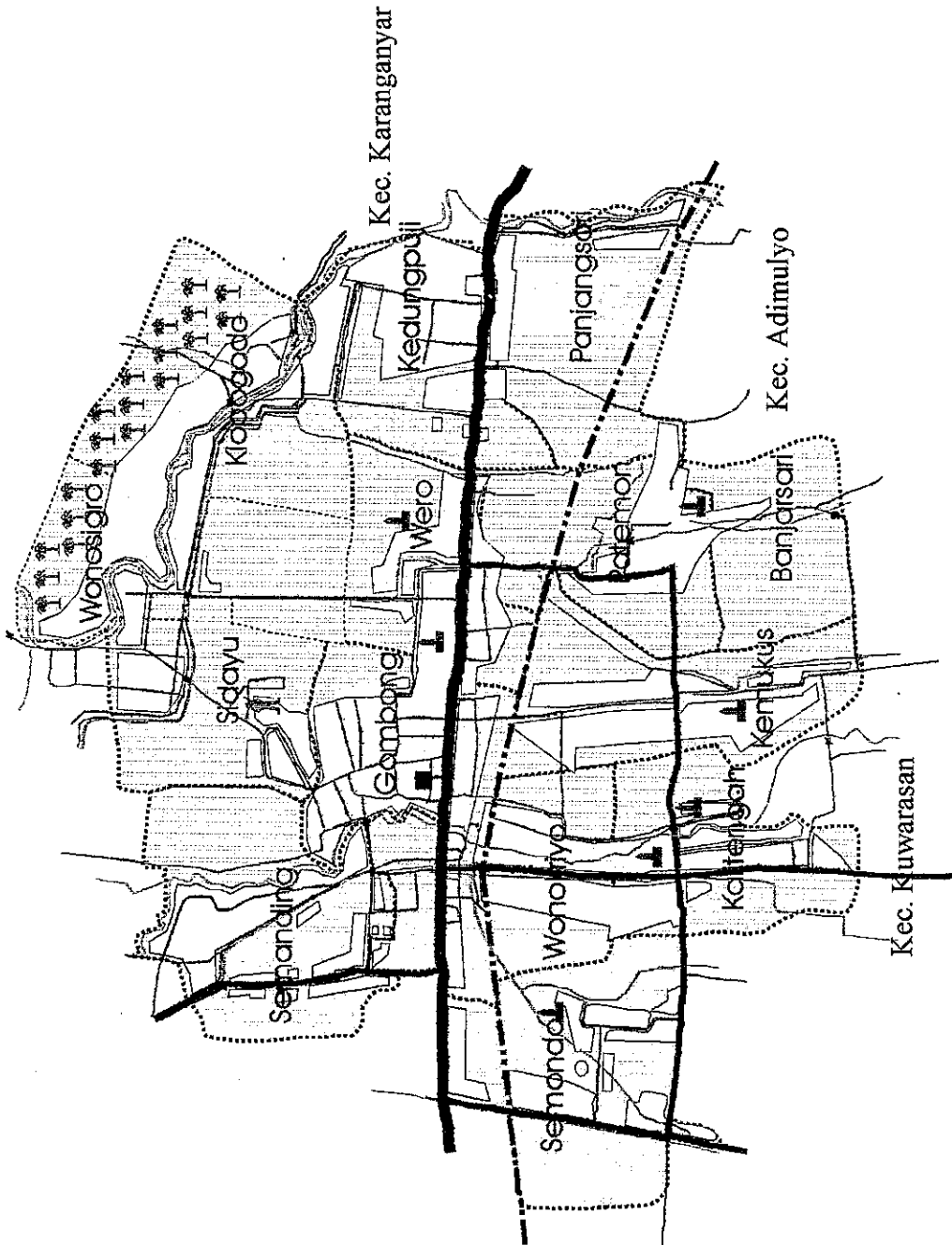
Nomor Gambar : 3.6
Halaman : 99

SKALA 1 : 10.000

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Kebumen, 2004



Kec. Sempor



TABEL III.6
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA GOMBONG

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk		r (%)	Persebaran penduduk 2002
			2001 ¹	2002 ²		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Semondo	1,230	3480	3568	2.5	7.00
2.	Kalitengah	1,657	4834	5013	3.7	9.83
3.	Gombong	1,250	6586	5985	-9.1	11.74
4.	Sidayu	0,760	2751	2525	-8.2	4.95
5.	Wonokriyo	1,610	8076	6796	-15.8	13.33
6.	Semanding	1,710	5032	5144	2.2	10.09
7.	Kemukus	2,000	3340	3512	5.1	6.89
8.	Wonosigro	0,640	1085	2240	106.5	4.39
9.	Klopogodo	1,170	3183	3283	3.1	6.44
10.	Wero	1,320	3975	3627	-8.8	7.11
11.	Panjangsari	1,666	2037	2020	-0.8	3.96
12.	Kedungpuji	1,310	2873	2962	3.1	5.81
13.	Patemon	1,270	2125	2543	19.7	4.99
14.	Banjarsari	1,626	1731	1779	2.8	3.49

¹ Data Buku Potensi Desa Tahun 2001 ² Data Potensi Desa/Kelurahan Sensus Pertanian 2003

C. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Penduduk Kota Gombong apabila ditinjau dari komposisi pendidikan yang ditempuh adalah tidak/belum tamat SD sejumlah 10.841 jiwa, tamat SD sejumlah 14.302 jiwa, tamat SLTP sejumlah 8.252 jiwa, tamat SLTA sejumlah 8.458 jiwa, tamat akademi/diplomat sejumlah 854 jiwa dan Sarjana sejumlah 749 jiwa.

Dari data tersebut maka komposisi penduduk Kota Gombong menurut pendidikan terbesar tamat SD kebawah sebanyak 25.143 atau sebesar 57,86 %.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk di Kota Gombong bekerja di sektor jasa. Pada tahun 2002, penduduk dengan mata pencaharian di sektor jasa sejumlah 6.871 jiwa atau sekitar 32,78 %. Sektor mata pencaharian kedua terbesar adalah lain-lain sejumlah 5.485 jiwa atau 26,17 % berikutnya adalah sektor perdagangan sejumlah 4.377 jiwa atau 20,88 %.

E. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk di Kota Gombong pada tahun 2002, terlihat bahwa usia produktifnya (15-64 tahun) sejumlah 29.115 jiwa atau 61,6 % sedangkan usia tidak produktifnya 18.179 jiwa atau 39,4 %. Dengan kondisi tersebut maka angka ketergantungan di Kota Gombong mencapai 62,44 %.

3.2.3.2. Perekonomian

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kota Gombong, didekati dengan data Kecamatan Gombong, dalam perkembangannya mengalami peningkatan dari sebesar 16,30 % pada tahun 2001 menjadi 12,31 % pada tahun 2002. Peningkatan terjadi pada seluruh sektor ekonomi.

Dilihat dari perkembangan peranan persektor menurut harga konstan 1993 antara tahun 1999-2002 maka sektor listrik, gas dan air minum berada di urutan pertama yakni sebesar 11,27 %, kemudian disusul sektor bangunan dan konstruksi sebesar 11,19 % sektor-sektor jasa sebesar 16,84 %, dan sektor industri pengolahan sebesar 9,01 %. Sementara sektor jasa mengalami penurunan 1,59 %.

B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan perekonomian Kota Gombong ini dicerminkan oleh adanya peningkatan besarnya Produk Domestik Regional Bruto menurut harga berlaku pada tahun

2000 sebesar Rp. 136.103.210.650 (seratus tigapuluh enam milyar seratus tiga juta duaratus sepuluh ribu enamratus limapuluh rupiah) dan pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 177.481.118.155 (seratus tujuh puluh tujuh milyar empatratus delapan puluh satu juta seratus delapan belas ribu seratus limapuluh lima rupiah) sedangkan menurut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2000 sebesar Rp. 61.224.553.010 (enam puluh satu milyar duaratus duapuluh empat juta limaratus limapuluh tiga ribu sepuluh rupiah) bertambah menjadi Rp. 64.873.412.130 (enam puluh empat milyar delapanratus tujuh puluh tiga juta empatratus duabelas ribu seratus tigapuluh rupiah) pada tahun 2002.

TABEL III.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KECAMATAN GOMBONG
BERDASARKAN HARGA BERLAKU (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	29.679.247,31	35.508.179,77	41.282.692,43	44.721.916,78
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.214.798,09	0	0	283.604,92
3.	Industri Pengolahan	19.777.980,78	13.858.390,56	15.509.772,40	17.962.444,24
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	1.341.081,70	324.367,28	145.438,82	248.225,15
5.	Bangunan dan Konstruksi	3.856.828,28	5.254.341,24	6.047.635,34	7.559.294,94
6.	Perdagangan	70.669.947,98	22.241.873,17	24.906.762,08	27.611.611,32
7.	Angkutan dan Komunikasi	15.281.699,27	16.887.005,40	21.197.219,10	24.958.412,22
8.	Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa perusahaan	11.312.653,98	10.920.427,75	10.984.466,05	12.380.068,89
9.	10. Jasa-jasa	39.492.800,65	31.108.625,47	38.210.888,63	41.755.539,68
	Total PDRB	192.742.443,85	136.103.210,65	158.284.874,85	177.481.118,15
	Jumlah Penduduk pertengahan tahun	51.995	47.852	47.975	48.040
	PDRB per kapita (Rp)	3.706.941,90	2.777.747	3.337.864	3.694.274

Sumber: PDRB Kabupaten Kebumen 1999, 2002

C. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat didekati dengan menggunakan angka PDRB per kapita yaitu hasil bagi antara total PDRB dengan penduduk pertengahan tahun yang sama. Pada tahun 2002 terlihat PDRB menurut harga berlaku per kapita Rp. 3.694.274 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau meningkat 10,68 % dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 3.337.864. (tiga juta tigaratus tigapuluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh empat rupiah) Selain itu pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita di Kota Gombong selama empat tahun terakhir atas dasar harga berlaku sebesar 1,44 % dan atas harga konstan 1993 mencapai 4,07 %.

TABEL III 8.
PDRB KECAMATAN GOMBONG
BERDASARKAN HARGA KONSTAN 1993 (RIBUAN RUPIAH)

No	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	9.064.764,65	13.624.564,05	14.419.767,61	14.447.239,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	709.380,51	0	0	94.091,77
3.	Industri Pengolahan	10.643.390,21	6.222.258,87	6.274.114,86	6.410.245,84
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	1.154.439,76	144.619,23	53.776,44	59.838,95
5.	Bangunan dan Konstruksi	2.336.734,57	3.043.815,73	3.095.480,15	3.441.788,57
6.	Perdagangan	34.287.803,98	9.453.893,85	9.497.373,54	9.722.199,30
7.	Angkutan dan Komunikasi	8.167.296,34	7.947.960,20	8.466.085,76	8.762.597,77
8.	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	6.074.234,70	5.109.882,99	4.706.581,23	4.796.548,98
9.	Jasa-jasa	21.611.733,71	15.677.558,09	17.416.059,83	17.138.861,10
	Total PDRB	94.049.760,43	61.224.553,01	63.929.239,42	64.873.412,13
	Jumlah Penduduk pertengahan tahun	51.995	47.852	47.975	48.040
	PDRB per kapita (Rp)	1.808.823,16	1.279.457	1.332.553	1.350.404

Sumber: PDRB Kabupaten Kebumen 1999, 2002

3.2.4. Perwilayahan Perencanaan Ibu Kota Kecamatan Gombang

Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota Gombang pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Gombang (RUTRK-IKK) tahun 1990-2010, pembagian wilayah Kota Gombang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

◆ BWK I	: Kelurahan Wonokriyo	seluas 121,00 Ha
◆ BWK II	: Kelurahan Gombang	seluas 125,00 Ha
◆ BWK III	: Desa Semondo	seluas 123,00 Ha
◆ BWK IV	: Desa Sidayu	seluas 76,00 Ha
	Desa Semanding	seluas 171,00 Ha
◆ BWK V	: Desa Wero	seluas 132,98 Ha
	Desa Patemon	seluas 127,00 Ha
◆ BWK VI	: Desa Kemukus	seluas 192,00 Ha
	Desa Kalitengah	seluas 218,79 Ha

3.2.5. Kondisi Fasilitas Kota Gombang

3.2.5.1. Fasilitas Sosial, Ekonomi serta Sarana dan Prasarana Perhubungan

A. Fasilitas Pendidikan

Kota Gombang memiliki fasilitas pendidikan dasar mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Akademi. Jumlah TK di Gombang 43 sekolah dengan murid 1.280 orang dan diampu oleh 79 guru. SD berjumlah 39 sekolah, 3 diantaranya swasta. Jumlah murid SD sebanyak 6.356 siswa dengan guru berjumlah 286 orang diantaranya yang berstatus PNS sebanyak 226 orang, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), di Kota Gombang berjumlah 4 buah semuanya swasta dengan jumlah siswa 411 orang.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

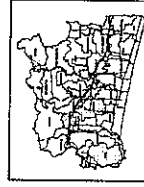
KOTA GOMBONG: SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA

KOTA GOMBONG BERDASARKAN RUTRK IKK 1990-2010

KETERANGAN:

	Batas kabupaten		BWK I
	Batas Kecamatan		BWK II
	Batas Desa		BWK III
	Jalan		BWK IV
	Rel KA		BWK V
	Sungai		BWK VI
	Kantor Kecamatan		
	Desa		

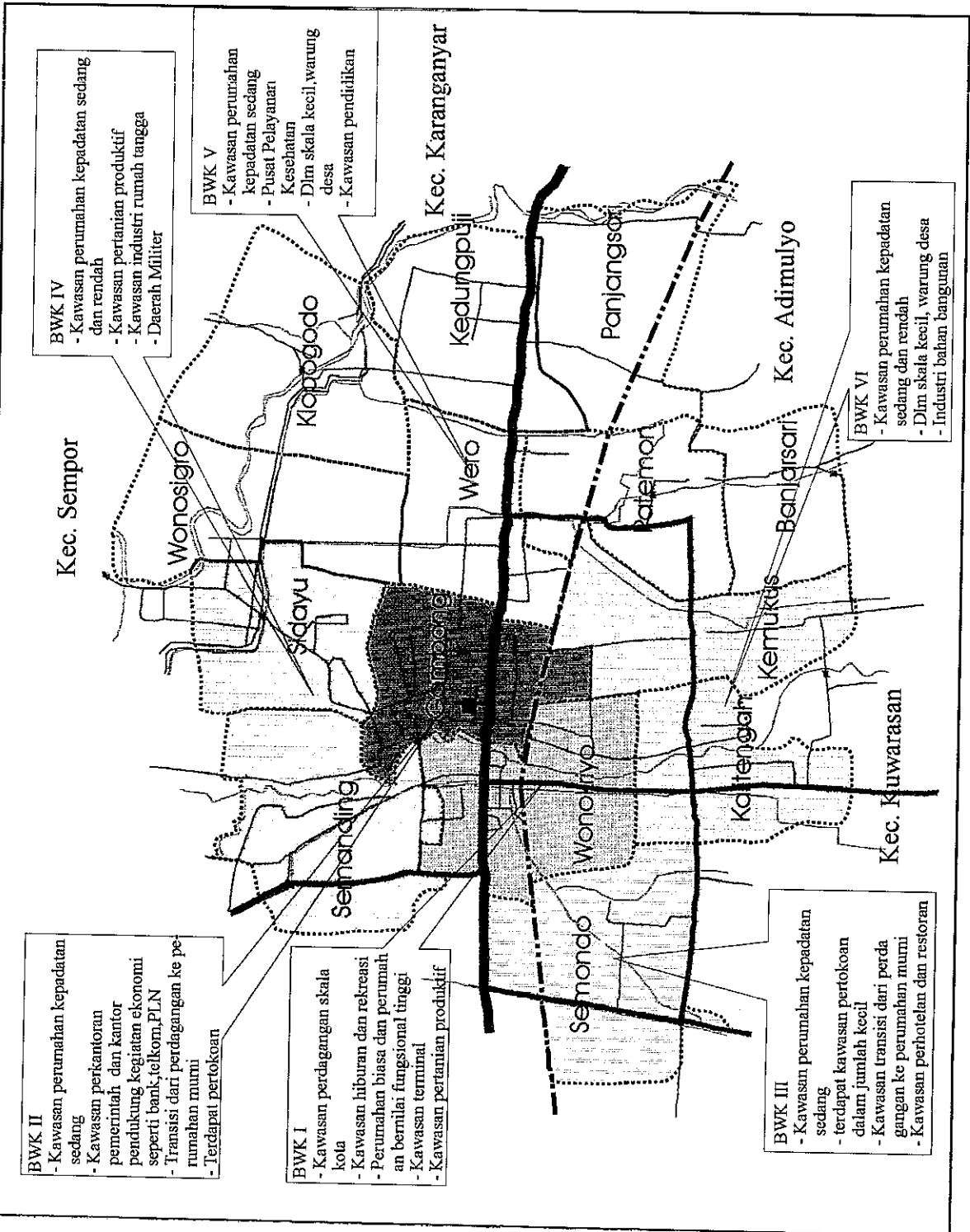


Nomor Gambar : 3.6
Halaman : 105



SKALA 1 : 10.000

Sumber : RUTRK IKK Gombong 1990-2010



Sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kota Gombong terdiri 4 SLTP Negeri dengan murid sebanyak 2.256 siswa, SLTP Swasta berjumlah 4 dengan murid 1.473 siswa dan 1 (satu) MTs Negeri dengan jumlah siswa 606 orang.

Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Kota Gombong memiliki 1 SMU Negeri dengan siswa 839 orang, SMU Swasta 4 buah dengan siswa 1.833 orang, SMK Swasta rumpun ekonomi 4 buah dengan siswa 1.899 orang, SMK Negeri rumpun teknik dengan siswa 460 orang, SMK swasta rumpun teknik 3 buah dengan jumlah siswa 2.044 orang dan sebuah Madrasah Aliyah dengan murid 155 orang.

Kota Gombong memiliki sebuah Akademi Perawat (AKPER) Muhammadiyah dengan jumlah mahasiswa 301 orang.

B. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Kota Gombong terdiri 40 buah Masjid, 61 buah musholla, 7 buah gereja dan 1 vihara.

C. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Gombong lebih lengkap daripada Kota Kebumen. Di Kota Gombong terdapat 2 buah Rumah Sakit Umum swasta yang besar yaitu RS PKU Muhammadiyah dan RS Palang Biru dan sebuah Puskesmas dengan rawat inap. Jangkauan pelayanan ke dua rumah sakit swasta tersebut sangat luas terutama di wilayah barat Kabupaten Kebumen, karena memiliki kelengkapan seperti dokter spesialis yang cukup lengkap. Sedangkan rumah sakit bersalinnya ada dua buah. Jumlah apotek yang ada di Kota Gombong sebanyak 3 buah dan memiliki 4 buah toko obat.

D. Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi yang ada di Kota Gombong adalah terdapatnya Pasar Wonokriyo dan beberapa kelompok pertokoan. Pada saat persiapan rencana Kota Gombong dijadikan kotatip telah dibuat juga Pasar Hewan. Tetapi sekarang secara administratif pasar tersebut terletak di Kecamatan Buayan, tepatnya di Desa Purbowangi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdapat beberapa kelompok pertokoan. Pertokoan tersebut terutama terletak di jalan utama Kota Gombong yang juga merupakan jalan utama lintas selatan. Dengan lokasi kota di jalur utama maka terdapat beberapa hotel, restoran dan warung makan. Toko dan warung tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Gombong.

Kota Gombong juga memiliki beberapa industri, antara lain pabrik cat tembok, industri pengolahan kayu, industri pengolahan kacang tanah dan beberapa industri rumah tangga.

F. Fasilitas Hiburan

Fasilitas hiburan yang ada di Kota Gombong adalah tempat pariwisata Benteng Van Der Wijck, yang terletak di dalam kompleks Komando Pendidikan TNI AD. Tempat pariwisata ini dikelola oleh swasta dan menawarkan berbagai fasilitas terutama taman bermain anak.

G. Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik akan memperlancar perkembangan wilayah, karena membantu memperlancar proses sebaran kegiatan, barang dan jasa dari maupun ke Kota Gombong.

Kota Gombong di lalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan Purwokerto-Kebumen-Purworejo. Kota Gombong merupakan simpul penghubung antara jalur

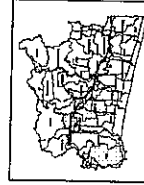


PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KOTA GOMBONG: SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA
Fasilitas Kota Gombang

- KETERANGAN:**
- Batas kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Jalan
 - Rel KA
 - Sungai
 - Kantor Kecamatan
 - Desa
 - Fasilitas Pendidikan/Akademi Perawat
 - Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas
 - Fasilitas Pasar
 - Fasilitas Hiburan/Benteng Van Der Wijck
 - Terminal Non Bus
 - Stasiun Kereta Api
 - Terminal Bus
 - Fasilitas Pendidikan/SD
 - Fasilitas Pendidikan/SLTP
 - Fasilitas Pendidikan/SLTA

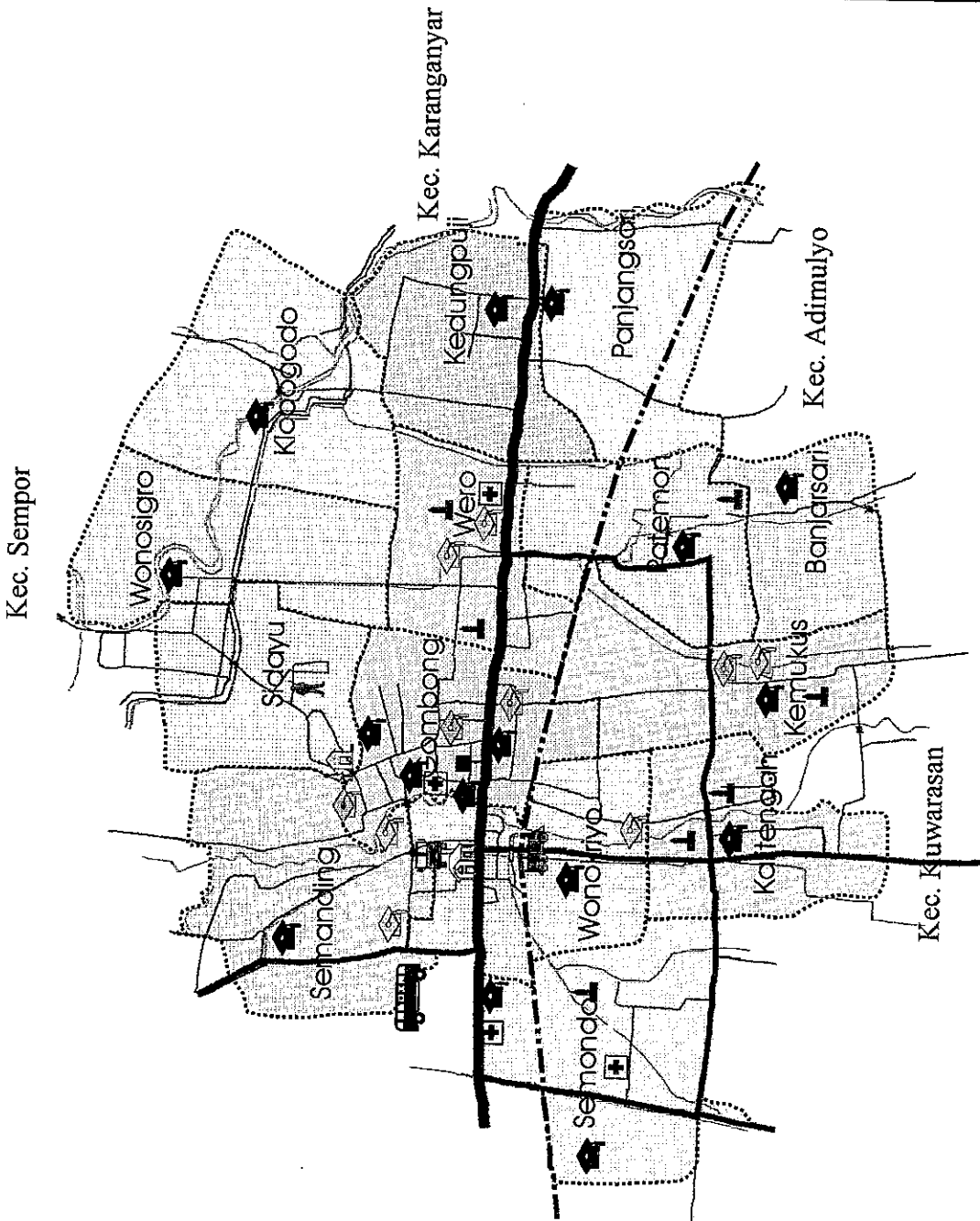


Nomor Gambar : 3.7
Halaman : 108

SKALA 1 : 10.000



Sumber : RUTRKK Gombang 1990-2010, Pertanahan dan Survey



Banjarnegara-Gombong dengan jalur utama tersebut. Kondisi tersebut memberikan keuntungan sebagai modal pengembangan Kota Gombong. Hal ini disebabkan karena Kota Gombong memiliki hubungan tidak hanya dalam skala kabupaten tetapi juga memiliki aksesibilitas regional yang menerus sehingga mobilitasnya tinggi.

Kota Gombong memiliki terminal bus, akan tetapi kurang berfungsi, dan stasiun kereta api. Sistem transportasi antar kota dilayani oleh bus dan non bus yang melewati jalan propinsi Gombong-Kebumen-Prembun untuk lalu lintas yang bersifat regional dan menerus.

Trayek angkutan umum antar kota antar propinsi yang melintasi Gombong antara lain Tasikmalaya-Semarang, Yogyakarta-Bandung, Solo-Bandung, dan Surabaya – Bandung. Sedangkan dalam propinsi antara lain Purwokerto- Semarang, Cilacap-Semarang dan Gombong-Semarang.

Jalur Gombong – Kebumen termasuk padat, terlihat bahwa trayek dalam kabupaten yang termasuk dominan adalah trayek angkutan umum penumpang jalur Jatijajar-Gombong-Petanahan-Kebumen-Prembun , tersedia 58 buah minibus kapasitas 14-16 tempat duduk dan Jatijajar-Gombong-Karanganyar-Petanahan-Kebumen tersedia 38 minibus kapasitas 14-16 tempat duduk sehingga apabila dihitung keseluruhan trayek dalam kabupaten maka antara Gombong-Kebumen tersedia kurang lebih 128 minibus dengan kapasitas setiap bus antara 12-16 tempat duduk.

Kota Gombong merupakan salah satu simpul transportasi penting di di Kabupaten Kebumen dengan adanya angkutan umum pedesaan. Trayek angkutan penumpang pedesaan yang berpusat di Kota Gombong sejumlah 16 trayek angkutan umum penumpang (lampiran D). Trayek-trayek ini yang melayani daerah sekitar Kota Gombong.

BAB IV

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

Analisis Kota Gombang sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan terdiri dari lima analisis yang dibagi dalam empat tahapan analisis. Pada tahap pertama dilakukan analisis peran Kota Gombang yang terdiri dari analisis ekonomi wilayah berupa analisis tipologi ekonomi wilayah dan analisis keterkaitan aktivitas perekonomian. dan tahapan analisis kedua adalah analisis wilayah pengaruh.

Sedangkan tahapan analisis ketiga nantinya adalah analisis hirarki kota dan tahapan analisis keempat adalah analisis yang mempunyai keterkaitan, dengan analisis analisis sebelumnya , yaitu analisis peranan Kota Gombang sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah terhadap sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen. Output yang dihasilkan dalam analisis peran kota, wilayah pengaruh dan sistem kota-kota merupakan input dalam analisis keempat, dimana nantinya analisis keempat akan dibantu dengan data primer berupa hasil survei primer wawancara dengan masyarakat yang selanjutnya akan dideskripsikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan untuk dapat mendukung analisis kuantitatif, selain untuk analisis peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Kebumen, analisis kualitatif akan disisipkan juga pada setiap tahapan analisis untuk membantu analisis yang lain.

4.1. Analisis Peran Kota Gombang

Peran Kota Gombang di lakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tipologi ekonomi ekonomi wilayah, dari sektor basis tersebut dilihat interaksi ekonomi

dengan daerah lain. Hasil analisis interaksi ekonomi dijadikan masukan dalam analisis peran Kota Gombong.

4.1.1. Analisis Tipologi Ekonomi Wilayah

Analisis ini dilakukan guna mengetahui keunggulan sektor atau aktivitas ekonomi di Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Gombong. Dengan melihat tipologi perekonomian wilayah maka suatu pertumbuhan wilayah dapat dilihat, karena kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah (Alkadri et al., 1999: 17).

Tahapan analisis ini akan mencari keunggulan ekonomi wilayah Kabupaten Kebumen pada sektor tertentu yang hasilnya akan dijadikan acuan bagi perhitungan keunggulan ekonomi pada wilayah kecamatan. Jika dari hasil analisis didapat keunggulan sektor ekonomi yang sama akan dapat ditentukan korelasi tipologi ekonomi antara Kabupaten Kebumen dan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen.

Tipologi ekonomi wilayah didekati dengan menggunakan sektor basis suatu wilayah yaitu dengan analisis *Location Quotient (LQ)*. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung koefisien *LQ* dapat berupa satuan jumlah buruh, hasil produksi, atau satuan lainnya.

Dalam penelitian ini untuk menghitung *LQ* digunakan satuan hasil produksi berupa data sektor-sektor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Sektor-sektor dalam PDRB adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian
 - 1.1 Sub sektor Tanaman Bahan Makanan
 - 1.2 Sub Sektor Tanaman Perdagangan dan perkebunan rakyat
 - 1.3 Sub Sektor Peternakan dan Hasilnya

1.4 Sub Sektor Kehutanan dan Hasilnya

1.5 Sub Sektor Perikanan

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Sektor Bangunan dan Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi
8. Sektor Lembaga Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

Berdasarkan perhitungan *LQ* Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah acuan maka rumus untuk perhitungan *Location Quotient (LQ)* tersebut adalah sebagai berikut (Warpani, 1984: 68):

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N} \quad \dots\dots(7)$$

Dimana :

S_i = PDRB sektor ekonomi i di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

S = Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen

N_i = Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas,
di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya, dimana dalam
penelitian ini adalah Jawa Tengah

N = Jumlah PDRB di daerah acuan yang lebih luas, dimana dalam penelitian ini
adalah Jawa Tengah

Dari hasil perhitungan LQ Kabupaten Kebumen maka di dapatkan sektor-
sektor basis Kabupaten Kebumen seperti pada tabel IV.1, sebagai berikut:

TABEL IV.1
PERHITUNGAN LQ KABUPATEN KEBUMEN

No	Lapangan Usaha	PDRB TAHUN 2002		LQ	
		Kebumen	Jawa Tengah		
1	Pertanian	378,476,527.16	8,598,967.98	1.98	basis
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	248,859,715.90	5,284,475.59	2.12	basis
	1.2 Tanaman Perdagangan dan perkebunan rakyat	29,005,333.70	506,897.71	2.57	basis
	1.3 Peternakan dan Hasilnya	29,319,843.99	1,820,013.42	0.72	non basis
	1.4 Kehutanan dan Hasilnya	64,673,006.55	331,408.38	8.77	basis
	1.5 Perikanan	6,618,627.03	656,172.88	0.45	non basis
2	Pertambangan dan Penggalian	47,846,330.87	642,027.09	3.35	basis
3	Industri Pengolahan	88,050,858.44	12,819,594.90	0.31	non basis
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8,256,307.34	509,108.39	0.73	non basis
5	Bangunan dan Konstruksi	19,781,501.78	1,693,045.33	0.52	non basis
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	142,024,269.37	10,092,087.90	0.63	non basis
7	Angkutan dan Komunikasi	42,876,989.12	2,219,896.60	0.87	non basis
8	Lembaga Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	51,256,204.30	1,622,747.76	1.42	basis
9	Jasa-jasa	163,012,508.86	4,107,700.47	1.78	basis
TOTAL PDRB		941,581,497.32	42,305,176.42		

Sumber Hasil Analisis, 2004

Berdasarkan tabel perhitungan LQ diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kebumen mempunyai sektor basis sebagai berikut :

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor basis terbesar di Kabupaten Kebumen, dengan nilai LQ sebesar 3,35.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen mampu mencukupi kebutuhan akan sektor pertambangan dan penggalian dan cenderung mampu melayani kebutuhan wilayah di sekitarnya.

Di Kabupaten Kebumen terdapat beberapa bahan galian C, antara lain Kecamatan Rowokele berupa penambangan kapur, Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Sruweng dengan galian tanah liat untuk bahan baku industri batu bata dan genteng

2. Sektor Pertanian juga merupakan sektor basis bagi Kabupaten Kebumen, dengan nilai LQ sebesar 1,98. Dimana sub sektor kehutanan mempunyai nilai LQ yang tinggi yaitu sebesar 8,77, kemudian sub sektor tanaman perdagangan dan perkebunan rakyat dengan nilai LQ sebesar 2,57. Hal ini berarti Kabupaten Kebumen dapat mencukupi kebutuhan akan pertanian dan juga dapat mengekspor hasil pertanian.
3. Sektor Jasa-jasa dengan nilai LQ sebesar 1,78 merupakan sektor basis, artinya Kabupaten Kebumen sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya akan jasa-jasa dan dapat melayani daerah lain.
4. Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai LQ sebesar 1,42, Hal ini menunjukkan sektor basis sehingga mampu mencukupi kebutuhan akan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta mampu melayani kebutuhan wilayah sekitarnya. Hal ini sangat terkait dengan keberadaan lembaga keuangan yang ada.

Tipologi ekonomi di Kecamatan Gombang dilakukan dengan pendekatan sektor basis. Sektor basis di Kecamatan Gombang diperhitungkan terhadap Kabupaten Kebumen (Lampiran B), dengan rumus

$$LQ = \frac{Si / Ni}{S / N} = \frac{Si / S}{Ni / N} \dots\dots(4)$$

Dimana :

S_i = PDRB sektor ekonomi i di Kecamatan Gombang

S = Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi Kecamatan Gombang

N_i = Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah Kabupaten Kebumen

N = Jumlah PDRB di Kabupaten Kebumen

Sehingga didapat hasil sebagaimana tabel IV.2.

TABEL IV.2
PERHITUNGAN LQ KECAMATAN GOMBONG

NO	Sektor	LQ	Keterangan
1	2	3	4
1	Pertanian	0.58	non basis
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	0.60	non basis
	1.2. Tan. Perdag & Bun Rakyat	0.21	non basis
	1.3. Peternakan dan hasilnya	0.88	non basis
	1.4. Kehutanan dan hasilnya	0.58	non basis
	1.5. Perikanan	0.17	non basis
2	Pertambangan dan Galian	0.03	non basis
3	Industri Pengolahan	1.11	basis
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0.11	non basis
5	Bangunan dan Konstruksi	2.65	basis
6	Perdagangan	1.04	basis
7	Angkutan dan komunikasi	3.11	basis
8	Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1.42	basis
9	Jasa-jasa	1.60	basis

Sumber : Lampiran B, Perhitungan LQ : 2004

Berdasarkan tabel perhitungan LQ diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gombang mempunyai sektor basis sebagai berikut :

1. Sektor Angkutan dan Komunikasi merupakan sektor basis terbesar di Kecamatan Gombang, dengan nilai LQ sebesar 3,11.

Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gombang mampu mencukupi kebutuhan akan sektor Angkutan dan Komunikasi dan mampu melayani kebutuhan wilayah lainnya.

2. Sektor Bangunan dan Konstruksi merupakan sektor basis Kecamatan Gombang dengan nilai 2,66 sehingga sektor ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Gombang dan daerah lainnya.
3. Sektor Jasa-jasa merupakan sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,60, artinya Kecamatan Gombang sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya terhadap jasa-jasa dan mampu menyediakan untuk daerah lainnya.
4. Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki nilai LQ sebesar 1,42. Yang berarti merupakan sektor basis karena mampu mencukupi kebutuhan akan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta mampu melayani kebutuhan wilayah lainnya. Hal ini sangat terkait dengan kehadiran lembaga perbankan yang ada.
5. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,11, artinya Kecamatan Gombang sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya serta memenuhi untuk daerah lainnya.
6. Sektor Perdagangan merupakan sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,04, artinya Kecamatan Gombang sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya serta memenuhi untuk daerah lainnya.

Agar dapat diketahui tentang kesesuaian sektor basis Kabupaten Kebumen dan sektor basis Kecamatan Gombang, maka hasil perhitungan LQ Kabupaten Kebumen dan LQ Kecamatan Gombang dipersandingkan seperti pada tabel IV.3.

TABEL IV. 3.
PERBANDINGAN *LQ*
KABUPATEN KEBUMEN DAN KECAMATAN GOMBONG

No	Lapangan Usaha	<i>LQ</i> Kabupaten Kebumen terhadap Jawa Tengah	<i>LQ</i> Kec. Gombong terhadap Kabupaten Kebumen
1	2	3	4
1	Pertanian	1.98	0.58
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	2.12	0.60
	1.2 Tanaman Perdagangan dan perkebunan rakyat	2.57	0.21
	1.3 Peternakan dan Hasilnya	0.72	0.88
	1.4 Kehutanan dan Hasilnya	8.77	0.58
	1.5 Perikanan	0.45	0.17
2	Pertambangan dan Penggalian	3.35	0.03
3	Industri Pengolahan	0.31	1.11
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.73	0.11
5	Bangunan dan Konstruksi	0.52	2.65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.63	1.04
7	Angkutan dan Komunikasi	0.87	3.11
8	Lembaga Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.42	1.42
9	Jasa-jasa	1.78	1.60

Sumber : Hasil analisis, 2004

Pada Tabel IV.3, terlihat bahwa dari hasil perbandingan *LQ* didapatkan persamaan sektor basis yang terdapat di Kecamatan Gombong dan Kabupaten Kebumen yaitu pada sektor :

- ◆ Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- ◆ Sektor Jasa-jasa

Sementara sektor basis di Kabupaten Kebumen yang bukan sektor basis di Kecamatan Gombong adalah sektor :

- ◆ Sektor Pertambangan dan Penggalian
- ◆ Sektor Pertanian

Sedangkan sektor basis di Kecamatan Gombang tetapi bukan sektor basis Kabupaten Kebumen yaitu sektor :

- ◆ Sektor Angkutan dan Komunikasi
- ◆ Sektor Bangunan dan Konstruksi
- ◆ Sektor Industri Pengolahan
- ◆ Sektor Perdagangan

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa Kabupaten Kebumen sektor basisnya merupakan sektor primer dan tersier, sedangkan Kecamatan Gombang sektor basisnya adalah sekunder dan tersier dan tidak memiliki sektor basis primer. Apabila ditinjau dari struktur perekonomian, dimana tidak terdapat sektor primer sebagai sektor basis maka Kecamatan Gombang memiliki ciri perekonomian perkotaan.

Berdasarkan hasil perhitungan *LQ* kecamatan di seluruh Kabupaten Kebumen, maka sektor basis setiap kecamatan seperti pada tabel IV.4. Pada tabel IV.4 kolom keterangan tercantum sub sektor pertanian yang menjadi sub sektor basis, hal ini di sebabkan pada berapa kecamatan seperti Kecamatan Klirong, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng, Rowokele dan Sempor, sektor pertanian tidak termasuk sektor basis tetapi terdapat beberapa sub sektor yang menjadi sub sektor basis.

TABEL IV.4
SEKTOR BASIS PADA SETIAP KECAMATAN

NO	Nama Kecamatan	Sektor Basis	Keterangan
1	2	3	4
1	AYAH	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Bangunan dan konstruksi 4. Perdagangan	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Peternakan dan hasilnya - Kehutanan dan hasilnya - Perikanan

Ianjutan

NO 1	Nama Kecamatan 2	Sektor Basis 3	Keterangan 4
2	BUAYAN	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Galian	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Peternakan dan hasilnya - Kehutanan dan hasilnya - Perikanan
3	PURING	1. Pertanian 2. Bangunan dan konstruksi 3. Perdagangan	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Peternakan dan hasilnya - Kehutanan dan hasilnya
4	PETANAHAN	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Perdagangan 4. Jasa-jasa	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Peternakan dan hasilnya - Kehutanan dan hasilnya
5	KLIRONG	1. Pertambangan dan Galian 2. Industri Pengolahan 3. Jasa-jasa	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat
6	BL PESANTREN	1. Pertanian 2. Jasa-jasa	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Peternakan dan hasilnya
7	AMBAL	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Bangunan dan konstruksi	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Kehutanan dan hasilnya
8	MIRIT	1. Pertanian	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Kehutanan dan hasilnya - Perikanan

lanjutan

NO	Nama Kecamatan	Sektor Basis	Keterangan
1	2	3	4
9	PREMBUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Angkutan dan komunikasi 3. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4. Jasa-jasa 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Peternakan dan hasilnya
10	KUTOWINANGUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan 2. Angkutan dan komunikasi 3. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4. Jasa-jasa 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Kehutanan dan hasilnya
11	ALIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Galian 3. Bangunan dan konstruksi 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Kehutanan dan hasilnya
12	KEBUMEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik, Gas dan Air minum 2. Perdagangan 3. Angkutan dan komunikasi 4. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5. Jasa-jasa 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Peternakan dan hasilnya
13	PEJAGOAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Galian 2. Industri Pengolahan 3. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 	
14	SRUWENG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Galian 2. Industri Pengolahan 3. Bangunan dan konstruksi 4. Jasa-jasa 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat
15	ADIMULYO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Galian 3. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4. Jasa-jasa 	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat

Lanjutan

NO 1	Nama Kecamatan 2	Sektor Basis 3	Keterangan 4
16	KUWARASAN	1. Pertanian 2. Bangunan dan konstruksi 3. Perdagangan 4. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5. Jasa-jasa	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Kehutanan dan hasilnya
17	ROWOKELE	1. Pertambangan dan Galian 2. Industri Pengolahan	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Kehutanan dan hasilnya - Perikanan
18	SEMPOR	1. Listrik, Gas dan Air minum 2. Bangunan dan konstruksi 3. Perdagangan 4. Angkutan dan komunikasi	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Kehutanan dan hasilnya
19	GOMBONG	1. Industri Pengolahan 2. Bangunan dan konstruksi 3. Perdagangan 4. Angkutan dan komunikasi 5. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6. Jasa-jasa	
20	KARANGANYAR	1. Bangunan dan konstruksi 2. Perdagangan 3. Angkutan dan komunikasi 4. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5. Jasa-jasa	
21	KARANGAYAM	1. Pertanian 2. Bangunan dan konstruksi	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Peternakan dan hasilnya - Kehutanan dan hasilnya

lanjutan

NO	Nama Kecamatan	Sektor Basis	Keterangan
1	2	3	4
22	SADANG	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Galian	Subsektor pertanian yang menjadi basis adalah : - Tanaman Bahan Makanan - Tanaman Perdagangan dan Perkebunan Rakyat - Kehutanan dan hasilnya

Sumber: Hasil analisis, 2004

Kecamatan yang memiliki sektor basis paling banyak adalah Kecamatan Gombang sejumlah 6 sektor yang semuanya sektor sekunder dan sektor tersier. Kecamatan yang memiliki sektor basis paling sedikit adalah Kecamatan Mirit yang hanya mempunyai satu sektor basis yaitu sektor pertanian.

Kecamatan Buayan, Mirit dan Sadang, sektor basisnya merupakan sektor primer pertanian maupun pertambangan dan galian. Sektor-sektor basis di Kabupaten Kebumen dapat ditinjau dari persebaran sektor basis sesuai dengan kecamatan, seperti pada tabel IV.5.

TABEL IV.5
PERSEBARAN SEKTOR DI KABUPATEN KEBUMEN

No	Lapangan Usaha	Kecamatan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pertanian (primer)	Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Bulus Pesantren, Ambal, Mirit, Prembun, Alian, Adimulyo, Kuwarasan, Karanggayam, Sadang	13
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	Puring, Petanahan, Bulus Pesantren, Ambal, Mirit, Alian, Adimulyo, Kuwarasan, Karanggayam, Sadang	10
	1.2 Tanaman Perdagangan dan perkebunan rakyat	Ayah, Puring, Petanahan, Klirong, Mirit, Prembun, Alian, Sruweng, Adimulyo, Rowokele, Sempor, Karanggayam, Sadang	13

Ianjutan

No	Lapangan Usaha	Kecamatan	Jumlah
1	2	3	4
	1.3 Peternakan dan Hasilnya	Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Bulus Pesantren, Prembun, Kebumen, Karanggayam	8
	1.4 Kehutanan dan Hasilnya	Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Ambal, Mirit, Kutowinangun, Alian, Kuwarasan, Rowokele, Sempor, Karanggayam, Sadang	13
	1.5 Perikanan	Ayah, Buayan, Mirit, Rowokele	4
2	Pertambangan dan Penggalian (primer)	Buayan, Klirong, Alian, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, Rowokele, Sadang.	8
3	Industri Pengolahan (sekunder)	Ayah, Petanahan, Klirong, Ambal, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Gombong	8
4	Listrik, Gas dan Air Bersih (sekunder)	Kebumen, Sempor	2
5	Bangunan dan Konstruksi (sekunder)	Ayah, Puring, Ambal, Alian, Sruweng, Kuwarasan, Sempor, Gombong, Karanganyar, Karanggayam	10
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran (tersier)	Ayah, Puring, Petanahan, Kutowinangun, Kebumen, Kuwarasan, Sempor, Gombong, Karanganyar	9
7	Angkutan dan Komunikasi (tersier)	Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sempor, Gombong, Karanganyar	6
8	Lembaga Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan (tersier)	Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Adimulyo, Kuwarasan, Gombong, Karanganyar	8
9	Jasa-jasa (tersier)	Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng, Adimulyo, Kuwarasan, Gombong, Karanganyar	11

Sumber : Hasil analisis, 2004

Berdasarkan persebaran sektor basis terlihat bahwa sektor pertanian menjadi sektor basis pada 13 kecamatan dan ada 6 kecamatan yang tidak memiliki sektor basis pertanian tetapi memiliki basis pada sub sektor pertanian.

Sektor listrik, gas dan air minum memiliki persebaran paling kecil, merupakan basis pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Sempor.

Dari hasil perhitungan sektor basis pada kecamatan di sekitar Kota Gombang yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring maka di dapatkan hasil-hasil sebagai berikut :

- A. Sektor primer pertanian menjadi sektor basis di Kecamatan Kuwarasan, Buayan, Karanggayam, Ayah dan Puring.

Kecamatan Kuwarasan, Buayan, Karanggayam dan Puring, merupakan daerah pertanian dengan pekerjaan utama warga desa adalah petani, baik pemilik lahan maupun penggarap. Kecamatan Ayah dan Buayan memiliki tempat pendaratan ikan sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian.

- B. Sektor primer pertambangan dan galian menjadi sektor basis di Kecamatan Rowokele

Kecamatan Rowokele memiliki tambang kapur dan tobong pengolahannya di beberapa desa dan ditunjang oleh deposit kapur di perbukitan kapur.

- C. Sektor sekunder industri pengolahan menjadi sektor basis di Kecamatan Ayah, Rowokele dan Gombang.

Industri pengolahan di Kecamatan Ayah dan Rowokele terbanyak adalah industri kecil antara lain pengolahan kelapa untuk dibuat kopra, pengolahan gula kelapa dan beberapa industri lainnya. Industri pengolahan di Kecamatan Gombang

diantaranya berupa pabrik cat tembok, pabrik pengolahan kayu, pabrik eternit dan pabrik pengolahan kacang.

- D. Sektor sekunder listrik, gas dan air bersih menjadi sektor basis di Kecamatan Sempor.

Kecamatan Sempor memiliki waduk sebaguna Sempor yang dimanfaatkan untuk PLTA dan sumber air baku PDAM Kabupaten Kebumen.

- E. Sektor sekunder bangunan dan konstruksi menjadi sektor basis di Kecamatan Ayah, Puring, Kuwarasan, Sempor, Gombong, Karanganyar dan Karanggayam.

Pada kecamatan Sempor, Gombong dan Karanganyar terdapat beberapa pengusaha konstruksi yang cukup besar, sedangkan kecamatan lainnya memiliki tenaga kerja di bidang konstruksi yang cukup banyak.

- F. Sektor tersier perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor basis di Kecamatan Ayah, Puring, Kuwarasan, Sempor, Gombong, dan Karanganyar.

Kecamatan Ayah, Gombong, Sempor dan Karanganyar memiliki sejumlah hotel dan restoran, karena Kecamatan Gombong, Sempor dan Karanganyar terletak di jalur utama lalu lintas, sedangkan Kecamatan Ayah memiliki beberapa obyek pariwisata yang dilengkapi dengan warung, pasar dan losmen. Kecamatan Puring dan Kuwarasan pada sub sektor perdagangan.

- G. Sektor tersier Angkutan dan Komunikasi menjadi sektor basis di Kecamatan Sempor, Gombong, dan Karanganyar.

Sektor angkutan menjadi basis di Kecamatan Gombong antara lain terlihat dari jumlah angkutan umum penumpang di Kecamatan Gombong nomor dua setelah Kota Kebumen. Di Kecamatan Sempor dan Karanganyar dapat dilihat dari tenaga kerja yang cukup besar di sektor angkutan

H. Sektor tersier Lembaga Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan menjadi sektor basis di Kecamatan Gombong, Kuwarasan, Sempor dan Karanganyar.

Sektor basis ini ditunjang oleh keberadaan sejumlah lembaga keuangan perbankan di Kecamatan Gombong seperti Bank BNI, BRI, Lippo, Mandiri dan beberapa BPR. Kecamatan Kuwarasan memiliki 2 BRI unit dan BPR/BKK. Sedangkan Karanganyar selain memiliki BPR juga memiliki pegadaian besar. Jumlah tenaga kerja di bidang jasa di Kecamatan Sempor terbesar kedua setelah Kecamatan Kebumen (Lampiran C).

I. Sektor tersier jasa-jasa menjadi sektor basis di Kecamatan Kuwarasan, Gombong dan Karanganyar.

Sektor ini terutama ditunjang oleh jasa pemerintahan umum dan pertahanan di Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kuwarasan.

Analisis LQ menunjukkan bahwa Kecamatan Gombong mempunyai sektor basis sekunder dan tersier yang didukung oleh kecamatan sekitarnya dengan sektor-sektor primer. Apabila ditinjau dari suatu sistem produksi maka sektor-sektor primer basis, yang memiliki $LQ > 1$, dari kecamatan sekitar Kecamatan Gombong diolah di Gombong karena memiliki sektor sekunder basis (industri pengolahan) dengan ditunjang oleh sektor tersier yaitu sektor angkutan dan sektor perbankan.

Kecamatan sekitar Gombong berkembang dipengaruhi oleh permintaan dari Kota Gombong terhadap komoditas sektor primer. Menurut teori basis ekonomi, faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah adalah permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Lincoln Arsyad :1999). Kondisi ini sesuai dengan pendapat Budhy Tjahjati (1997) bahwa kota berperan menjadi katalisator/pendorong dalam peningkatan pertumbuhan wilayah

dan ada keterkaitan antar kota dalam hubungan fungsional dan distribusi barang/jasa/informasi.

Kota Gombong yang memiliki sektor basis, berupa sektor sekunder dan sektor tersier yang menunjukkan ciri ekonomi perkotaan/urban, sedangkan kecamatan sekitarnya kecuali Kecamatan Sempor menunjukkan ciri ekonomi pedesaan/rural. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Daljoeni (1998) bahwa hubungan kota dengan wilayah sekitarnya merupakan hubungan simbiotik, saling ketergantungan ekonomis antara kota dan pedesaan.

4.1.2. Analisis Interaksi Ekonomi

Analisis ini bersifat deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta dari analisis tipologi ekonomi wilayah Kabupaten Kebumen dan membandingkan dengan tipologi ekonomi wilayah Kecamatan Gombong. Berdasarkan analisis sektor basis dan survei primer, terjadi interaksi ekonomi di kawasan tersebut dengan pusat Kota Gombong dengan pola-pola tertentu. Pola-pola ini menggambarkan peran Kota Gombong dengan wilayah lainnya. Pola-pola tersebut adalah :

1. Kecamatan sekitar sebagai pemasok bahan baku untuk di olah di Kota Gombong

Pola ini terjadi pada kecamatan – kecamatan penghasil produk pertanian yang memasok kebutuhan pabrik di Kota Gombong, seperti kacang tanah antara lain dari Kecamatan Puring memasok kebutuhan pabrik kacang di Kota Gombong. Hal ini didukung dari hasil analisis LQ , bahwa Kecamatan di sekitar Gombong yaitu di Kecamatan Kuwarasan, Buayan, Karanggayam, Ayah dan Puring di sektor pertanian memiliki $LQ > 1$ dan merupakan daerah pertanian dengan pekerjaan utama warga desa adalah petani, baik pemilik lahan maupun penggarap.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

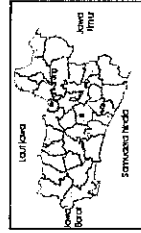
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA

Pusat Pemukiman dan Pengolahan Lanjut Hasil Pertanian

KETERANGAN :

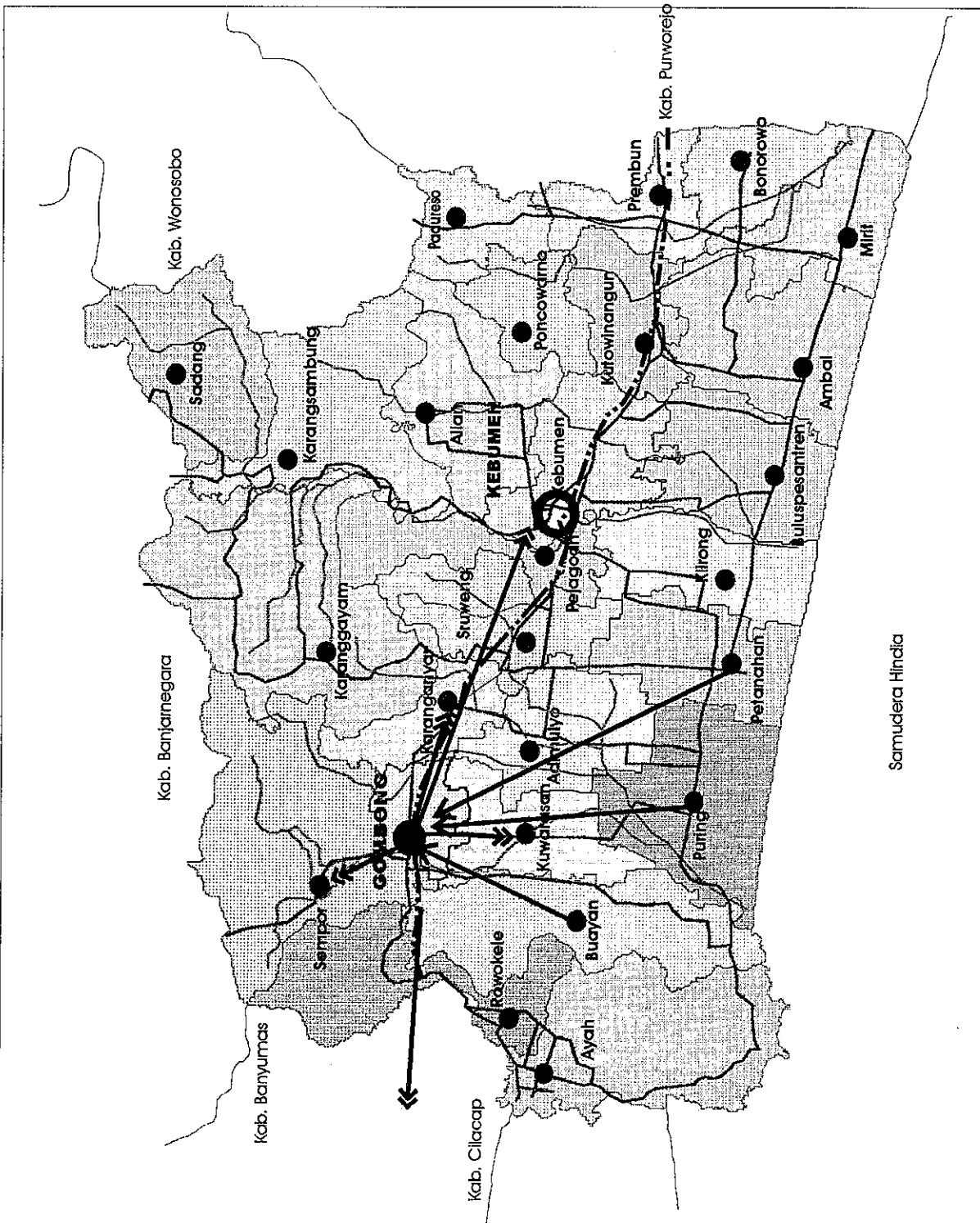
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Pasokan hasil pertanian
- Distribusi hasil pertanian



Nomor Gambar : 41
Halaman : 128

Skala 1 : 50.000

Sumber : Analisis interaksi ekonomi 2004



Samudera Hindia

2. Kecamatan sekitarnya sebagai pemasok tenaga kerja bagi industri di Kota Gombong

Berdasarkan survei dan pengamatan di lapangan maka pekerja industri di Kota Gombong banyak yang berasal dari kecamatan sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang industri seperti pada Kecamatan Sempor (Lampiran C), yang tidak tertampung semua di industri di Kecamatan Sempor, sehingga mereka bekerja di Gombong.

3. Kota Gombong sebagai pusat pemasaran

Kota Gombong bertindak sebagai pusat pemasaran bagi kecamatan sekitarnya terutama untuk komoditas pertanian dan industri rumah tangga. Kecamatan sekitarnya seperti Kuwarasan, beberapa desanya memasok hasil bumi terutama sayuran untuk di pasarkan di Pasar Pagi Gombong. Berdasarkan survei, masyarakat umum di Kecamatan Karanganyar, Kuwarasan dan Sempor yang memilih Kota Gombong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satu alasannya karena berbelanja di Pasar Pagi. Pasar Pagi adalah sebutan bagi pasar yang buka mulai sekitar jam 2 pagi sampai jam 7 pagi, letaknya di halaman parkir Pasar Wonokriyo Gombong dengan komoditas utamanya adalah sayuran.

Di Gombong juga terjadi kegiatan pengepulan komoditas pertanian untuk dijual ke kota-kota lainnya. Seperti pada komoditas beras terdapat dua model perdagangan, yaitu (1). pedagang beras besar di Kota Gombong yang memiliki penggilingan padi menampung padi dari daerah sekitarnya dan (2). padi tersebut diolah di desa menjadi beras lalu di pasarkan ke Kota Gombong seperti pada beberapa desa di Kecamatan Kuwarasan, yaitu Desa Gunungmujil dan Wonoyoso, banyak warga yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang beras, yaitu membeli hasil panen padi tidak hanya di kecamatan sendiri tetapi sampai ke luar batas kecamatan.

4. Kota Gombang sebagai pusat distribusi

Kota Gombang di satu sisi menjadi saluran untuk penjualan, distribusi dan perdagangan bagi produk-produk perdesaan dan disisi lain juga bertindak sebagai saluran distribusi bagi barang-barang produk perkotaan menuju daerah perdesaan. Berdasarkan hasil survei, para pedagang di Kecamatan Karanganyar, Kuwarasan dan Sempor kulakan barang hasil industri dan hasil pertanian di Kota Gombang atau didatangi sales dari Kota Gombang. Dari 30 pedagang memanfaatkan Kota Gombang untuk kulakan hasil industri sebanyak 23 orang (76,7%) sedangkan untuk kulakan hasil pertanian 9 orang (30 %). Di Kecamatan Sempor semua pedagang kulakan ke Kota Gombang baik untuk hasil industri maupun pertanian, sementara pedagang di Kecamatan Kuwarasan dan Karanganyar ada yang tidak kulakan di Kota Gombang, seperti di Kecamatan Kuwarasan terdapat desa yang mempunyai akses ke pasar desa lain dalam satu kecamatan sehingga untuk kulakan hasil bumi cukup ke pasar desa tersebut.

Kota Gombang yang dikelilingi oleh wilayah yang berbasis pertanian menjadi tempat untuk distribusi sarana produksi pertanian seperti bibit dan pupuk, hal terjadi karena jalur distribusi seperti KUD tidak berjalan.

5. Kota Gombang sebagai tempat belanja

Warga kecamatan sekitarnya banyak berbelanja di Kota Gombang, berdasarkan survei terhadap 65 masyarakat umum di Kecamatan Karanganyar, Kuwarasan dan Sempor sebanyak 61 orang (93,8 %) melakukan aktivitas berbelanja di Kota Gombang dengan nilai belanja perbulan di Kota Gombang dibawah 300 ribu sebanyak 31 orang (47,7 %), antara 300 ribu sampai 500 ribu sebanyak 16 orang



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

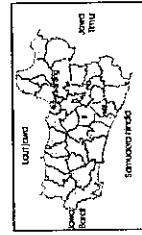
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
 WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA

Kota Gombang sebagai Pusat Distribusi

KETERANGAN:

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Arah distribusi barang

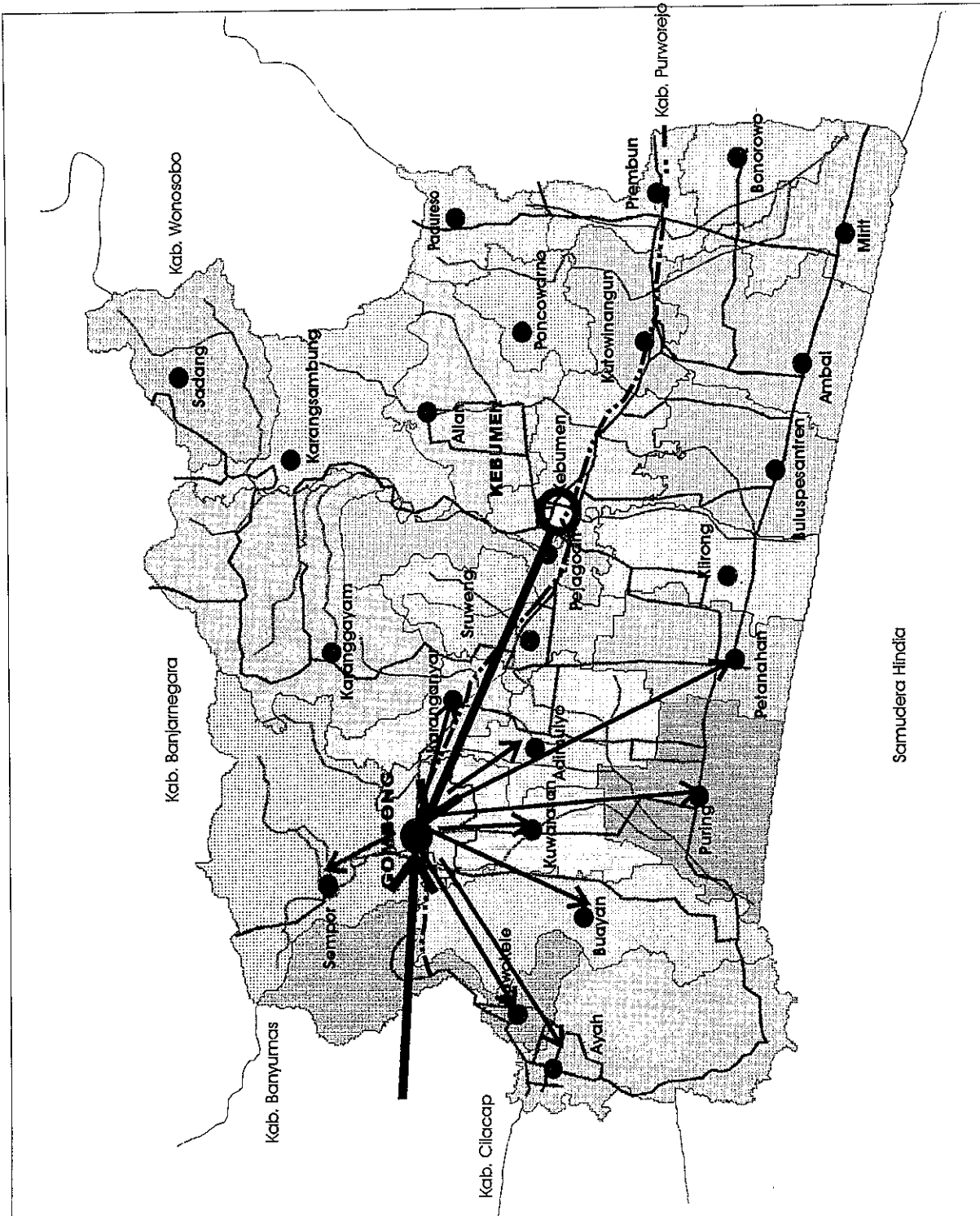


Nomor Gambar : 43
 Halaman : 132

Skala 1 : 50.000



Sumber : Analisis Interaksi ekonomi 2004



Samudera Hindia

(24,6 %), antara 500 sampai 1 juta sebanyak 8 orang (12,3 %), antara 1 juta sampai 2 juta sebanyak 4 orang (6,2 %) dan diatas 2 juta sebanyak 2 orang (3,1 %).

6. Kota Gombang sebagai tempat pelayanan perbankan

Pelayanan perbankan di Kabupaten Kebumen sudah hampir merata, pada setiap kota kecamatan terdapat BPR BKK dan beberapa diantaranya terdapat BRI unit, tetapi ternyata masyarakat tetap mempunyai pilihan terhadap pelayanan perbankan. Berdasarkan survei, dari 21 responden warga Karanganyar, sebanyak 9 orang (43 %) memanfaatkan fasilitas perbankan di Kota Gombang. Warga Kuwarasan dari 19 responden, 8 responden (42 %) memanfaatkan fasilitas perbankan Kota Gombang, dan dari 25 responden warga Sempor 6 orang (29 %) memanfaatkan fasilitas perbankan di Kota Gombang. Kota Gombang memiliki 6 buah bank umum dan 3 BPR, antara lain BNI, BRI, Bank Lippo, dan Bank Mandiri.

Dari hasil analisis di atas, terdapat interaksi ekonomi antara Kota Gombang dengan kecamatan yang menjadi daerah pengaruhnya terutama disebabkan Kota Gombang merupakan titik penting dalam jalur distribusi barang. Kota Gombang merupakan tempat distribusi barang dari industri-industri besar yang berada di kota-kota besar untuk disebarkan ke wilayah sekitarnya. Hal ini terlihat dari fungsi Kota Gombang sebagai tempat distribusi dan tempat belanja. Apabila sebagai tempat distribusi maka konsumennya adalah para pedagang untuk dijual lagi (kulakan) sedangkan bila sebagai tempat belanja maka pembelinya adalah konsumen akhir. Jaringan distribusi yang berada di Kota Gombang juga berupa jaringan sales dengan sepeda motor baik dari distributor maupun toko-toko grosir serta pedagang perantara, sehingga jangkauan pemasaran suatu produk bisa mencapai pelosok pedesaan.

Aliran barang terjadi juga sebaliknya, dari kecamatan sekitar Gombang menjual komoditas non industri seperti sayuran, beras dan makanan untuk ditampung di pedagang perantara yang kemudian membawa ke kota-kota besar. Kegiatan aliran barang baik dari kota besar ke Gombang maupun sebaliknya di dukung keberadaan bank-bank di Kota Gombang. Sehingga interaksi perekonomian antara Kota Gombang dengan wilayah sekitarnya terutama pada distribusi/aliran barang.

4.1.3. Peran Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan

Peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan merupakan hasil analisis tipologi dan interaksi ekonomi dan merujuk pada Rondinelli (1983) tentang peran kota kedua, Richardson (2001:83) tentang teori tempat pusat, Jong dan Steenbergen (1987:6-10), tentang fungsi kota kecil.

Peran yang disandang Kota Gombang adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Umum dan Sosial

Sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, Kota Gombang memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal terlihat dari ketersediaan lembaga keuangan, seperti perbankan; sarana ekonomi, seperti pasar dan pertokoan; sarana pendidikan, tersedia dari TK sampai Akademi Perawat; sarana kesehatan, dari puskesmas dengan rawat inap sampai rumah sakit; sarana transportasi dan komunikasi, tersedia jaringan transportasi perdesaan dan termasuk jalur utama selatan Jawa; dan sarana pariwisata, tersedianya obyek wisata Benteng Van der Wijck. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini sudah dijelaskan pada Bab III.

Jangkauan pelayanan fasilitas yang terdapat di Kota Gombang ada yang mencapai tingkat regional, seperti fasilitas pendidikan. Hal ini dikarenakan keberadaan



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIFONEGORO

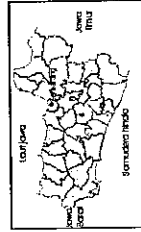
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA

Kota Gombong sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan

KETERANGAN :

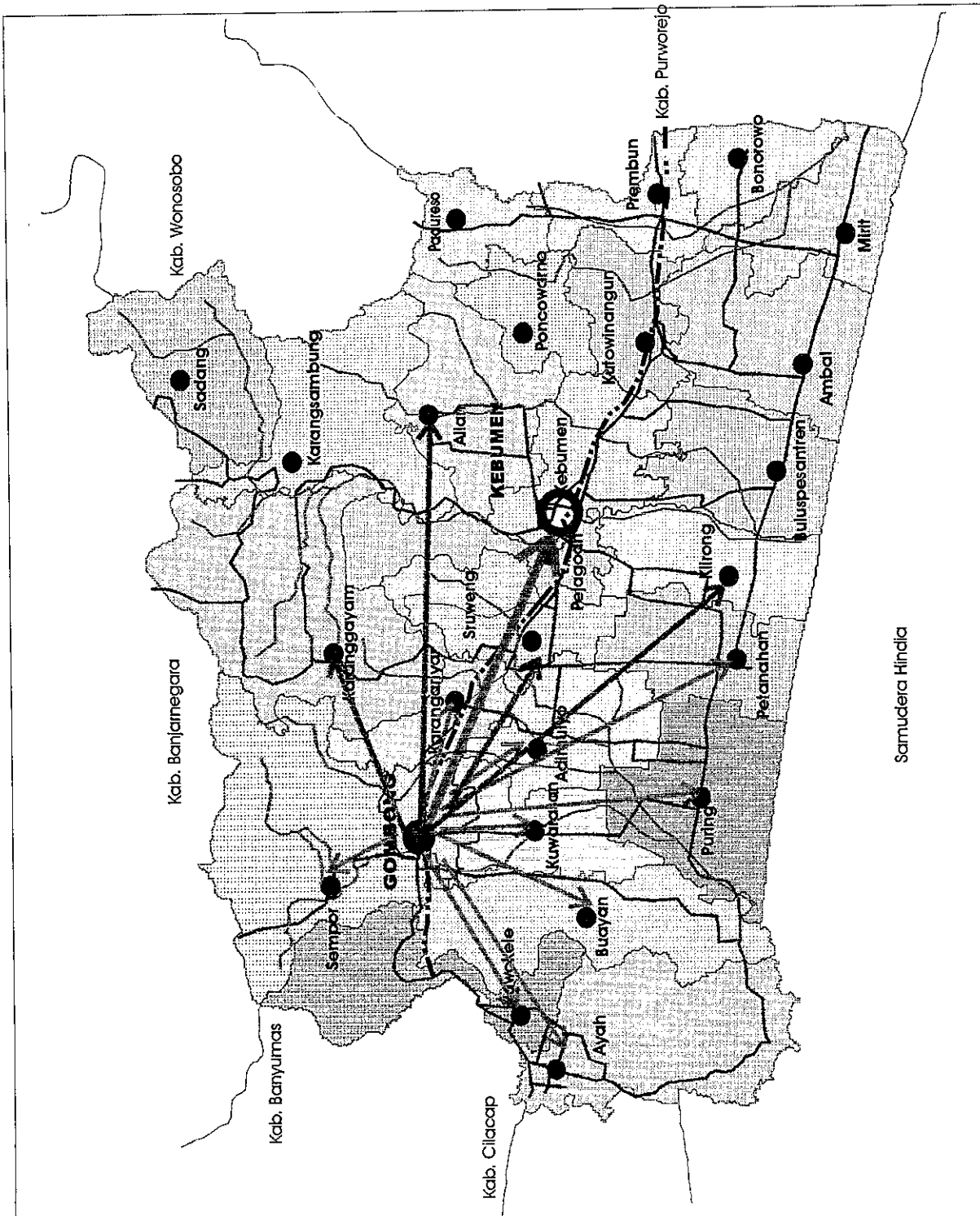
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jangkauan Pelayanan Kesehatan



Nomor Gambar : 44
Halaman : 135

Skala 1 : 50.000

Sumber : Analisis Peran Kota Gombong; 2004



Samudera Hindia

Akademi Perawat Muhammadiyah merupakan satu-satunya akademi keperawatan di Kabupaten Kebumen dan memiliki mahasiswa dari luar wilayah Kabupaten Kebumen.

Pusat pelayanan sosial terutama dengan keberadaan dua buah rumah sakit swasta yaitu RS PKU Muhammadiyah dan RSUD Palang Biru.

2. Pusat komersial dan pelayanan jasa

Menurut Rondinelli, sektor komersial dan jasa dapat dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu sektor formal dan informal. Berdasarkan survei dan wawancara dengan Camat Gombong, di Kota Gombong sudah berkembang sektor informal. Berkembangnya sektor informal dapat diamati pada malam hari dengan merebak warung-warung makanan, yang buka sepanjang malam.

3. Pusat pemasaran dan perdagangan regional

Kota Gombong bertindak sebagai pusat pemasaran dan perdagangan bagi daerah sekitarnya, seperti diungkapkan pada bab 4.1.2. Analisis Interaksi Ekonomi.

4. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian

Walaupun penduduk Kota Gombong yang bekerja dibidang pertanian secara langsung jumlahnya relatif sedikit, dan kontribusinya kecil tercermin dari $LQ < 1$ namun proporsi penduduk yang berkecimpung di bidang pengolahan, distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian mempunyai persentase besar dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Peran ini sudah diungkapkan pada bab 4.1.2. Analisis Interaksi Ekonomi

5. Pusat transportasi dan komunikasi regional

Kota Gombong merupakan simpul pusat bagi transportasi di wilayah bagian barat Kebumen, hal ini terlihat dari trayek angkutan umum yang ada di Kota Gombong atau melintasi Kota Gombong (Lampiran D)



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

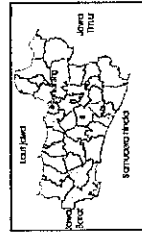
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA

Kota Gombong sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan

KETERANGAN :

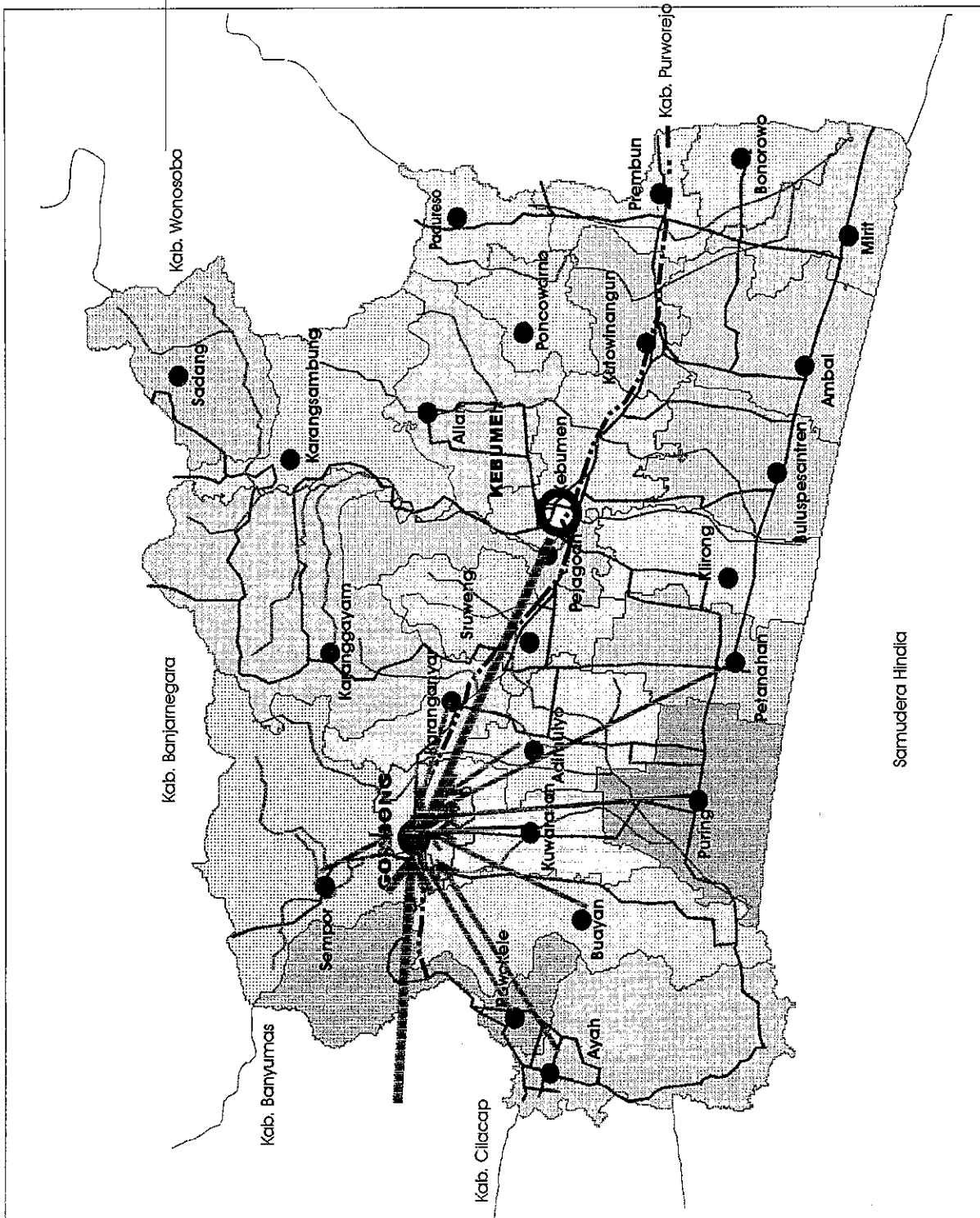
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Jangkauan Pelayanan Pendidikan



Nomor Gambar : 45
Halaman : 137

Skala 1 : 50.000

Sumber : Analisis Peran Kota Gombong, 2004



Samudera Hindia

6. Pusat Transformasi Sosial

Menurut Rondinelli (1983) sebagai dampak dari fungsi perdagangan dan transportasi regional, kota-kota kedua berfungsi sebagai pusat transformasi sosial. Menurut Camat Gombong, di Kota Gombong terdapat heterogenitas sosial yang mencakup perbedaan suku, agama dan adat kebiasaan yang disebabkan selain dampak perdagangan dan transportasi juga disebabkan adanya kompleks militer. Kota Gombong merupakan tempat transisi antara kehidupan perdesaan dan perkotaan. Percampuran antara masyarakat desa dan kota mengakibatkan terbentuknya masyarakat perkotaan yang tetap mewarisi nilai-nilai tradisional.

Dari analisis di atas maka peran Kota Gombong sangat penting atau dapat dikatakan mendominasi wilayah sekitarnya. Analisis peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan didasarkan pengertian bahwa yang dimaksud pusat pertumbuhan adalah kota dengan perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya dan akan menentukan serta mendominasi daerah lain yang lebih lambat perkembangannya (Sukirno:1976), sehingga berdasarkan analisis peran maka Kota Gombong mencirikan suatu kota pusat pertumbuhan. Hal tersebut juga sesuai dengan pengertian Friedman (1979) bahwa kota dengan perlengkapan fasilitas yang dimiliki serta perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya merupakan suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah.

Peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan wilayah terutama sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, pusat perdagangan dan jasa serta pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian yang ditunjang dengan peran sebagai pusat transportasi regional.

4.1.4. Analisis Faktor-faktor pendukung Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen

Faktor-faktor pendukung Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan masukan dari analisis-analisis sebelumnya dan hasil survei serta wawancara dengan pejabat yang berkompeten di bidangnya.

Faktor-faktor pendukung tersebut adalah :

1. Fasilitas yang lengkap

Kota Gombong memiliki fasilitas umum yang baik, hal ini dilihat dari hasil analisis skalogram dan Indeks Sentralitas Terbobot. Fasilitas yang tidak dimiliki oleh Kota Gombong adalah fasilitas perkantoran Pemda dan Pasar Hewan. Fasilitas perkantoran Setda hanya ada satu di Kota Kebumen sebagai Ibukota Kabupaten sedangkan pasar hewan terdekatnya berada di Purbowangi, Buayan yang berjarak \pm 4 km dari Kota Gombong.

Keberadaan fasilitas ekonomi seperti lembaga keuangan, pasar dan supermarket, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, fasilitas pendidikan seperti SMU negeri sampai Akademi sangat mendukung peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan, karena merupakan fasilitas yang juga digunakan oleh masyarakat di luar wilayah Kota Gombong.

2. Aksesibilitas yang baik

Letak Kota Gombong sangat strategis di jalur utama selatan Jawa. Posisi tersebut menjadikan Kota Gombong dapat dijangkau dari arah timur (Yogya, Magelang, Semarang), dari arah barat (Purwoketo, Cilacap) maupun dari arah utara (Banjarnegara). Kota Gombong memiliki stasiun KA yang melayani kereta api

ekonomi jurusan Surabaya, Bandung dan Jakarta serta kereta api bisnis jurusan Kutoarjo-Jakarta..

Kota Gombang mudah dicapai oleh masyarakat daerah sekitarnya karena memiliki jaringan transportasi perdesaan baik ke arah selatan (Puring, Buayan) ke arah barat (Rowokele, Ayah) maupun ke arah utara (Sempor) yang ditunjang oleh jumlah angkutan umum yang cukup memadai dan jaringan jalan yang cukup baik. Kemudahan di akses mendukung peranannya sebagai pusat pemasaran dan perdagangan regional.

3. Interaksi yang kuat dengan kawasan belakangnya

Kota Gombang mempunyai interaksi yang kuat seperti pada pola-pola di

4.1.2. Analisis interaksi ekonomi.

4. Struktur internal perkotaan

Pusat kegiatan Kota Gombang terletak di sepanjang jalan utama Kota Gombang yaitu Jalan Yos Sudarso. Pasar Wonokriyo sebagai salah satu simpul penarik terletak di pinggir jalan utama sehingga orang sangat mudah mencapai pasar. Hal ini berbeda pasar Tumenggungan Kebumen yang terletak tidak di jalur transportasi dan jauh dari terminal bus maupun angkutan perdesaan.

Hal ini membuat kegiatan keramaian di Kota Gombang terpusat, dan terlihat lebih ramai dari Kota Kebumen.

4.2. Analisis Wilayah Pengaruh

Analisis wilayah pengaruh dilakukan terhadap dua kota yaitu Kota Gombang dan Kota Kebumen. Kota Kebumen ikut dianalisis karena merupakan ibukota Kabupaten Kebumen. Analisis wilayah pengaruh kota dilakukan untuk mendapatkan wilayah pengaruh dari Kota Gombang dan Kota Kebumen terhadap wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen. Pengaruh dalam hal ini berupa pengaruh secara keruangan, yaitu

pengaruh kota-kota pusat pelayanan terhadap wilayah belakangnya atau pengaruh Kota Gombong dan Kota Kebumen terhadap wilayah Kabupaten Kebumen, lebih dilihat dari peran kota sebagai pusat pertumbuhan.

Wilayah pengaruh dicari dengan metode gravitasi dan metode titik henti. Model *gravitasi* bertujuan untuk mengetahui hubungan kedekatan antara wilayah satu dengan wilayah ke dua, dalam hal ini daerah dianggap sebagai suatu massa yang mempunyai daya tarik menarik, sehingga akan muncul hubungan saling mempengaruhi antara kedua daerah dari model ini akan diketahui hubungan interpendensi antarpusat dengan daerah sekitarnya.

Formulasi rumus (Bintarto, 1982, 80) :

$$I_{1,2} = a \frac{P_1 \cdot P_2}{J_{1,2}^b} \dots\dots(8)$$

$I_{1,2}$ = Interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2

P_1 = Jumlah penduduk wilayah 1

P_2 = Jumlah penduduk wilayah 2

$J_{1,2}^b$ = Jarak antara wilayah 1 dan 2

a = Konstante empirik yang besarnya 1

b = Konstante empirik yang besarnya 2

Penggunaan analisis dengan gravitasi dengan asumsi-asumsi bahwa:

1. seluruh daerah merupakan dataran yang isotop, artinya homogen dalam hal topografi, iklim dan perkembangan ekonominya.
2. kedua kota tersebut sama –sama mudah dicapai oleh penduduk masing-masing kota, atau dengan kata lain kedua kota memiliki tingkat kemudahan pencapaian yang sama.

3. faktor jarak merupakan faktor penentu besarnya biaya untuk berpindahnya orang, barang dan informasi, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain seperti waktu perjalanan dan jenis sarana transportasi yang digunakan.

Untuk beberapa kota, asumsi-asumsi tersebut hampir mendekati kesamaan di lapangan. Topografi Kota Gombong dan kota-kota sekitarnya relatif datar. Pada kota-kota di jalur utama, aksesibilitas hampir sama karena banyaknya angkutan umum penumpang. Asumsi persamaan perkembangannya kurang tepat, karena kenyataan dilapangan tingkat pendapatan per kapita berbeda (Lampiran A).

Dengan asumsi tersebut, model gravitasi tidak dapat menggambarkan besarnya interaksi yang nyata tetapi hanya mengindikasikan besarnya interaksi tersebut (Warpani, 1984 :114, Daldjoeni 1997:204).

Pengaruh Kota Gombong dan Kota Kebumen dapat diperhitungkan melalui model titik henti. Penerapan model titik henti bertujuan untuk mencari batas wilayah pengaruh masing-masing kota. Pada prinsipnya jumlah suatu kota dibelah menjadi dua untuk mencari jangkauan pelayanan yang maksimal. antara dua kota, misalnya kota j dan kota i, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Isard, 1976):

$$d_{ij} = \frac{d_{ij}}{1 + \sqrt{(P_j / P_i)}} \dots\dots(9)$$

Keterangan :

dkj = jangkauan wilayah pengaruh dari Kota Gombong

dij = jarak antara Kota Kebumen dan Kota Gombong

Pi = jumlah penduduk Kota Gombong

Pj = jumlah penduduk Kota Kebumen

4.2 1. Analisis Wilayah Pengaruh Kota Gombong

Berdasarkan jarak dan jumlah penduduk tahun 2002, maka dihitung gravitasi Kota Gombong ke kota-kota lain sebagaimana tercantum dalam tabel IV.6.

TABEL IV.6
HASIL PERHITUNGAN GRAVITASI KOTA GOMBONG

NO	NAMA KECAMATAN	JMLH PDKK 2002	GOMBONG
			Gravitasi
1	SEMPOR	61,887	269,224,532.72
2	KUWARASAN	42,101	41,193,761.99
3	KARANGANYAR	34,178	26,544,720.94
4	BUAYAN	54,207	23,946,636.72
5	KARANGGAYAM	50,715	22,166,421.37
6	SRUWENG	55,142	16,091,697.83
7	KEBUMEN	117,523	14,278,945.68
8	ADIMULYO	33,782	10,794,034.11
9	ROWOKELE	42,601	10,077,158.25
10	AYAH	52,655	9,524,209.83
11	PURING	51,689	9,117,603.60
12	PEJAGOAN	46,217	6,777,021.36
13	PETANAHAN	51,012	5,585,428.95
14	KLIRONG	53,635	4,440,964.31
15	ALIAN	55,966	3,014,979.11
16	BULUS PESANTREN	51,212	2,921,216.25
17	KUTOWINANGUN	43,765	2,230,720.61
18	AMBAL	55,221	2,185,591.38
19	KARANGSAMBUNG	42,596	1,480,615.77
20	MIRIT	45,857	1,227,724.45
21	PREMBUN	27,276	926,411.45
22	PONCOWARNO	15,223	771,238.77
23	BONOROWO	19,725	555,551.22
24	SADANG	18,423	427,414.86
25	PADURESO	13,845	409,767.83

Sumber : Data diolah 2004

Dari hasil perhitungan Gravitasi (Lampiran E), didapatkan hasil seperti pada Tabel IV.4. Sesuai hasil perhitungan, maka Ibu Kota Kecamatan (IKK) Sempor, yang terletak di Desa Jatinegara, mempunyai interaksi tertinggi dengan Kota Gombong. Hal ini

disebabkan oleh faktor jumlah penduduk Kecamatan Sempor nomor dua terbesar di Kabupaten Kebumen yaitu 61.887 jiwa dan jaraknya sangat berdekatan hanya 3,3 km.

Ada beberapa faktor yang memperkuat interaksi antar kota ini. IKK Sempor tidak memiliki pasar kecamatan, sehingga kebutuhan masyarakat dipenuhi dari toko/warung setempat dan Kota Gombong. Hal ini juga dinyatakan oleh para pedagang. Dari 10 responden pedagang, semuanya kulakan di Kota Gombong selain didatangi oleh sales yang juga berasal dari Kota Gombong (7 pedagang). Dari 25 responden umum, semuanya pernah berbelanja di Kota Gombong terutama untuk belanja barang khusus seperti elektronik 23 orang (92%) sedangkan yang memanfaatkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari 9 orang (36 %).

Jenjang sekolah yang tertinggi di Kecamatan Sempor adalah SLTP sehingga untuk jenjang SLTA, mereka melanjutkan ke Gombong. Dari fasilitas kesehatan, Sempor tidak memiliki Rumah Sakit hanya Puskesmas, akan tetapi masyarakat umum memanfaatkan lebih dari satu sarana kesehatan, sebanyak 20 orang (80%) memanfaatkan Puskesmas Pembantu, yang memanfaatkan Puskesmas 10 orang (40 %), yang memanfaatkan Rumah Sakit di Kota Gombong sebanyak 5 orang (20%).

Gaya tarik terbesar kedua adalah IKK Kuwarasan, akan tetapi skor yang dihasilkan hanya 15 % dari skor Gombong terhadap Sempor, hal ini disebabkan jumlah penduduk Kuwarasan 68 % jumlah penduduk Sempor dan berjarak 6,95 km dari Kota Gombong .

Ada beberapa pendukung interaksi antara Kota Gombong dengan Kuwarasan antara lain fasilitas yang lebih lengkap di Kota Gombong dan ketersediaan sarana transportasi angkutan perdesaan pada beberapa desa.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga Kuwarasan memilih belanja tidak hanya pada satu tempat. Mereka kebanyakan berbelanja di toko/warung sekitarnya 13 orang (68 %). Dari 19 responden umum, selain di toko sekitarnya, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbekanja di Kota Gombong sebanyak 9 orang (47 %). Kuwarasan memiliki pasar kecamatan yang hanya buka pada hari Rabu dan Minggu, sehingga yang memilih memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di pasar kecamatan hanya 1 (satu) orang. Untuk membeli kebutuhan khusus seperti elektronika, semuanya (19 responden) memilih Kota Gombong. Menurut responden pedagang, dari 11 orang, terbanyak 9 orang (82 %) kulakan di Kota Gombong dan juga sebanyak 4 orang (36 %) didatangi sales yang berasal dari Kota Gombong.

Warga Kuwarasan menyekolahkan anak setingkat SLTP di Kuwarasan, Buayan dan Gombong, dengan mempertimbangkan kemudahan transportasi. Kuwarasan tidak memiliki SMU, hanya ada satu sekolah teknik swasta sehingga pilihan warga Kuwarasan untuk menyekolahkan anak setingkat SMU di Kota Gombong.

Fasilitas kesehatan di Kota Gombong juga dimanfaatkan oleh warga Kuwarasan sebanyak 16 orang (84 %), antara lain sebanyak 12 orang pernah memanfaatkan Rumah Sakit, 8 orang pernah memanfaatkan Puskesmas/Pustu di Kota Gombong dan 10 orang pernah memanfaatkan dokter praktek.

Kota Karanganyar memiliki interaksi terbesar ketiga. Interaksi yang lebih kecil karena adanya perbedaan jumlah penduduk, hampir separo Kuwarasan, dan jarak yang lebih jauh. Interaksi Kota Karanganyar dan Kota Gombong, tidak sebesar dengan Sempor dan Kuwarasan karena Karanganyar antara lain memiliki fasilitas pasar, fasilitas pendidikan sampai SMU, dan memiliki aksesibilitas yang baik sehingga mudah untuk bepergian.

Dari responden pedagang (8 orang) yang asal barangnya dagangannya lebih dari satu sumber, 6 orang kulakan di Kota Gombong dan 5 diantaranya didatangi sales. Dari ke enam pedagang yang kulakan di Kota Gombong, 3 (tiga) orang (37 %) kulakan setiap hari ke Kota Gombong.

Dari hasil survei, warga Karanganyar memanfaatkan beberapa sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 21 responden umum, beberapa responden memilih lebih dari satu tempat berbelanja. Sebanyak 5 responden (24 %) berbelanja di toko/warung sekitar, 6 orang (29 %) memanfaatkan pasar desa, 9 orang (43 %) memanfaatkan pasar kecamatan, dan 6 (29 %) orang berbelanja di Kota Gombong. Berbeda dengan warga Sempor maupun Kuwarasan, warga Karanganyar yang memanfaatkan pasar kecamatan untuk memenuhi kebutuhan khusus sebanyak 9 responden (43 %), yang memanfaatkan Kota Gombong sebanyak 12 orang (57 %), yang memanfaatkan Kota Kebumen 1 orang (5 %) dan yang berbelanja ke luar Kabupaten Kebumen sebanyak 1 orang (5 %).

Semua responden tidak ada yang bekerja di Kota Gombong, mereka beraktivitas di Kota Gombong untuk berbelanja (21 responden, 100 %), berobat (12 responden, 57%), pendidikan (5 responden, 24%) dan keagamaan (2 responden, 10,5 %).

Berdasarkan perhitungan titik henti (Lampiran F), maka jarak wilayah pengaruh Kota Gombong terhadap kota lain seperti pada tabel IV.7.

TABEL IV.7
HASIL PERHITUNGAN JARAK TITIK HENTI KOTA GOMBONG

NO	NAMA KECAMATAN	GOMBONG	GOMBONG
		Jarak (km)	Jarak Titik Henti (km)
1	SEMPOR	3.30	1.54
2	KUWARASAN	6.95	3.58
3	KARANGANYAR	7.80	4.22
4	BUAYAN	10.35	5.00
5	KARANGGAYAM	10.40	5.11
6	SRUWENG	12.73	6.12
7	ADIMULYO	12.17	6.59

lanjutan

NO	NAMA KECAMATAN	GOMBONG	
		Jarak (km)	Jarak Titik Henti (km)
8	ROWOKELE	14.14	7.25
9	KEBUMEN	19.73	7.66
10	AYAH	16.17	7.87
11	PURING	16.37	8.01
12	PEJAGOAN	17.96	9.03
13	PETANAHAN	20.78	10.19
14	KLIRONG	23.90	11.57
15	BULUS PESANTREN	28.79	14.11
16	ALIAN	29.63	14.19
17	KUTOWINANGUN	30.46	15.53
18	AMBAL	34.57	16.61
19	KARANGSAMBUNG	36.89	18.93
20	PONCOWARNO	30.55	19.49
21	MIRIT	42.03	21.18
22	PREMBUN	37.32	21.21
23	BONOROWO	40.98	24.90
24	PADURESIO	39.97	25.94
25	SADANG	45.15	27.80

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Wilayah pengaruh Kota Gombong bila ditinjau dari titik henti dengan Kota Kebumen berjarak 7,66 km dari Kota Gombong. Jarak tersebut terletak di Kota Karanganyar. Hal ini diperkuat survei yang menyatakan bahwa terdapat warga Karanganyar yang berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan Rita, Kota Kebumen. Pengaruh Kota Gombong lebih kuat di desa yang berbatasan dengan Kota Gombong karena lebih dekat ke Kota Gombong daripada ke Karanganyar.

Dengan memperhatikan nilai gravitasi dan titik henti, maka Kota Gombong memiliki pengaruh kuat pada Kota Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karangayam. Beberapa kota terutama di wilayah Barat seperti Ayah, Rowokele dan Puring sebenarnya dipengaruhi dengan kuat oleh Kota Gombong, tetapi jumlah penduduk yang kecil dan jarak yang jauh mengakibatkan nilai gravitasinya kecil. Ayah dan Rowokele yang terletak di barat Kota Gombong, distribusi barangnya dipengaruhi oleh

Kota Gombang, sementara Puring di selatan Kota Gombang juga sangat terpengaruh kondisi Kota Gombang apalagi Puring dan Kota Gombang terhubung dengan sarana transportasi yang cukup baik.

Wilayah pengaruh dari hasil perhitungan dengan metode titik henti dan gravitasi hanya bersifat indikatif, dibuktikan bahwa pengaruh Kota Gombang secara faktual tidak terbatas pada Kabupaten Kebumen karena berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, Kota Gombang sudah melayani wilayah di luar Kabupaten Kebumen seperti Tambak dan Sumpiuh di Kabupaten Banyumas.

4.2 2. Analisis Wilayah Pengaruh Kota Kebumen

Kota Kebumen dianalisis karena merupakan ibukota Kabupaten Kebumen yang memiliki peran dan pengaruh luas, sehingga dengan menganalisis Kota Kebumen, pengaruh Kota Gombang dapat lebih obyektif. Analisis wilayah pengaruh Kota Kebumen dilakukan dengan menggunakan model gravitasi dan titik henti.

TABEL IV. 8
HASIL PERHITUNGAN GRAVITASI KOTA KEBUMEN

NO	NAMA KECAMATAN	JMLH	KEBUMEN
		PDKK 2002	Gravitasi
1	2	3	4
1	PEJAGOAN	46,217.00	1,726,039,318.46
2	SRUWENG	55,142.00	133,686,926.56
3	ALIAN	55,966.00	57,232,716.47
4	KLIRONG	53,635.00	57,067,795.21
5	BULUS PESANTREN	51,212.00	42,876,434.57
6	KUTOWINANGUN	43,765.00	42,523,732.22
7	PETANAHAN	51,012.00	26,911,503.78
8	KARANGANYAR	34,178.00	24,929,544.04
9	ADIMULYO	33,782.00	22,336,782.41
10	AMBAL	55,221.00	20,900,523.36
11	KARANGGAYAM	50,715.00	17,469,368.77
12	GOMBONG	47,294.00	14,278,945.68
13	SEMPOR	61,887.00	13,915,141.54

lanjutan

14	PONCOWARNO	15,223.00	13,202,378.01
15	KARANGSAMBUNG	42,596.00	13,013,904.54
16	KUWARASAN	42,101.00	12,799,554.12
17	PURING	51,689.00	12,216,378.30
18	BUAYAN	54,207.00	11,469,907.31
19	PREMBUN	27,276.00	10,057,767.11
20	MIRIT	45,857.00	8,721,648.65
21	AYAH	52,655.00	5,504,981.90
22	BONOROWO	19,725.00	5,008,021.48
23	ROWOKELE	42,601.00	4,638,629.80
24	PADURESO	13,845.00	3,666,840.99
25	SADANG	18,423.00	3,143,627.22

Sumber : Hasil analisis, 2004

Dari hasil perhitungan gravitasi, diketahui bahwa intensitas Kota Kebumen dan Pejagoan sangat besar mencapai nilai 1,726,039,318.46. Dengan beda skor yang tinggi antara nilai terbesar pertama dan kedua mengakibatkan interval kelas yang terisi hanya ada dua yaitu tinggi sekali (beranggotakan satu yaitu Pejagoan) dan anggota lainnya saling berinteraksi dengan intensitas rendah (lampiran E).

Dari hasil model gravitasi tersebut, pengaruh Kota Kebumen ternyata ke arah barat yaitu Pejagoan dan Sruweng. Pejagoan memiliki nilai yang sangat besar karena jaraknya yang sangat dekat (1,77 km) dengan Kota Kebumen. Dengan perhitungan jarak maka kota yang wilayahnya berbatasan langsung tidak selalu memiliki nilai yang lebih besar, seperti pada Sruweng tidak berbatasan langsung dengan Kota Kebumen.

Hasil perhitungan gravitasi tersebut, apabila ditinjau di lapangan, mendekati sesuai. Kecamatan Pejagoan berbatasan langsung dengan Kota Kebumen, hanya dibatasi oleh Sungai Luk Ulo, sehingga interaksi antar kedua wilayah tersebut sangat besar. Beberapa kantor pemerintah Kabupaten Kebumen ditempatkan di Kecamatan Pejagoan

Wilayah pengaruh Kota Kebumen apabila diukur dengan menggunakan metode titik henti maka hasilnya seperti pada tabel IV.9.

TABEL IV. 9
HASIL PERHITUNGAN TITIK HENTI KOTA KEBUMEN

NO	NAMA KECAMATAN	KEBUMEN	KEBUMEN
		Jarak (km)	Titik Henti (km)
1	2	3	4
1	PEJAGOAN	1.77	1.09
2	SRUWENG	6.96	4.13
3	KLIRONG	10.51	6.27
4	ALIAN	10.72	6.34
5	KUTOWINANGUN	11.00	6.83
6	BULUS PESANTREN	11.85	7.14
7	KARANGANYAR	12.69	8.25
8	PONCOWARNO	11.64	8.56
9	ADIMULYO	13.33	8.68
10	PETANAHAN	14.93	9.00
11	AMBAL	17.62	10.45
12	KARANGAYAM	18.47	11.15
13	PREMBUN	17.85	12.05
14	GOMBONG	19.73	12.07
15	KARANGSAMBUNG	19.61	12.24
16	KUWARASAN	19.66	12.30
17	SEMPOR	22.86	13.25
18	PURING	22.30	13.41
19	BUAYAN	23.57	14.04
20	BONOROWO	21.51	15.26
21	MIRIT	24.86	15.30
22	PADURESO	21.07	15.68
23	SADANG	26.24	18.80
24	AYAH	33.53	20.08
25	ROWOKELE	32.85	20.51

Sumber : Hasil analisis, 2004

Apabila kita lihat maka terlihat perbedaan antara pendekatan gravitasi dengan titik henti, Klirong yang lebih dekat dengan Kota Kebumen daripada Alian , ternyata memiliki intensitas lebih rendah daripada Alian.

Dengan memperhatikan analisis gravitasi dan titik henti maka wilayah pengaruh Kota Kebumen meliputi kota-kota Pejagoan, Sruweng, Alian, Klirong, Kutowinangun dan Buluspesantren. Akan tetapi kedudukan Kota Kebumen sebagai ibukota kabupaten, memiliki wilayah pengaruh yang lebih luas terutama dalam bidang pemerintahan.

Pembagian wilayah pengaruh Kota Gombong dan Kota Kebumen dengan menggunakan asumsi:

1. Apabila gravitasi kota Kebumen terhadap kota A lebih besar lebih besar daripada Kota Gombong terhadap kota A, maka kota A menjadi daerah pengaruh Kota Kebumen.
2. Apabila Kota A letaknya lebih barat dari Kota Gombong, maka Kota A merupakan wilayah pengaruh Kota Gombong dan bila terletak di timur Kota Kebumen, maka merupakan wilayah Kota Kebumen.

TABEL IV.10
PERBANDINGAN ANALISIS
KOTA KEBUMEN DAN KOTA GOMBONG

NO	Kota Gombong		Kota Kebumen	
	Gravitasi	Titik Henti	Gravitasi	Titik Henti
1	2	3	4	5
1	Sempor	Sempor	Pejagoan	Pejagoan
2	Kuwarasan	Kuwarasan	Sruweng	Sruweng
3	Karanganyar	Karanganyar	Alian	Klirong
4	Buayan	Buayan	Klirong	Alian
5	Karanggayam	Karanggayam	Bulus Pesantren	Kutowinangun
6	Sruweng	Sruweng	Kutowinangun	Bulus Pesantren
7	Kebumen	Adimulyo	Petanahan	Karanganyar
8	Adimulyo	Rowokele	Karanganyar	Poncowarno
9	Rowokele	Kebumen	Adimulyo	Adimulyo
10	Ayah	Ayah	Ambal	Petanahan
11	Puring	Puring	Karanggayam	Ambal
12	Pejagoan	Pejagoan	Gombong	Karanggayam
13	Petanahan	Petanahan	Sempor	Prembun
14	Klirong	Klirong	Poncowarno	Gombong
15	Alian	Bulus Pesantren	Karangsambung	Karangsambung
16	Bulus Pesantren	Alian	Kuwarasan	Kuwarasan
17	Kutowinangun	Kutowinangun	Puring	Sempor
18	Ambal	Ambal	Buayan	Puring
19	Karangsambung	Karangsambung	Prembun	Buayan
20	Mirit	Poncowarno	Mirit	Bonorowo
21	Prembun	Mirit	Ayah	Mirit
22	Poncowarno	Prembun	Bonorowo	Padureso
23	Bonorowo	Bonorowo	Rowokele	Sadang
24	Sadang	Padureso	Padureso	Ayah
25	Padureso	Sadang	Sadang	Rowokele

Sumber: Hasil analisis, 2004



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMERINTAHAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

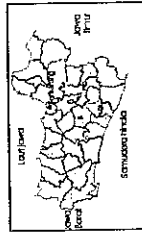
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA
WILAYAH PENGARUH KOTA DI KABUPATEN KEBUMEN

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten
- Wilayah pengaruh
- Wilayah Pengaruh Kota Gombong
- Wilayah Pengaruh Kota Kebumen

Nilai gravitasi
> 1.000.000
200.000-1.000.000
100.000-200.000
40.000-100.000
20.000-40.000

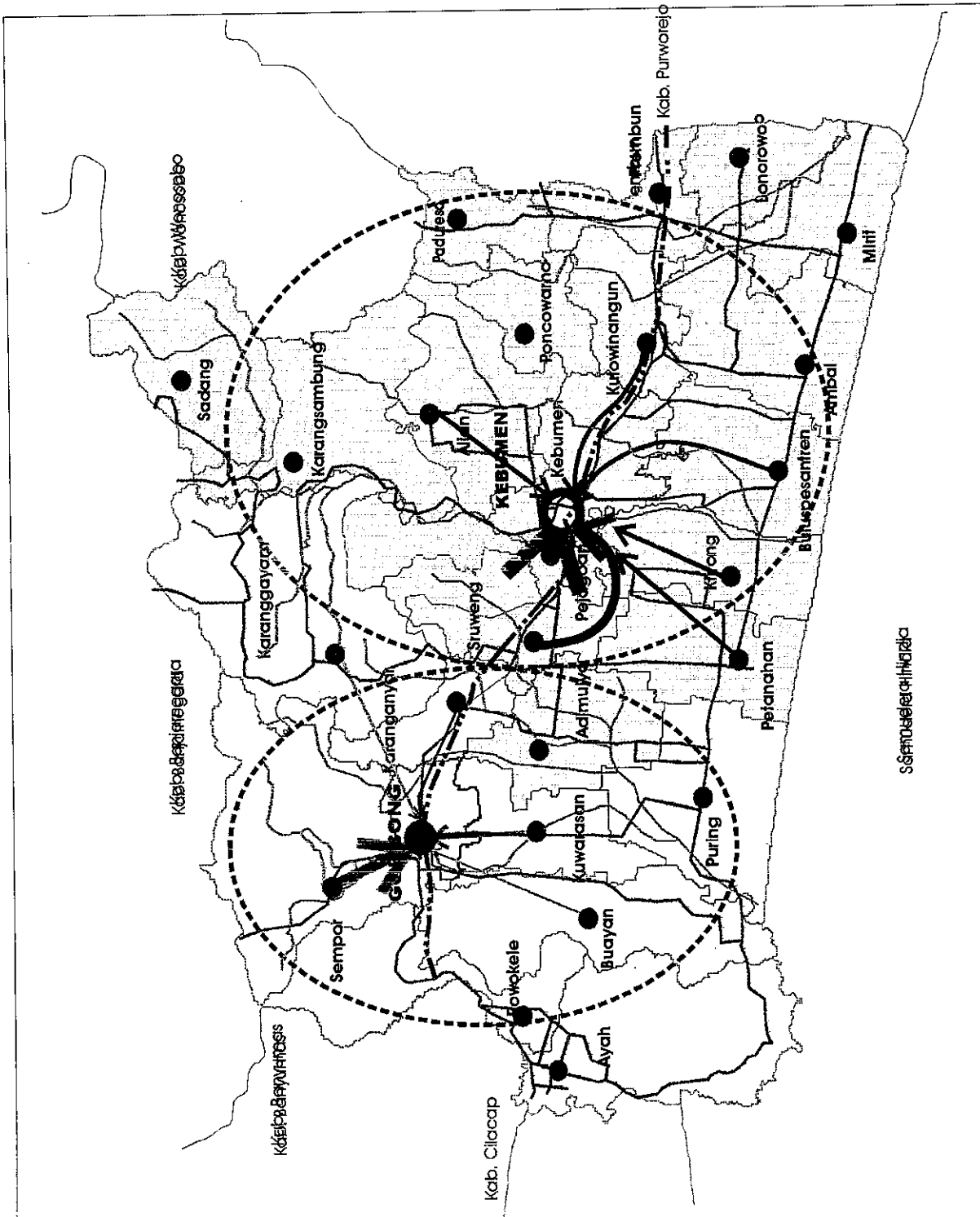


Nomor Gambar : 46
Halaman : 152



Skala 1 : 50.000

Sumber : Analisis wilayah pengaruh 2004



Sembeleng, H. H. H.

Dari hasil analisis gravitasi dan titik henti Kota Kebumen dan Kota Gombong maka wilayah pengaruh kota di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pengaruh Kota Gombong terdiri dari:

- Kota Gombong, Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, Puring.

2. Wilayah pengaruh Kota Kebumen terdiri dari:

- Kota Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Alian, Klirong, Kutowinangun dan Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Ambal, Poncowarno, Karang sambung, Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Sadang.

Wilayah pengaruh ini masih bersifat indikatif karena dalam kenyataannya tidak mutlak suatu wilayah hanya dipengaruhi oleh suatu kota. Analisis ini menggunakan wilayah kecamatan, sedangkan pada dalam beberapa kecamatan seperti Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Adimulyo memiliki wilayah pengaruh kota berbeda terutama di desa perbatasan, tergantung pada aktivitas dan kemudahan aksesibilitas..

Wilayah pengaruh Kota Kebumen lebih luas disebabkan letak Kota Kebumen di tengah wilayah Kabupaten Kebumen, sehingga dengan asumsi yang ditetapkan, semua wilayah disebelah timur merupakan wilayah pengaruh Kota Kebumen. Beberapa lokasi di sebelah timur Kota Kebumen memiliki nilai gravitasi yang rendah sehingga hal tersebut mengindikasikan lemahnya interaksi dengan Kota Kebumen.

Lemahnya interaksi Kota Kebumen dengan wilayah pengaruhnya dapat mempengaruhi fungsi pokok suatu kota, karena menurut Richardson (2001:83) fungsi pokok suatu kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakang. Agar wilayah

pengaruh Kota Kebumen yang terletak di bagian timur terlayani, perlu suatu kota disebelah timur sebagai pusat pelayanan agar semua wilayah terlayani.

4.3. Analisis Hirarki Kota

Analisis hirarki kota menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu Skalogram Guttman, dan Indeks Sentralitas Terbobot. Penggunaan kedua teknik ini dengan pertimbangan bahwa terdapat pendekatan yang berbeda, sehingga hasil akhirnya dapat diperbandingkan. Persamaannya adalah menghasilkan hirarki kota serta sebaran fasilitas pelayanan kotanya. Skalogram Guttman menggunakan pendekatan terhadap kelengkapan jenis fasilitas pelayanan kota. Hasil akhir yang diperoleh berupa peringkat kota-kota menurut kelengkapan fasilitasnya. Skalogram Guttman merupakan pendekatan yang didasarkan atas kelengkapan jenis fasilitas pelayanan kota. Metoda ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas

Analisis Skalogram Guttman adalah analisis yang pertama dilaksanakan. Sebagai dasar analisis ini, dilakukan inventarisasi fasilitas umum yang ada di seluruh Kabupaten Kebumen. Jenis-jenis fasilitas yang berhasil dihimpun berjumlah 38 jenis fungsi pelayanan, yaitu :

1. Fasilitas Pemerintahan

- Kompleks Kantor Pemerintah Daerah

2. Fasilitas Lembaga Keuangan

- Bank Umum
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Kredit Kecamatan (BKK)

3. Fasilitas Ekonomi

- Pasar Permanen

- Pasar Non permanen
- Pasar Hewan
- Rumah Potong Hewan (RPH)
- Supermarket
- Koperasi Unit Desa
- Industri
- Hotel

4. Fasilitas Pendidikan

- Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iah (MI)
- SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- SMU
- Madrasah Aliyah
- SMK Ekonomi
- SMK Teknik
- Perguruan Tinggi

5. Fasilitas Kesehatan

- Rumah Sakit (RS)
- Rumah Bersalin
- Balai Pengobatan/Balai Kesehatan
- Puskesmas Rawat Inap
- Puskesmas
- Puskesmas Pembantu
- Praktek Dokter
- Praktek Bidan/Perawat

- Apotik
- Toko Obat
- Posyandu

6. Fasilitas Transportasi Komunikasi

- Terminal
- Stasiun KA
- Kantor Pos
- Angkutan Umum Penumpang
- Truk

7. Fasilitas Ibadat

- Mesjid
- Musholla/langgar
- Gereja
- Wihara

Setelah dilakukan uji kelayakan penggunaan analisis skalogram dengan proses perhitungan untuk mencapai angka koefisien reproduksibilitas (K_r) lebih besar 90, maka fasilitas yang diperhitungkan berjumlah 34 buah (Tabel IV. 11). Dari hasil perhitungan skalogram Guttman (Lampiran G) seperti pada tabel IV.12., maka terdapat 16 kelompok kota berdasarkan kelengkapan fasilitas. Kelompok XVI keberadaan kotanya hanya ditentukan oleh 2 (dua) jenis fasilitas yaitu SD dan SLTP. Ini berarti fasilitas SD dan SLTP berada di setiap kota.

TABEL IV. 12
PENGELOMPOKAN KOTA DARI HASIL ANALISIS SKALOGRAM

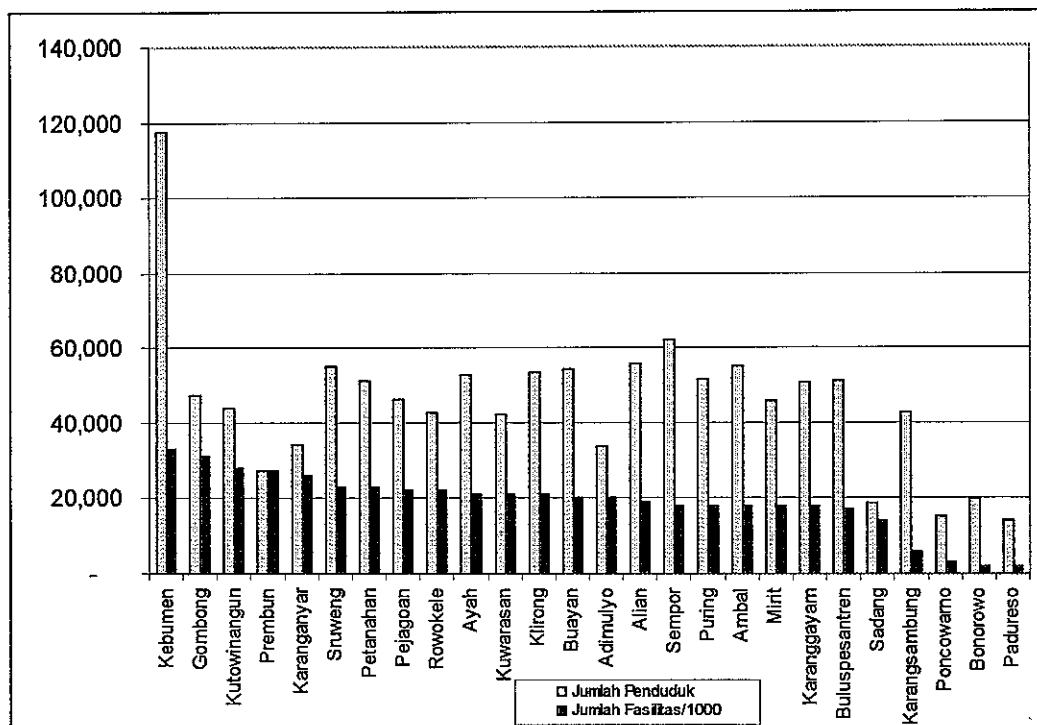
NO	Kelompok Kota	Jumlah Kota	%	% Kumulative	Jenis fasilitas penentu
1	2	3	4	5	6
	I	1	3.85	3.85	Supermarket, pasar hewan
	II	1	3.85	7.69	Pusrawat, Perguruan tinggi, RPH
	III	1	3.85	11.54	Rumah Sakit
	IV	1	3.85	15.38	Toko Obat
	V	1	3.85	19.23	SMK Ekonomi, Apotik, Terminal
	VI	2	7.69	26.92	Madrasah Aliyah (MA)
	VII	2	7.69	34.62	Stasiun KA
	VIII	3	11.54	46.15	SLTA Umum
	IX	2	7.69	53.85	SMK Teknik
	X	1	3.85	57.69	Balai Pengobatan
	XI	5	19.23	76.92	Gereja
	XII	1	3.85	80.77	Masjid, Mushola/langgar, praktek dokter
	XIII	1	3.85	84.62	KUD, Industri, Puskesmas, Pustu, praktek bidan, Posyandu, AUP, truk,
	XIV	1	3.85	88.46	Bank Umum, BPR, kantor pos,
	XV	1	3.85	92.31	Pasar permanen
	XVI	2	7.69	100.00	SD.MI, SMP/MTs
		26	100.00		
	nilai Kr	0.91			

Sumber : Hasil Analisis: 2004

Dari kelengkapan fasilitas, Kota Kebumen berada di peringkat pertama dengan memiliki 33 fasilitas berikutnya Kota Gombong dengan 31 fasilitas (Gambar 4.7)

Dari hasil skalogram, yang hanya memperhitungkan keberadaan fasilitas tanpa memperhatikan jumlah fasilitas, maka dapat terlihat bahwa ragam fasilitas terpusat di Kota Kebumen dan Kota Gombong. Kota-kota berikutnya adalah Kutowinangun, Prembun, Karanganyar, Sruweng.

Empat peringkat terkecil fasilitas yaitu terletak pada kecamatan-kecamatan baru seperti Karangasambung (sebelumnya bergabung dengan Sadang), Poncowarno (sebelumnya bergabung dengan Alian), Bonorowo (sebelumnya bergabung dengan Mirit) dan Padureso (sebelumnya bergabung dengan Prembun).



GAMBAR 4.7

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK DAN RAGAM FASILITAS

Sumber : Hasil Analisis, 2004

Dari hasil skalogram terlihat bahwa kota-kota yang terletak pada jalur utama memiliki fasilitas umum yang lebih lengkap, yaitu Kota Kebumen, Kota Gombong, Kota Kutowinangun, Kota Prembun, Kota Karanganyar dan Kota Sruweng.

Dari hasil perhitungan skalogram terdapat beberapa kota yang memiliki jumlah penduduk besar akan tetapi dari keragaman fasilitas lebih sedikit dari tempat lain (Gambar 4.7.). Keragaman jenis fasilitas Kota Gombong terbanyak ke dua sedangkan jumlah penduduk Kota Gombong nomor 13, hal tersebut menunjukkan fasilitas Kota Gombong juga digunakan oleh penduduk kota yang tidak memiliki fasilitas. Pada kota-kota di sekitar Kota Gombong seperti Karanganyar, Kuwarasan, dan Sempor, jumlah fasilitas yang dimiliki terbanyak 26 di Karanganyar

Untuk mendapatkan hirarki kota menggunakan perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot yang merupakan hasil skalogram dengan memperhitungkan frekuensi fasilitas yang ada. Indeks Sentralitas Terbobot ini menurut Rondinelli (1985:125) dengan asumsi bahwa keberadaan fasilitas yang jarang ada memberikan kontribusi pada sentralitas suatu kota.

TABEL IV.13
HASIL PERHITUNGAN INDEKS SENTRALITAS TERBOBOT

No	No Urut skalogram	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Skor	Hirarki
1	2	3	4	5	6
1	1	Kebumen	117,523	713,248	I
2	2	Gombong	47,294	538,963	I
3	4	Prembun	27,276	226,970	III
4	3	Kutowinangun	43,765	206,492	III
5	5	Karanganyar	34,178	162,890	IV
6	13	Buayan	54,207	136,887	IV
7	6	Sruweng	55,142	131,182	IV
8	7	Petanahan	51,012	124,142	IV
9	8	Pejagoan	46,217	111,008	IV
10	12	Klirong	53,635	99,701	IV
11	10	Ayah	52,655	93,146	IV
12	19	Mirit	45,857	92,544	IV
13	15	Alian	55,966	92,284	IV
14	18	Ambal	55,221	89,099	IV
15	11	Kuwarasan	42,101	85,833	IV
16	9	Rowokele	42,601	81,918	IV
17	17	Puring	51,689	73,992	IV
18	21	Buluspesantren	51,212	73,420	IV
19	16	Sempor	61,887	70,247	IV
20	14	Adimulyo	33,782	61,897	IV
21	22	Sadang	18,423	52,993	IV
22	20	Karanggayam	50,715	50,227	IV
23	23	Karangsambung	42,596	21,520	IV
24	24	Poncowarno	15,223	4,235	IV
25	25	Bonorowo	19,725	3,074	IV
26	26	Padureso	13,845	2,087	IV

Sumber : Hasil analisis 2004

Setelah diperhitungkan dengan interval kelas maka yang berada dalam interval Hirarki I berjumlah 2 kota, Hirarki II tidak ada, Hirarki III berjumlah 2 kota, Hirarki IV berjumlah 22 Kota. Kota hirarki II tidak terdapat di Kabupaten Kebumen disebabkan karena perbedaan skor yang sangat jauh yaitu Kota Kebumen (713) dengan Kota Padureso (2), sehingga intervalnya besar, mengakibatkan tidak ada kota yang memiliki skor di interval Hirarki II (gambar 4.9).

Dari perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot ini, terlihat bahwa Kota Kebumen dan Kota Gombang merupakan kota dengan Hirarki I, kemudian Kota Prembun dan Kota Kutowinangun adalah kota berhirarki III sedangkan lainnya termasuk kota hirarki IV.

Kota Kebumen memiliki Hirarki I, dikarenakan adanya fasilitas yang hanya terdapat di kota tersebut. Fasilitas tersebut terkait dengan fungsi Kota Kebumen sebagai pusat pemerintahan berupa perkantoran Pemda Kabupaten Kebumen. Fasilitas yang tidak dimiliki oleh Kota Kebumen adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Fasilitas yang pendukung utama Kota Kebumen adalah keberadaan supermarket, pasar hewan dan perguruan tinggi.

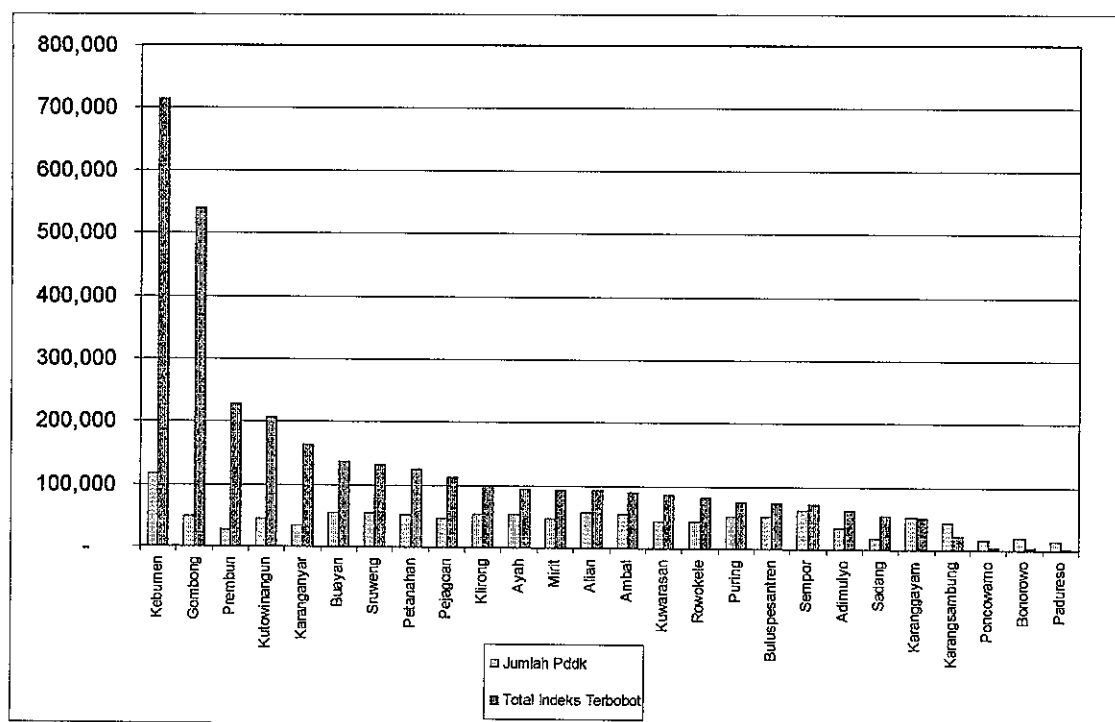
Kota Gombang memiliki hirarki I, dengan hanya memiliki perbedaan 2 (dua) fasilitas dari Kota Kebumen yaitu kantor Setda Pemda Kabupaten Kebumen dan Pasar Hewan dengan fasilitas yang tidak dimiliki oleh Kota Kebumen yaitu Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, tetapi tidak memiliki Balai Pengobatan dan Pasar Hewan.

Kota Gombang memiliki beberapa fasilitas yang jumlah lebih banyak dari Kota Kebumen, diantaranya Kota Gombang memiliki dokter praktek yang terdaftar sebanyak 50 orang sedangkan Kota Kebumen hanya 12 orang. Jumlah dokter ini ditunjang adanya fasilitas rumah sakit swasta berjumlah 2 buah dan 1 puskesmas rawat inap. Fasilitas perhotelan Kota Gombang berjumlah 7 buah sedangkan Kota Kebumen hanya memiliki 6

buah. Menurut Camat Gombong, fasilitas hotel ini merebak pada saat Kota Gombong diusulkan menjadi Kota Administratif pada tahun 1996/1997.

Pendapat Rondinelli tentang fungsi yang jarang ada dapat meningkatkan sentralitas, terbukti dari terjadi perubahan urutan peringkat kota. Kota Prembun yang semula nomor urut 4 menjadi nomor urut 3, sedangkan Kota Kutowinangun turun dari no 3 menjadi no.4. Perubahan mencolok terjadi pada Kota Buayan semula nomor 13 menjadi nomor 6, karena mempunyai sebuah pasar hewan dari 2 (dua) buah yang ada di Kabupaten Kebumen.

Pada sistem kota, kota dengan hirarki yang lebih tinggi berfungsi melayani kota-kota berhirarki lebih rendah, akan tetapi ternyata dari hasil perhitungan, kota dengan hirarki II tidak ada sehingga untuk menganalisis sistem kota di Kabupaten Kebumen langsung ke kota hirarki III.



GAMBAR 4.9

HASIL PERHITUNGAN INDEKS SENTRALITAS TERBOBOT

Sumber : Hasil analisis, 2004

4.4. Kinerja Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen

Analisis ini merupakan deskriptif dari analisis kesesuaian Kota Gombong dengan variabel-variabel sebuah kota pusat pertumbuhan dan analisis internal Kota Gombong.

4.4.1. Analisis Kesesuaian Kota Gombong Sebagai Pusat Pertumbuhan

Kesesuaian peran kota sebagai pusat pertumbuhan merujuk dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan (Parr,1999) dan pusat pertumbuhan dari sisi fungsional (Kadarijah 1985:24) adalah sebagai berikut :

(1) Konsentrasi prasarana kota pada pusat pertumbuhan,

Menurut Parr (1999) pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial adalah faktor pertama dari tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan. Peran fasilitas dalam perkembangan kota dinyatakan oleh Friedman (1979) bahwa kota dengan perlengkapan fasilitas yang dimiliki serta perkembangan yang lebih maju dari wilayahnya merupakan suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah.

Konsentrasi prasarana berkaitan ketersediaan fasilitas perkotaan. Pendekatan konsentrasi prasarana dengan analisis sistem perkotaan, sehingga suatu pusat pertumbuhan mempunyai kaitan langsung dengan hirarki yang disandangnya. Hasil analisis hirarki kota merupakan faktor pertama untuk menentukan tingkat peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan.

Kota Gombong sebagai kota dengan hirarki I memiliki fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan Kota Kebumen sebagai ibukota kabupaten. Berdasarkan analisis hirarki kota, Kota Gombong dikelilingi oleh kota berhirarki IV, hal ini menunjukkan bahwa di Kota Gombong telah terjadi penumpukan fasilitas perkotaan atau terjadi

ketidakmerataan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gombong sudah menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan juga memperlihatkan ketergantungan kota-kota sekitarnya terhadap fasilitas Kota Gombong.

(2) Konsentrasi aktivitas perekonomian (*aglomerasi*)

Menurut Parr (1999), konsentrasi/aglomerasi aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) adalah faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan. Menurut Tjahjati (PWK Okt 1993:13), perkembangan kawasan sangat dipengaruhi tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi kota. Pernyataan tersebut cocok dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia, aglomerasi industri di kota menengah dan kecil sangat sedikit sehingga aktivitas perekonomian di kota menengah dan kecil lebih banyak kepada interaksi perekonomian antara kota dengan kota yang lain maupun kota dengan wilayah pengaruhnya yang secara tidak langsung adalah suatu sistem produksi.

Interaksi kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Hal ini dinyatakan Richardson (2001:60) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Kota Gombong tidak memiliki industri besar yang mempunyai keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*), di Kota Gombong hanya terdapat beberapa industri pengolahan menengah dan kecil yang hanya memiliki kaitan ke belakang karena daerah sekitarnya hanya pemasok bahan baku, antara lain

pabrik kacang dan industri bahan bangunan seperti eternit dan cat, yang tidak membutuhkan industri pengolahan lanjut.

Menurut hasil analisis interaksi ekonomi dan analisis wilayah pengaruhnya, Kota Gombong mempunyai interaksi ekonomi yang tinggi terhadap wilayah pengaruhnya yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring. Interaksi ekonomi yang tinggi ini akibat dari terjadinya konsentrasi ekonomi di Kota Gombong, antara lain keberadaan bank dan Pasar Wonokriyo yang tidak didukung oleh pasar-pasar kecil di wilayah sekitarnya, seperti Sempor tidak memiliki pasar sendiri, pasar di Kuwarasan tidak buka setiap hari.

(3) Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya,

Menurut Parr (1999) keunggulan komperatif adalah faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan. Hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan pusat pertumbuhan dengan melihat aspek keunggulan komperatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan teori ekonomi basis, sektor unggulan yang harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999: 141, Glasson 1990; 64).

Hasil analisis sektor basis merupakan faktor ketiga untuk menentukan tingkat peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan. Sektor-sektor basis Kecamatan Gombong adalah sektor sekunder dan tersier, yaitu : (1). Angkutan dan Komunikasi, (2). Bangunan dan Konstruksi, (3). Jasa-jasa, (4). Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5). Industri Pengolahan dan (4). Perdagangan.

Sesuai hasil analisis keterkaitan ekonomi, Kota Gombong sangat berperan dalam perdagangan dan jasa serta pelayanan umum dan sosial, hal ini ditunjang oleh letaknya yang sangat strategis karena di jalur utama selatan Jawa. Hal tersebut

didukung oleh RTRW Kabupaten Kebumen yang telah menetapkan Kota Gombong sebagai pusat Sub Wilayah Pembangunan II dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa berskala lokal, pusat pemerintahan kecamatan dan permukiman.

:(4). Fungsional

Menurut Kadariah (1985:24) kutub pertumbuhan dapat ditinjau dari pengertian fungsional yang digambarkan sebagai suatu kelompok perusahaan cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang merangsang kehidupan ekonomi.. Apabila merujuk pada Boudeville (1978), suatu pusat pertumbuhan regional dipengaruhi adanya keberadaan suatu kelompok industri. Sehingga suatu perkotaan membutuhkan suatu kawasan industri yang merupakan kelompok industri yang mengalami ekspansi yang akan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke daerah sekitarnya yang berada dalam cakupannya (Gore, 1984:92);

Kota Gombong tidak sesuai menjadi pusat pertumbuhan apabila diterapkan kriteria fungsional klasik, bahwa pusat pertumbuhan berkaitan dengan keberadaan suatu industri karena Kota Gombong tidak memiliki kelompok perusahaan cabang industri besar ataupun suatu kawasan industri, Kota Gombong hanya memiliki industri menengah walaupun salah satu sektor basisnya adalah industri pengolahan. Kota Gombong tumbuh sebagai pusat pertumbuhan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan wilayah.

TABEL IV. 14
TINGKAT PERAN KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN

No	Faktor	Parameter	Hasil analisis	Kesesuaian faktor
1	2	3	4	5
1	Prasarana kota	Semakin lengkap fasilitas kota semakin sesuai sebagai pusat pertumbuhan	Kota Gombang mempunyai hirarki I, hal ini menunjukkan Kota Gombang mempunyai fasilitas kota yang baik	Besar
2	Konsentrasi aktivitas perekonomian (<i>aglomerasi</i>)	Terdapat industri yang memiliki keterkaitan ke depan (<i>forwad linkage</i>) dan kaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>)	Kota Gombang hanya memiliki industri menengah dan kecil yang memiliki keterkaitan ke belakang, hanya mengolah bahan baku antara lain pabrik pengolahan kacang tanah	Sedang
		Semakin tinggi interaksi semakin tinggi peran kota sebagai pusat pertumbuhan	Kota Gombang mempunyai interaksi ekonomi yang tinggi terhadap wilayah pengaruhnya di bagian barat Kabupaten Kebumen yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring	Besar
		Semakin tinggi tingkat pemusatan (<i>aglomerasi</i>) kegiatan sosial ekonomi kota semakin berkembang wilayahnya	Pemusatan kegiatan sosial ekonomi dilihat dari pemusatan fasilitas sosial dan ekonomi, Kota Gombang merupakan kota dengan hirarki I	Besar
3	Keunggulan komperatif	Semakin banyak sektor basis semakin banyak kemampuan untuk melayani daerah lain.	Kecamatan Kota Gombang memiliki sektor basis terbanyak di Kabupaten Kebumen. Sektor-sektor basis Kecamatan Gombang adalah sektor sekunder dan tersier.	Besar

Lanjutan

No	Faktor	Parameter	Hasil analisis	Kesesuaian faktor
1	2	3	4	5
4	Fungsional	Adanya industri besar/utama atau kawasan industri semakin sebagai pusat pertumbuhan	Kota Gombong tidak memiliki kelompok industri besar ataupun kawasan industri, Kota Gombong hanya memiliki industri menengah walaupun salah satu sektor basisnya adalah industri pengolahan	kecil

Sumber : hasil analisis, 2004

Dari hasil analisa faktor yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan, tingkat peran kota Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena Kota Gombong menjadi suatu sub sistem perkotaan yang memiliki interaksi ekonomi yang besar terhadap wilayah Kabupaten Kebumen bagian barat di 8 kecamatan yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring. Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan bukan berdasar pada keberadaan industri tetapi lebih mengarah sebagai kota yang memberikan pelayanan ke wilayah belakangnya yang didominasi sektor pertanian.

4.4.2. Analisis Internal Kota Gombong

4.4.2.1. Analisis Struktur Tata Ruang Kota Gombong

Dalam analisis struktur tata ruang yang dimaksud adalah bentuk ruang yang menciptakan pola ruang yang terwujud oleh fungsi kawasan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan daya dukung ruang fisik yang telah ada. Struktur tata ruang di kawasan penelitian menurut RUTRK IKK Gombong Tahun 1990-2010 :

- ◆ BWK I dengan wilayah Kelurahan Wonokriyo seluas 121,00 Ha merupakan kawasan perdagangan skala kota, kawasan hiburan dan rekreasi, perumahan

biasa dan perumahan yang mempunyai nilai fungsional tinggi, industri besar, kawasan terminal dan kawasan pertanian produktif.

- ◆ BWK II dengan wilayah Kelurahan Gombong seluas 125,00 Ha merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang, transisi dari perdagangan ke perumahan murni, terdapat pertokoan, jumlah tidak terlalu besar akibat perkembangan kawasan perdagangan di pusat kota, kawasan perkantoran pemerintahan dan kantor pendukung kegiatan ekonomi seperti bank, kantor telepon, dan PLN.
- ◆ BWK III dengan wilayah Desa Semondo seluas 123,00 Ha merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang, dalam jumlah kecil terdapat kawasan pertokoan yang sangat dipengaruhi perkembangan perdagangan pusat kota, kawasan transisi dari perdagangan ke perumahan murni, kawasan perhotelan dan restoran.
- ◆ BWK IV dengan wilayah Desa Sidayu seluas 76,00 Ha dan Desa Semanding seluas 171,00 Ha merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah, merupakan daerah militer, kawasan pertanian produktif, kawasan industri rumah tangga.
- ◆ BWK V dengan wilayah Desa Wero seluas 132,98 Ha dan Desa Patemon seluas 127,00 Ha merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang, dalam jumlah kecil ada warung /toko yang melayani desa, pusat pelayanan kesehatan dan kawasan pendidikan.
- ◆ BWK VI dengan wilayah Desa Kemukus seluas 192,00 Ha dan Desa Kalitengah seluas 218,79 Ha merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah, dalam jumlah kecil ada warung /toko yang melayani desa, dan industri bahan bangunan.

- ◆ Pada saat penentuan RUTRK IKK Kota Gombong Tahun 1990, Desa Wonosigro, Desa Klopogodo, Desa Panjangsari, Desa Kedungpuji, dan Desa Banjarsari tidak termasuk wilayah Kota Gombong. Tetapi menurut BPS Kabupaten Kebumen, berdasarkan Potensi Desa/Kelurahan Sensus Pertanian 2003, pada saat sekarang Kota Gombong telah meluas hampir ke seluruh wilayah administratif Kecamatan Gombong sehingga dari ke empatbelas desa/kelurahan hanya 1 (satu) yang bukan desa dengan sifat perkotaan, yaitu Desa Panjangsari (Gambar 3.4). Kondisi tersebut membuat ke lima desa diatas belum mempunyai peruntukan kawasan. Berdasarkan pengamatan ke lima desa tersebut merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah, dalam jumlah kecil ada warung /toko yang melayani desa dan terdapat industri rumah tangga.

Pada BWK I, Pasar Wonokriyo sudah merupakan pasar regional bukan hanya pasar kota. Keberadaan kawasan hiburan sudah tidak ada dengan ditutupnya bioskop sehingga kawasan hiburan bergeser ke BWK IV karena terdapat obyek wisata Benteng Van Der wijck. Di BWK I terdapat terminal non bus yang sudah nenjangkau pelayanan regional. Di BWK I terdapat pusat kesehatan sekaligus pusat pendidikan dengan keberadaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan Akademi Perawat Muhammadiyah yang mempunyai jangkauan regional.

Pada BWK II, terdapat kegiatan peningkatan perdagangan terutama sepanjang jalan utama sehingga terdapat pusat perdagangan berupa pertokoan. Layanan pertokoan tersebut sudah regional dengan penyediaan barang-barang khusus seperti elektronik dan keberadaan fasilitas pendukung seperti perbankan.

Pada BWK III, kegiatan perekonomian yang menonjol adalah perdagangan di sepanjang jalan utama serta keberadaan hotel dan restoran. Melihat bentuk fisik dan kapasitas serta pengunjungnya maka hotel dan restoran tersebut mempunyai jangkauan regional karena melayani travel dan bus malam.

Pada BWK IV, kawasan ini merupakan kawasan militer dengan adanya keberadaan kompleks militer komando pendidikan Secaba. Kawasan ini juga merupakan kawasan wisata dan hiburan karena di dalam kompleks militer tersebut terdapat benteng Van Der Wijck yang sudah dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan kolam renang Tirto Manunggal, satu-satunya kolam renang umum yang ada di Kabupaten Kebumen.

BWK V merupakan kawasan pendidikan karena terdapat beberapa sekolah menengah dan juga terdapat Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) milik Departemen Kesehatan yang juga dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya.

BWK VI merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah dan memiliki beberapa industri pengolahan seperti pembuatan eternit. Pada kawasan ini juga terdapat beberapa sekolah yang melayani sampai keluar Kota Gombong. Terdapat perkembangan pada kawasan ini terutama dengan adanya jalan lingkar selatan Gombong. Secara umum, di sepanjang jalan utama kota (Jl. Yos Sudarso) mempunyai kecenderungan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, selain itu dengan meningkatnya kegiatan ekonomi akan mendorong pula dalam penyediaan fasilitas. Hal ini menunjukkan terjadinya pemusatan perdagangan dan jasa-jasa pendukungnya. Keberadaan industri, seperti industri pengolahan kayu dan industri bahan bangunan di Kota Gombong terdapat di sepanjang jalan utama. Sementara terdapat pula industri pengolahan kayu yang besar di sebelah barat yang ternyata sudah masuk wilayah administrasi Kecamatan Sempor.

Perumahan menyebar mengikuti ruas jalan terutama ke arah utara seperti pada Peta Penggunaan Tanah Kota Gombong terbaru (triwulan I tahun 2004). Hal tersebut juga diakibatkan adanya perumahan di sebelah utara yaitu di Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor.

Ditinjau dari luas tanah menurut penggunaannya maka Kota Gombong luasnya 1.949 Ha, yang berupa sawah 1.060,080 Ha , tegalan 71,820 Ha, pekarangan 711,850 Ha dan lainnya seluasnya 105,320 Ha atau 54,38 % merupakan lahan pertanian/sawah tetapi melihat pengaruh dari pusat kota maka perkembangan cenderung mengarah pada fungsi kota. Hal tersebut sesuai dengan survei BPS tahun 2003. Hal tersebut dapat dijadikan penyeimbang tata ruang.

4.4.2.2. Analisis Fasilitas

A. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Di Kota Gombong terdapat beberapa jenis dan sifat perdagangan, yang secara umum di bagi sebagai berikut:

- a. Kegiatan perdagangan informal/tradisional, termasuk kaki lima seta pasar temporer.
- b. Kegiatan perdagangan dan jasa semi informal/semi tradisional termasuk didalamnya adalah pasar yang tetap, toko dan kios-kios dipinggir jalan.

Di Kota Gombong terdapat pasar Wonokriyo yang juga merupakan pasar regional karena melayani wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga kegiatan bongkar muat dalam jumlah besar dapat dilayani di sini. Pasar Wonokriyo dapat menampung berbagai jenis barang dagangan tidak terbatas bahan makanan tetapi meliputi sandang dan kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang besar dan juga merupakan pasar grosir

sebagai salah satu simpul distribusi ke kecamatan sekitarnya. Pasar Wonokriyo ternyata juga merupakan pasar temporer karena terdapat Pasar Pagi yang berlangsung dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Walaupun pasar temporer ternyata juga merupakan pasar grosir sayuran bagi para pedagang di kecamatan sekitar. Terdapat sebuah Pasar Hewan yaitu Pasar Hewan Purbowangi yang terletak ± 3 sebelah barat Kota Gombong. Walaupun secara administratif berada di wilayah Kecamatan Buayan akan tetapi secara ekonomi lebih dekat ke Kota Gombong. Keberadaan perbankan berupa 6 bank umum dan 3 Bank Perkreditan Rakyat sangat menunjang kegiatan perekonomian. Terdapat bank swasta yang tidak ada di Kota Kebumen, yaitu Bank Mandiri.

Dengan fasilitas perdagangan dan jasa yang cukup lengkap, menunjukkan Kota Gombong dapat melayani wilayah sekitarnya atau memiliki jangkauan regional.

B. Fasilitas Perkantoran

Di Kota Gombong, terdapat fasilitas perkantoran pemerintah yang cukup lengkap karena Kota Gombong sebelumnya merupakan ibu kota kawedanan atau pembantu bupati. Dari segi ketersediaan fasilitas perkantoran, beberapa kantor mempunyai tingkat kewenangan sama dengan kantor yang ada di Kota Kebumen. Hal tersebut antara lain pada BRI Cabang Gombong dan PLN Ranting Gombong.

C. Fasilitas Pendidikan

Kota Gombong memiliki fasilitas pendidikan dasar mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Akademi. Jumlah TK di Gombong 43 sekolah, SD berjumlah 39 sekolah, 3 diantaranya swasta, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), di Kota Gombong berjumlah 4 buah semuanya swasta. Sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) di Kota Gombong terdiri 4 SLTP Negeri, SLTP Swasta berjumlah 4 dan 1 (satu) MTs Negeri. Fasilitas pendidikan dasar tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Gombong, bahkan dari hasil survei ditemukan bahwa masyarakat yang memanfaatkan SLTP juga berasal dari kecamatan sekitarnya dengan alasan antara lain mutu dan kedekatan lokasi.

Pada tingkat SLTA, Kota Gombong memiliki 1 SMU Negeri, SMU Swasta 4 buah, SMK Swasta rumpun ekonomi 4 buah, 1 SMK Negeri rumpun teknik, SMK swasta rumpun teknik 3 buah dan sebuah Madrasah Aliyah. Jumlah SMUN di Kabupaten Kebumen terbatas, di wilayah barat Kabupaten Kebumen hanya terdapat di Karanganyar dan Gombong sehingga melayani wilayah di sekitarnya, sedangkan SMK Negeri Teknik, dahulu STM Negeri, di wilayah barat hanya terdapat Kota Gombong.

Kota Gombong memiliki sebuah Akademi Perawat (AKPER) Muhammadiyah dengan jumlah mahasiswa 301 orang, yang berasal dari berbagai daerah.

Dengan fasilitas pendidikan yang dimiliki maka Kota Gombong menyediakan layanan melampaui batas administrasinya.

D. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Gombong lebih lengkap daripada Kota Kebumen. Di Kota Gombong terdapat 2 buah Rumah Sakit Umum swasta yang besar yaitu RS PKU Muhammadiyah dan RS Palang Biru dan sebuah Puskesmas dengan rawat inap di Desa Wero. Jangkauan pelayanan ke dua rumah sakit swasta tersebut sangat luas terutama di wilayah barat Kabupaten Kebumen, karena memiliki kelengkapan seperti dokter spesialis yang cukup lengkap. Sedangkan rumah sakit bersalinnya ada dua buah.

Jumlah apotek yang ada di Kota Gombong sebanyak 3 buah dan memiliki 4 buah toko obat.

4.4.2.3. Analisis Prasarana dan Sarana Transportasi

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik akan memperlancar perkembangan wilayah, karena membantu memperlancar proses sebaran kegiatan, barang dan jasa dari maupun ke Kota Gombong.

Sistem Transportasi yang ada di Kota Gombong merupakan sistem transportasi darat baik untuk penumpang maupun barang. Yang meliputi jaringan antar kota (regional) arah Purwokerto-Cilacap dan Semarang-Yogyakarta. Selain sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan industri, Kota Gombong juga merupakan kota transit pariwisata sehingga jalur transportasinya padat.

Prasarana transportasi yang ada adalah jaringan jalan arteri/propinsi, jalan kolektor/kabupaten dan jalan lokal. Sarana transportasi yang terdapat di Kota Gombong adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Selain kendaraan roda dua dan empat, sarana transportasi yang terdapat di Kota Gombong berupa terminal bus, terminal non bus, stasiun KA, becak dan didukung oleh Pom Bensin di Desa Wero.

Kota Gombong di lalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan Purwokerto-Kebumen-Purworejo. Kota Gombong merupakan simpul penghubung antara jalur Banjarnegara-Gombong dengan jalur utama tersebut. Kondisi tersebut memberikan keuntungan sebagai modal pengembangan Kota Gombong. Hal ini disebabkan karena Kota Gombong memiliki hubungan tidak hanya dalam skala kabupaten tetapi juga memiliki aksesibilitas regional yang menerus sehingga mobilitasnya tinggi.

Kota Gombong memiliki terminal bus, akan tetapi kurang berfungsi, dan stasiun kereta api. Sistem transportasi antar kota dilayani oleh bus dan non bus yang melewati jalan propinsi Gombong-Kebumen-Prembun untuk lalu lintas yang bersifat regional dan menerus.

Trayek angkutan umum antar kota antar propinsi yang melintasi Gombong antara lain Tasikmalaya-Semarang, Yogyakarta-Bandung, Solo-Bandung, dan Surabaya – Bandung. Sedangkan dalam propinsi antara lain Purwokerto- Semarang, Cilacap-Semarang dan Gombong-Semarang.

Jalur Gombong – Kebumen termasuk padat, terlihat bahwa trayek dalam kabupaten yang termasuk dominan adalah trayek angkutan umum penumpang jalur Jatijajar-Gombong-Petanahan-Kebumen-Prembun , tersedia 58 buah minibus kapasitas 14-16 tempat duduk dan Jatijajar-Gombong-Karanganyar-Petanahan-Kebumen tersedia 38 minibus kapasitas 14-16 tempat duduk sehingga apabila dihitung keseluruhan trayek dalam kabupaten maka antara Gombong-Kebumen tersedia kurang lebih 128 minibus dengan kapasitas setiap bus antara 12-16 tempat duduk.

Kota Gombong merupakan salah satu simpul transportasi penting di di Kabupaten Kebumen dengan adanya angkutan umum pedesaan. Trayek angkutan penumpang pedesaan yang berpusat di Kota Gombong sejumlah 16 trayek angkutan umum penumpang (Lampiran D). Trayek-trayek ini yang melayani daerah sekitar Kota Gombong.

Kota Gombong terletak pada jalur Kereta Api Jawa bagian selatan, dan tergabung dalam Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto. Apabila ditinjau dari kelas stasiun, Kota Gombong memiliki stasiun KA kelas I, sama dengan Kota Kebumen.

Stasiun Gombong menghubungkan Kota Gombong dengan kota-kota lain menggunakan trayek Kereta Api yang berhenti di Stasiun sebagai berikut :

1. KA Bisnis Sawunggalih Utama Pagi dan Sore jurusan Kutoarjo-Jakarta. Pasar Senen
2. KA Ekonomi Sawunggalih Sore jurusan Kutoarjo-Jakarta Pasar Senen
3. KA Ekonomi Progo jurusan Yogyakarta Lempuyangan-Jakarta Pasar Senen
4. KA Ekonomi Bengawan jurusan Solo Jebres-Jakarta Tanah Abang
5. KA Ekonomi Gaya Baru Malam Selatan jurusan Surabaya-Jakarta Pasar Senen
6. KA Ekonomi Kahuripan jurusan Kediri-Bandung Kiara Condong
7. KA Ekonomi Sawunggalih Selatan jurusan Kutoarjo-Bandung Kiara Condong
8. KA Ekonomi Pasundan Jurusan Surabaya – Bandung Kiara Condong
9. KA Ekonomi Logawa Jurusan Jember-Surabaya-Purwokerto
10. KA Eksekutif Taksaka Siang Jurusan Yogyakarta – Jakarta (berhenti bila ada penumpang)

KA Eksekutif Taksaka tidak berhenti di Stasiun Kebumen, sehingga penumpang yang akan naik kereta ini harus berangkat dari Stasiun Gombong. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun Gombong memiliki KA yang singgah lebih banyak dari Stasiun Kebumen.

Penumpang yang memanfaatkan Stasiun Gombong lebih banyak dari Stasiun Kebumen seperti pada tabel IV.15

TABEL IV.15
PERBANDINGAN KEGIATAN
STASIUN GOMBONG DAN STASIUN KEBUMEN

No	Indikator Kegiatan	Stasiun Gombong		Stasiun Kebumen	
		Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2001	Tahun 2002
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penumpang KA dari stasiun ini (orang)	288.861	260.769	248.064	222.711
2	Jumlah Bagasi yang dikirim dari stasiun ini (ton)	1.4	-	28.280	38.560

Sumber : Stasiun Gombong dan BPS Kebumen



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

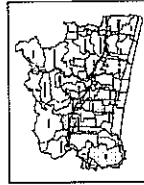
KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA
Kondisi Transportasi di Kota Gombong

KETERANGAN :

- Batas kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel KA
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- Desa

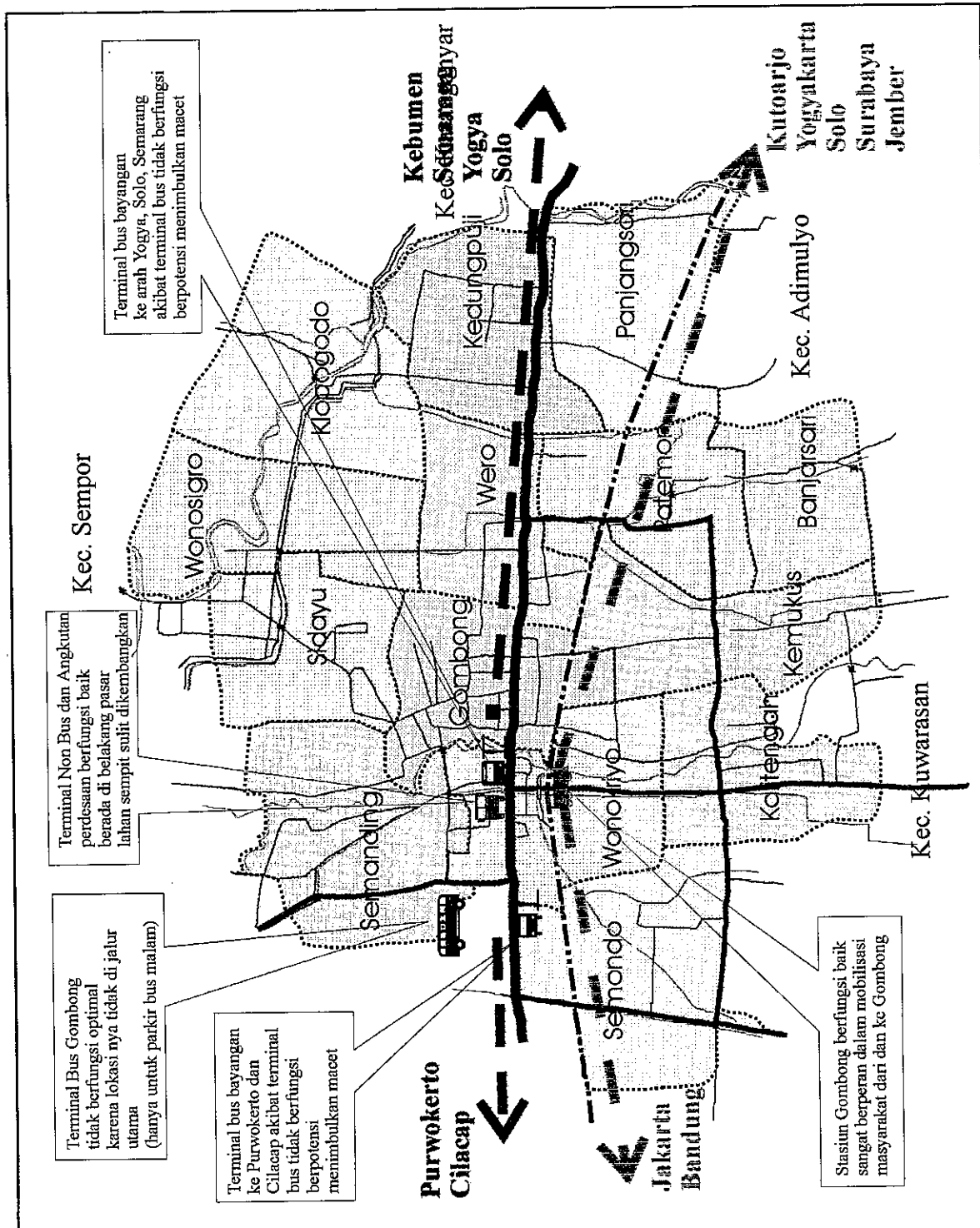
- Terminal Non Bus
- Terminal Bus
- Terminal Bayangan
- Arah Perjalanan Bus
- Stasiun Kereta Api
- Arah Perjalanan KA



Nomor Gambar : 14-11
Halaman : 180

SKALA 1 : 10.000

Sumber : Analisis Transportasi Kota Gombong 2004



Berdasarkan keterangan Kepala Stasiun Gombong, Stasiun Gombong setiap bulan memberangkatkan ke Jakarta antara 5.000-8.000 orang, ke Bandung (Kiara Condong) 5.000-7.000 orang dan ke jurusan Surabaya sekitar 1.500 orang per bulan. Sedangkan penumpang yang turun di Gombong dari Jakarta antara 4.000-5.000 orang, sedangkan dari Bandung (Kiara Condong) antara 4.000-6.000 orang per bulan.

Menurut Kepala Stasiun Gombong, salah satu penyebab penumpang KA dari Stasiun Gombong karena letak stasiun yang strategis dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan terjadinya perpindahan moda angkutan. Bagi para calon penumpang bisa turun di jalan utama Kota Gombong lalu jalan kaki ke Stasiun atau angkutan umum perdesaan bisa langsung ke stasiun.

4.5. Analisis Potensi dan Peluang Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan

4.5.1. Potensi Kota Gombong sebagai Pusat Pertumbuhan

- ◆ Potensi Kota Gombong yang strategis terletak di wilayah barat Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan salah satu potensi dasar bagi perkembangan Kota Gombong selanjutnya.
- ◆ Posisi Kota Gombong yang dapat menghubungkan Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen dapat meningkatkan jaringan perdagangan dengan Jawa Tengah bagian Tengah.
- ◆ Kondisi topografi Kota Gombong yang relatif datar merupakan potensi tersendiri, sehingga dalam pengembangan tata ruang tidak dipengaruhi oleh kondisi topografi.
- ◆ Tersedianya fasilitas perkotaan yang dapat mendukung sebagai pusat pertumbuhan antara lain fasilitas-fasilitas dengan tingkat jangkauan pelayanan regional seperti sarana pendidikan, sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana perbankan dan sarana transportasi.

- ◆ Terdapat potensi perekonomian yang masih dapat dikembangkan yaitu adanya pasar temporer, Pasar Pagi. Pasar Pagi ini belum diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh Pemda Kabupaten Kebumen.
- ◆ Masyarakat Kota Gombang terkenal sebagai masyarakat yang terbuka sehingga mudah menerima perubahan dalam berbagai bentuk investasi swasta.

4.5.2. Kekurangan Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan

- ◆ Lahan tidak terbangun yang tersedia di Kota Gombang mencapai 54 % dari seluruh wilayah, akan tetapi sebagian besar adalah sawah beririgasi teknis, sehingga apabila akan mengembangkan Kota Gombang dengan mendirikan kawasan industri harus berada di luar wilayah. Hal ini membutuhkan perencanaan Kota Gombang yang diperluas.
- ◆ Kegiatan perekonomian di Kota Gombang terpusat sepanjang jalan utama kota sehingga apabila tidak disebarakan maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di depan pasar Wonokriyo.
- ◆ Terdapat fasilitas yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan seperti terminal bus Gombang, sehingga fasilitas tersebut tidak efektif dan mengurangi tingkat pelayanan kota.

4.5.3. Peluang Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan

- ◆ Wilayah belakang Kota Gombang, seperti Kecamatan Ayah, Buayan dan Sempor memiliki potensi wisata yang sangat besar, seperti keberadaan Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Karang Bolong, Pantai Ayah dan Bendungan Sempor, sehingga Kota Gombang dapat berperan sebagai kota transit wisata.
- ◆ Kandungan bahan tambang di wilayah selatan Kota Gombang sangat besar, hal ini antara lain dari rencana pembukaan Pabrik Semen Gombang. Sebagai kota terdekat

yang memiliki fasilitas lengkap, maka apabila pabrik semen tersebut terealisasi maka akan meningkatkan perekonomian di Kota Gombang.

4.5.4. Tantangan Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan

- ◆ Kota Gombang telah memiliki beberapa fasilitas pelayanan regional, akan tetapi kota-kota lain terutama kota-kota kecil dan menengah di sebelah barat Kota Gombang seperti Sumpiuh dan Tambak (Kabupaten Banyumas) juga sudah membangun fasilitas perekonomian seperti toko swalayan. Walaupun fasilitas tersebut masih sebatas pelayanan kota, akan tetapi akan mengurangi para pembeli yang biasa berbelanja di Kota Gombang.
- ◆ Dalam pengembangan kota, dimana penggerak utamanya adalah investasi terutama dari luar, maka Kota Gombang harus bersaing dengan kota-kota lain untuk menarik investasi. Hal ini menuntut Kota Gombang, dalam hal ini Pemda Kabupaten Kebumen, agar dapat menciptakan kondisi berinvestasi yang baik.

4.6. Analisis Peran Kota Gombang sebagai Pusat Pertumbuhan dalam Sistem Perwilayahan Kabupaten Kebumen

Analisis peran Kota Gombang dalam perwilayahan di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keluaran analisis peran kota, analisis wilayah pengaruh, analisis hirarki kota dan analisis tingkat peran kota..

Menurut RTRW Revisi Kabupaten Kebumen Tahun 2003, sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen telah dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Pembagian SWP dalam Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, seperti telah diterangkan pada sub bab 3.1.3. Perwilayahan Perencanaan Kabupaten Kebumen (halaman 91).

Berdasarkan RTRW tersebut, secara keruangan kebijakan perwilayahan Kabupaten Kebumen sudah menyebarkan pusat pertumbuhan di bagian timur, tidak hanya di Kota Kebumen (bagian tengah) dan Kota Gombang (bagian barat). Tetapi untuk SWP III (bagian timur) yang berpusat di Prembun harus mendapatkan perlakuan khusus agar dapat menjadi pusat pertumbuhan utamanya di Kabupaten Kebumen sebelah timur, karena dari analisis yang telah dilakukan, Kota Prembun walaupun mempunyai skor terbesar ke tiga sebenarnya hanya berada di range hirarki III. Hal ini menunjukkan belum ada pemusatan fasilitas baik jenis maupun jumlahnya.

Dari segi perwilayahan, Kabupaten Kebumen sangat luas yaitu 128.111,5 Ha terdiri dari dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan, hal ini dapat menimbulkan ketidak seimbangan pelayanan. Ketidak seimbangan ini terjadi karena dari hasil analisis wilayah pengaruh sub sistem Kota Gombang melayani 9 kecamatan yang berada di bagian barat Kabupaten Kebumen dan sub sistem Kota Kebumen melayani 17 kecamatan yang berada di bagian tengah dan timur Kabupaten Kebumen.

Posisi Kota Gombang dan luas wilayah pengaruhnya sudah ideal karena berdasarkan survei tidak ada yang mengalami kesulitan transportasi maupun kelengkapan fasilitas yang ada. Kota Gombang jarak terjauh ke Ayah yaitu 16,17 km sementara ke arah utara yaitu Sempor berjarak 3,3 km.

Posisi Kota Kebumen secara geografis terletak di tengah wilayah sehingga dengan jangkauan pelayanan yang luas maka posisi tersebut tidak menguntungkan bagi warga di sebelah timur karena jarak yang jauh yaitu Mirit 24,07 km sementara ke arah utara jarak terjauh Sadang 26 km sehingga menimbulkan kesejangan jangkauan pelayanan.

Pada penelitian ini, berdasarkan analisis peran kota maka Kota Gombang mempunyai peran:

1. Pusat Pelayanan Umum dan Sosial
2. Pusat komersial dan pelayanan jasa
3. Pusat pemasaran dan perdagangan regional
4. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian
5. Pusat transportasi dan komunikasi regional
6. Pusat Transformasi Sosial

Berdasarkan analisis wilayah pengaruh mendapatkan bahwa Kabupaten Kebumen terbagi dalam dua wilayah pengaruh yaitu Kota Kebumen dan Kota Gombang. Sistem kota di Kabupaten Kebumen terdiri dari dua sub sistem kota yaitu :

1. Sistem Kota Gombang terdiri dari:

- Kota Gombang, Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, Puring.

2. Sistem Kota Kebumen terdiri dari:

- Kota Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Alian, Klirong, Kutowinangun dan Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Ambal, Poncowarno, Karang sambung, Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Sadang.

Berdasarkan analisis hirarki kota dengan menggunakan Skalogram dan Indeks Sentralitas Terbobot mendapatkan bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat 2 kota hirarki I, 2 kota hirarki 3 dan 22 kota hirarki 4.

Hirarki I : Kota Kebumen dan Gombang

Hirarki II : -

Hirarki III : Kecamatan Prembun dan Kutowinangun

Hirarki IV : Kecamatan Ayah , Pejagoan, Karanganyar Kecamatan Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal,, Mirit, Bonorowo, Padureso, Alian, Poncowarno, Sruweng, Adimulyo, Kuwarasan, Rowokele, Sempor, Karanggayam , Karangsambung dan Sadang.

Hal tersebut menunjukkan adanya pemusatan fasilitas pada kedua kota utama di Kabupaten Kebumen yaitu Kota Kebumen dan Kota Gombong karena tidak adanya kota hirarki II.

Dari analisis skalogram dan Indeks Sentralitas Terbobot, maka Kota Gombong telah memiliki fasilitas yang mengarah ke pada kota jasa perdagangan, jasa kesehatan, industri dan pendukung pariwisata, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan dan jumlah beberapa fasilitas :

1. Fasilitas pasar dan pertokoan, keberadaan pasar dan toko berdasarkan analisis interaksi ekonomi dimanfaatkan melebihi batas administrasi Kecamatan Gombong.
2. Fasilitas hotel di Kota Gombong berjumlah tujuh buah, jumlah ini lebih banyak dari Kota Kebumen.
3. Fasilitas hiburan dan pariwisata , di Kota Gombong terdapat Benteng Van der Wijk
4. Fasilitas kesehatan, di Kota Gombong terdapat dua rumah sakit swasta dan sebuah puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan di dukung dengan jumlah dokter praktek terdaftar 50 orang dibandingkan dengan Kota Kebumen hanya 12 orang.

Berdasarkan dari rangkuman hasil analisis sebelumnya, Kota Gombong sangat berperan dan mempengaruhi wilayah di Kabupaten Kebumen melalui peran yang diemban dan jangkauan pengaruh yang luas.



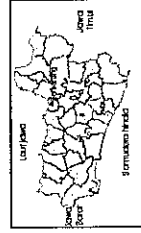
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN

PETA
PERAN KOTA GOMBONG DAN KOTA KEBUMEN

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten

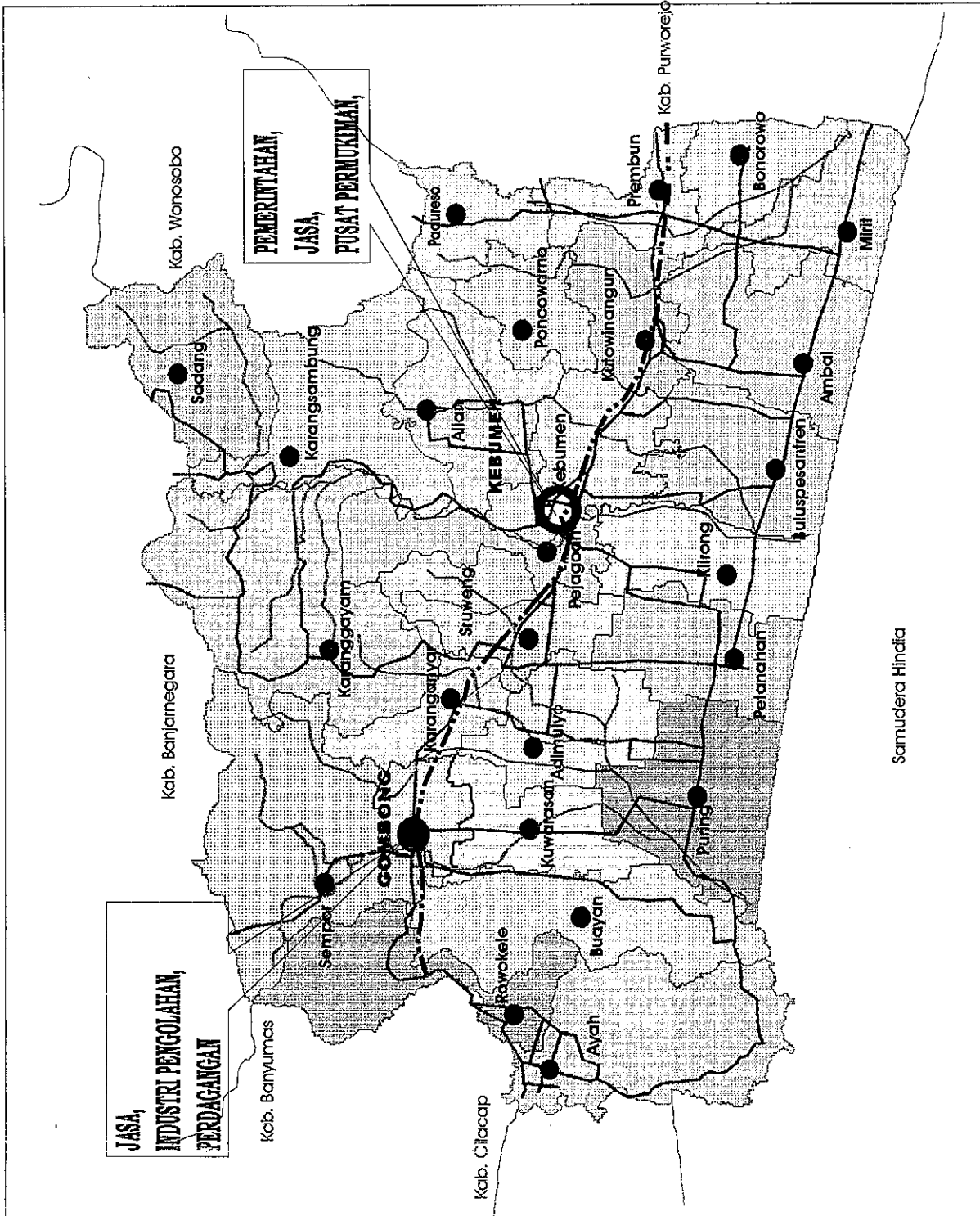


Nomor Gambar : 412
Halaman : 187



Skala 1 : 50.000

Sumber : Ancilisis Kedudukan Kota Gombong , 2004



Peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan mengindikasikan Kota Gombang sebagai kota pelayanan jasa dan perdagangan. Hal ini didukung dari hasil analisis sektor basis dan interaksi ekonomi. Dari kedua analisis ini Kota Gombang memiliki sektor basis sekunder dan tersier lebih banyak dari Kota Kebumen yaitu pada sektor industri pengolahan dan bangunan dan konstruksi, dengan memiliki nilai *LQ* lebih tinggi pada sektor angkutan dan komunikasi dan Jasa-jasa.

Kota Kebumen memiliki fasilitas yang mengarah kepada kota pemerintahan dan jasa, hal ini dikarenakan fasilitas paling berpengaruh di Kota Kebumen adalah keberadaan fasilitas pemerintahan. Sektor basis yang tertinggi nilai *LQ* nya adalah sektor Listrik, gas dan air minum karena sebenarnya karena keberadaan kantor pengelolanya yaitu adanya Kantor PLN dan Kantor PDAM.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut maka peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan dalam sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen adalah pusat jasa, pusat industri pengolahan dan perdagangan berskala regional dan lokal sedangkan Kota Kebumen adalah pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat permukiman.

BAB. V PENUTUP

5.1. Temuan Penelitian

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat peran kota Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena Kota Gombang menjadi suatu sub sistem perkotaan yang memiliki interaksi ekonomi yang besar terhadap wilayah Kabupaten Kebumen bagian barat di 8 kecamatan yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring.
2. Kota Gombang memiliki memiliki interaksi yang kuat antara Kota Gombang dengan daerah belakangnya karena ketersediaan fasilitas Kota Gombang yang lengkap dan peran/fungsi kota yang disandang Kota Gombang.
3. Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan mempunyai peran/fungsi kota terhadap wilayah pengaruhnya sebagai berikut :
 - a. Pusat Pelayanan Umum dan Sosial
 - b. Pusat komersial dan pelayanan jasa
 - c. Pusat pemasaran dan perdagangan regional
 - d. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian
 - e. Pusat transportasi dan komunikasi regional
 - f. Pusat Transformasi Sosial
4. Faktor-faktor pendukung peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan tersebut adalah :
 - a. Fasilitas yang lengkap

- b. Aksesibilitas yang baik
 - c. Interaksi yang kuat dengan kawasan belakangnya
 - d. Struktur internal perkotaan
 - e. Budaya masyarakat
5. Dari hasil analisa faktor yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan, Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan bukan berdasar pada keberadaan industri tetapi lebih mengarah sebagai kota yang memberikan pelayanan ke wilayah belakangnya yang didominasi sektor pertanian.
6. Terjadi penumpukan fasilitas baik jenis maupun jumlah di Kota Kebumen dan Kota Gombong, sehingga berdasarkan analisis gravitasi, titik henti dan survey maka sistem kota di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :
1. Sistem Kota Gombong terdiri dari: Kota Gombong, Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, Puring.
 2. Sistem Kota Kebumen terdiri dari: Kota Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Alian, Klirong, Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Ambal, Poncowarno, Karang sambung, Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, dan Sadang.
7. Kabupaten Kebumen sektor basisnya merupakan sektor primer dan tersier, sedangkan Kecamatan Gombong sektor basisnya adalah sekunder dan tersier dan tidak memiliki sektor basis primer. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gombong memiliki ciri perekonomian perkotaan.
8. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan dalam sistem perwilayahan di Kabupaten Kebumen adalah pusat jasa, pusat industri

pengolahan dan perdagangan berskala regional dan lokal sedangkan Kota Kebumen adalah pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat permukiman.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa peran Kota Gombong sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena mendominasi perekonomian wilayah barat Kabupaten Kebumen, ditunjukkan dengan wilayah pengaruh dan interaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya yaitu di 8 kecamatan yaitu Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah dan Puring. Dominasi Kota Gombong terhadap wilayah sekitarnya mengakibatkan ketergantungan wilayah sekitarnya terhadap fasilitas perkotaan Kota Gombong dan sistem distribusi barang, baik ke wilayah belakangnya maupun ke kota besar.

Kota Gombong memiliki pengaruh kuat karena keberadaan fasilitas yang lengkap dan mempunyai peran sebagai (1). Pusat Pelayanan Umum dan Sosial, (2). Pusat komersial dan pelayanan jasa, (3). Pusat pemasaran dan perdagangan regional, (4). Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, (5). Pusat transportasi dan komunikasi regional dan (5). Pusat Transformasi Sosial.

Apabila meninjau teori pusat pertumbuhan bahwa kutub pertumbuhan regional sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan, maka hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi di Kota Gombong karena Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan bukan berdasar pada keberadaan industri besar tetapi lebih mengarah sebagai kota yang memberikan pelayanan ke wilayah belakangnya yang didominasi sektor pertanian.

Dengan adanya dominasi Kota Gombang terhadap wilayah sekitarnya dan berhirarki I, sama seperti Kota Kebumen sebagai ibukota Kabupaten Kebumen maka dalam sistem perwilayahan Kabupaten Kebumen, terdapat dua kota yang mempengaruhi perkembangan wilayah. Dengan fasilitas dan aktivitas yang terjadi, Kota Gombang mengarah sebagai pusat jasa, pusat industri pengolahan dan perdagangan berskala regional dan lokal sedangkan Kota Kebumen adalah pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat permukiman.

5.3. Rekomendasi

Dari temuan penelitian yang didapatkan, maka perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pemerintah Daerah :

1. Berdasarkan kesimpulan bahwa perkembangan Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan terutama disebabkan peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah bagian barat Kabupaten Kebumen maka Pemerintah Kabupaten Kebumen hendaknya memperhatikan prasarana dan sarana transportasi di wilayah Kota Gombang baik angkutan perdesaan maupun perkotaan. Peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan di bagian Kabupaten Kebumen dapat lebih meningkat apabila ditunjang oleh prasarana dan sarana perhubungan yang lebih baik seperti peningkatan kondisi jaringan jalan dan memperluas rute angkutan perdesaan.
2. Kota Gombang apabila ingin mengalami perkembangan yang lebih cepat, peran sektor industri harus lebih dikembangkan. Sektor industri yang dikembangkan adalah industri yang mempunyai keterkaitan dengan wilayah sekitarnya sehingga

pengembangan industri di Kota Gombang dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya.

3. Agar pengembangan wilayah di Kabupaten Kebumen dapat terlaksana dengan baik perlu adanya integrasi pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat saling melengkapi. Dengan fasilitas yang dimiliki dan interaksi ekonomi yang terjadi maka Pemerintah Kabupaten Kebumen hendaknya mengarahkan Kota Gombang sebagai pusat jasa, pusat industri pengolahan dan perdagangan berskala regional dan lokal sedangkan Kota Kebumen adalah pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat permukiman.

B. Studi Lanjutan :

1. Keterbatasan waktu, data dan tenaga serta alat analisis yang sangat sederhana menjadikan studi ini belum begitu mendalam, sehingga diperlukan studi lanjutan berupa studi yang diperluas, yang bisa memberikan hasil yang lebih mendalam tentang Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen beserta prospek pengembangannya.
2. Perlu dilakukan studi lanjut tentang potensi pengembangan sektor industri di Kota Gombang yang mempunyai keterkaitan dengan hinterland Kota Gombang sehingga pengembangan sektor industri di Kota Gombang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah sekitarnya. .
3. Perlu dilakukan studi yang mendalam terhadap struktur internal Kota Gombang, sehingga dapat mengetahui pengaruh struktur internal Kota Gombang terhadap peran Kota Gombang sebagai pusat pertumbuhan dan pengaruhnya terhadap daerah belakang..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alkadri (ed). 1999. *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Edisi Pertama, Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah-BPPT.
- Aninomous. 1979. *Guidelines for Rural Centre Planning*. New York: Economic and Social Commission fo Asia and the Pasific, United Nations.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFU-UGM.
- Bintartoet al. 1982. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: Cetakan Kedua, LP3ES
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Cetakan Ketiga, PT. Ghalia Indonesia.
- Bourne, L. S and Simmons, J. W. 1978. *Systems Of City: readings on structure, growth, and policy*. New York : Oxford University Press.
- Branch, Melville C, 1995, *Perencanaan Kota Komprehensif :Pengantar dan Penjelasan*; Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru: Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
- De Jong, Wouter dan Van Steenbergen, Frank, 1987, *Town and Hinterland in Central Java*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Friedman, John and Clyde Weaver. 1979. *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. London : Edward Arnold Publisher Ltd.
- Glasson, John. . 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta : Lembaga Penerbit UI.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB, Bandung.
- Kadariah, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE UI Jakarta, 1985.
- Nasution, 2002, *Metodologi Research*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara

- Nurzaman, Siti Sutriah, 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis*, Bandung, Penerbit ITB.
- Parr, J. B. 1973. *Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory*. Carfax Publishing.
- _____. 1999. *Growth Poles Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View*. Carfax Publishing.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta : Lembaga Penerbit UI.
- Rodinelli, Dennis. A. 1983. *Secondary Cities in Developing Countries: Policies for Diffusing Urbanization*. Beverly Hills: Sage Publications.
- _____. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. New York: Westview Press.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soegijoko, Budhy T.S, ed, 1997, *Bungai Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Rasindo
- Sumaatmadja, Nursid, 1988, *Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*, Bandung Penerbit Alumni
- Tika, Moh. Pabundu, 1996, *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Warpani, Suwardjoko. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Winarso, Haryo, et al, ed 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam era Transformasi di Indonesia*, Bandung: Penerbit ITB.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Desertasi, Thesis, Skripsi

- Bharata, Mohammad Iqbal. 2002. *Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar*. Thesis , MPPWK, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sihono, 2002, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta*, Thesis , MPPWK, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Harjanta, Ign, 2002, *Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional di Jawa Tengah, 1983-2000*, Thesis , MPKD, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta.

Nugroho, Prihadi. 1997, *Karakteristik Kota-kota Kedua di Propinsi Jawa Tengah*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Buku-Buku Kelompok Terbitan Terbatas

Ma'arif, Samsul. 2000. *Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah*. Semarang : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Bappeda Jawa Tengah, 1998, *Laporan Akhir: Pengkajian dan Penetapan Sistem Perkotaan Prop. Jawa Tengah*, Semarang, Bappeda Jawa Tengah

Jurnal, Media Informasi Umum dan Internet

National Urban Development Strategy. 2003. Tersedia di alamat : www.google\NUDS.hmt.

Prabatmodjo, Hastu, *Peran Kota Kecil dalam Konteks wilayah Mega Urban di Indonesia*, Jurnal PWK, 1993, Oktober

Sujarto. 1993. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.9. Bandung.

Sumadibyo, Rachmadi B., *Kajian Perkembangan Kota dan Wilayah dalam Dua dasa Warsa Terakhir*, Forum Perencanaan Pembangunan , Vol II Nomor 1 1994, Juni

Setiawan, Bakti, *Tipologi Teori Perencanaan Kota: Agenda Riset untuk Indonesia*, Forum Perencanaan Pembangunan , Vol II Nomor 1 1994, Juni

Suyono, Haryono, *Kebijakan Pergerakan Mobilitas penduduk dalam menghadapi Mega Urban dan Kota Kecil di Indonesia*, Jurnal PWK, 1993, Oktober

Tjahjati S, Budhhy, *Arahan Kebijakan Tata Ruang Nasional dalam menghadapi fenomena wilayah Mega Urban di Indonesia*, Jurnal PWK, 1993, Oktober

Peraturan dan Buku-Buku Data

Aninymous. 1992. *UU No.24, 1992, Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Aninymous. 2003. *Kebumen Dalam Angka Tahun 2002*. : Bappeda Kabupaten Kebumen, dan Badan Pusat Statistik Kebumen

Aninymous. 2003.. *Revisi RTRW Kabupaten Kebumen 2004-2013*, Bappeda Kabupaten Kebumen.

Aninymous. 1989.. *RUTRK IKK Gombong 1990-2010*, -Bappeda Kabupaten Kebumen.